

**PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DAFTAR ISI

<u>DAFTAR ISI</u>	2
Ringkasan	4
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	10
<u>1.1. Latar Belakang</u>	10
<u>1.2. Tujuan</u>	11
<u>1.3. Sasaran</u>	12
<u>1.4. Manfaat</u>	12
<u>1.5. Lingkup Pekerjaan</u>	12
<u>1.6. Keluaran</u>	12
<u>1.7. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan</u>	13
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	14
<u>2.1. Hubungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam</u>	14
<u>2.2. Produk Lokal Hasil Pertanian dan Integrasi Usaha Tani Terpadu</u>	17
<u>2.3. Produk Lokal di Sekitar Perikanan dan Potensi Hawa sebagai Penyedia Pakan Ikan</u>	19
<u>2.4. Produk Lokal di Sektor Peternakan</u>	19
<u>2.5. Otonomi Daerah</u>	24
<u>2.6. Pengelolaan Ekonomi Lokal</u>	26
<u>2.7. Perlindungan Produk Lokal</u>	28
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	31
<u>3.1. Data</u>	31
<u>3.2. Analisis Data</u>	32
<u>BAB IV GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PRODUK LOKAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA</u>	34
<u>4.1. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara</u>	34
<u>4.2. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi</u>	34

<u>4.3.</u>	<u>Angka Ketergantungan</u>	37
<u>4.4.</u>	<u>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</u>	38
<u>4.5.</u>	<u>Indeks Pembangunan Manusia</u>	39
<u>4.6.</u>	<u>Kemiskinan</u>	41
<u>4.7.</u>	<u>Indeks Gini</u>	42
<u>4.8.</u>	<u>Produk Lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara</u>	43
<u>4.9.</u>	<u>Produksi Tanaman Palawija</u>	43
<u>4.10.</u>	<u>Produksi Tanaman Sayuran</u>	56
<u>4.11.</u>	<u>Produksi Tanaman Buah</u>	58
<u>4.12.</u>	<u>Produksi Tanaman Perkebunan</u>	61
<u>4.13.</u>	<u>Produktivitas Peternakan</u>	71
<u>4.14.</u>	<u>Perkembangan Jumlah Industri</u>	75
<u>4.15.</u>	<u>Perkembangan Jumlah Unit Usaha Produk Unggulan Kerajinan</u>	77
<u>4.16.</u>	<u>Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Produk Unggulan Kerajinan</u>	85
<u>4.17.</u>	<u>Perkembangan Nilai Produksi Produk Unggulan Kerajinan</u>	92

BAB V PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

<u>5.1.</u>	<u>Pemanfaatan Produk Lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara</u>	97
<u>5.2.</u>	<u>Perlindungan Produk Lokal Input Produksi</u>	102
<u>5.3.</u>	<u>Perlindungan Produk Output Lokal Produksi</u>	105
<u>5.4.</u>	<u>Analisa Produk Unggulan Kerajinan</u>	107
<u>5.5.</u>	<u>Peningkatan Eksistensi UMKM</u>	110

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.....

<u>6.1.</u>	<u>Kesimpulan</u>	114
<u>6.2.</u>	<u>Implikasi Kebijakan</u>	115

DAFTAR PUSTAKA

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah. Kekayaan alam tercermin pada keragaman potensi tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang ada serta menjadi sumberdaya unggulan yang diolah masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan sosial. Demi mendukung kekayaan unggulan wilayah tersebut maka perlu adanya perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain adalah dengan optimalisasi pemanfaatan produk lokal serta perlindungan produk lokal. Produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas produk tanaman pangan, produk perikanan terutama ikan rawa dan ikan sungai, produk peternakan seperti itik dan kerbau.

Selain produk pertanian dan peternakan, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki potensi produk lokal berupa kerajinan tangan. Sesuai dengan SK Bupati No. 218 Tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana produk-produk yang termasuk dalam SK tersebut antara lain anyaman purun, anyaman enceng gondok, anyaman rotan/lupu, anyaman bambu, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bambu, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu, lampit rotan.

Studi ini ingin mengidentifikasi kondisi ekonomi dan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selama tahun-tahun terakhir, nilai PDRB riil mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 nilai PDRB riil Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sebesar 3,42 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2020 nilai PDRB riil justru mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan nilai PDRB riil menjadi sebesar 3,36 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yakni sebesar 6,62 persen, dan terendah pada tahun 2020 yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan

hingga mencapai sebesar 1,77 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini telah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya demi mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun-tahun berikutnya khususnya pasca pandemi Covid-19.

Komoditi paling tinggi produksinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tanaman padi. Komoditi kedua adalah jagung dan ketiga adalah ubi jalar. Produksi palawija merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting, karena tanaman ini dapat menjaga kesuburan tanah dengan menstabilkan pH atau keasaman tanah. Hal ini dilakukan supaya tanah dapat menghasilkan produk pangan yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Tanaman yang banyak diproduksi di wilayah tersebut adalah tanaman padi yang mana pada tahun 2016-2020 produksi tanaman padi di Kabupaten tersebut mencapai 2700 ton per tahun. Di sisi lain, tanaman buah juga memiliki potensi besar pada setiap tahunnya.

Produksi tanaman perkebunan paling banyak adalah kelapa, sagu, karet, kelapa sawit dan tanaman purun dengan jumlah mencapai 100 ton per tahun. Komoditi lain yang menonjol adalah sektor peternakan, khususnya peternakan kerbau. Jumlah hewan ternak yang paling banyak di tahun 2015 hingga 2020 mencapai 9000 hingga 10.000 tiap tahunnya. Sedangkan komoditi sapi mencapai 700 ekor tiap tahunnya. Komoditi kambing memiliki jumlah 400 hingga 500 ekor tiap tahunnya dan domba hanya mencapai 40 ekor tiap tahunnya. Komoditi unggas yang paling banyak adalah itik alabio.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki komoditi unggulan itik alabio yang merupakan salah satu sumber plasma nutfah komoditi lokal yang memiliki keunggulan sebagai penghasil telur produktif. Itik alabio juga dikenal sebagai itik rawa yang mampu beradaptasi di wilayah rawa. Itik alabio merupakan itik lokal Kalimantan Selatan dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian No. 2921/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan jumlahnya mencapai 100.000 hingga 150.000 per tahun.

Produksi produk lokal banyak dilakukan oleh industri formal dan non-formal. Perkembangan industri formal di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlahnya

masih sangat rendah karena hingga tahun 2017 hanya terdapat 21 usaha berstatus industri formal dan 19.320 industri non formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya industri yang belum memiliki legalitas yang memadai di kabupaten tersebut.

Berdasarkan data yang telah dihimpun bahwa perkembangan jumlah unit industri produk unggulan kerajinan memiliki tren yang sangat baik. Berdasarkan jumlahnya, dari tahun 2016 hingga 2020 tidak pernah mengalami penurunan jumlah usaha kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah usaha anyaman purun yang mencapai 13.200 unit di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan yang terbanyak adalah di Kecamatan Amuntai Selatan. Untuk Jumlah terbanyak pengerajin mebel aluminium adalah di Amuntai Selatan dan Amuntai Tengah dengan jumlah mencapai 1000 unit. Jumlah unit usaha yang cukup banyak adalah anyaman purun mencapai 400 unit per tahun. Jumlah ini cenderung tidak pernah mengalami penurunan namun mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Dilihat dari sisi tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja pada usaha anyaman purun memiliki kapasitas terbanyak karena jumlah usaha yang ada juga sangat banyak. Jumlah tenaga kerja anyaman purun cenderung berasal dari lingkungan keluarga yang telah turun temurun melakukan usaha anyaman purun sehingga tidak memerlukan pelatihan dan pembekalan keterampilan dalam membuat anyaman. Meskipun demikian peningkatan pemasaran digital dan perbaruan desain anyaman perlu dilakukan terus menerus. Penyerapan tenaga kerja di bidang ini sangat membantu pemerintah dalam alokasi tenaga kerja karena sudah memiliki skill yang spesifik terkait dengan keterampilan pengrajin. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha anyaman purun mencapai 13.000 orang per tahun. Penyerapan terbanyak kedua adalah tenaga kerja pengrajin aluminium yang mencapai 1.200 orang tenaga kerja per tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja bidang kerajinan sangat membantu dalam mengurangi masalah pengangguran di wilayah tersebut.

Secara umum, nilai produk unggulan total dari tahun 2016 hingga 2020 berkisar antara 160.000.000. Jumlah produk paling banyak ada di wilayah Amuntai Selatan dengan jumlah Rp 75.759.747.000, disusul wilayah Amuntai Tengah

sebesar Rp 54.607.913.000. Selanjutnya wilayah Haur Gading dengan jumlah nilai produksi mencapai Rp 12.466.606.000. Dilihat dari jenis nilai produksi unggulan, mebel aluminium memiliki nilai produksi yang paling tinggi yaitu mencapai Rp 68.274.462.000 dan mebel kayu memiliki nilai produksi Rp 50.206.575.000, serta produksi lampit kayu dengan nilai produksi mencapai Rp 9.932.028.000. Nilai produksi anyaman purun mencapai Rp 8.868.215.000, dan anyaman enceng gondok sebesar Rp 8.215.250.000. Produk yang paling banyak memberikan sumbangsih pada pendapatan daerah adalah mebel aluminium meskipun dilihat dari jumlah usahanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usaha anyaman purun.

Berdasarkan analisis tentang berbagai produk lokal dan produk unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemanfaatan dan perlindungan produk lokal di kabupaten tersebut sangat dibutuhkan. Pemanfaatan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilakukan melalui Organisasi (komunitas) petani/peternak/pelaku perikanan, Lembaga manajerial berbadan hukum (koperasi), dan lembaga penguat modal. Selain itu juga perlu dilakukan perlindungan produk lokal input produksi yang mana perlindungan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum maksimal dilaksanakan. Terbukti dengan belum adanya Undang-undang yang menyertakan tentang perlindungan produk lokal seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kabupaten di Indonesia.

Perlindungan produk lokal atas potensi sumber daya alam sangatlah penting karena mampu menjadi pengaman dalam penggunaan produk serta memaksimalkan komoditi unggulan untuk melakukan produksi massal sehingga menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Perlindungan produk lokal dapat dimanfaatkan untuk menjaga keaslian produk lokal sehingga mampu mengembangkan produktivitas daerah yang berujung pada kemandirian pendapatan daerah.

Di sisi lain, perkembangan sumber daya alam sebagai plasma nutfah juga harus ditata dengan baik. Kerbau rawa yang menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memerlukan perbaikan sistem yaitu dari pemeliharaan secara dilepas menjadi semiintensif atau intensif, peningkatan jumlah dan kualitas pakan, serta pelayanan kesehatan ternak akan mengoptimalkan produktivitas kerbau lokal. Dengan demikian kerbau yang dihasilkan memenuhi

Standar Nasional Indonesia yang telah diatur. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya pelestarian sumberdaya genetika kerbau, perlindungan konsumen, peningkatan mutu bibit kerbau dan pencapaian kinerja agribisnis dan agroindustri. Selain itu diperlukan upaya dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang baik.

Perlindungan output lokal produksi dapat dilakukan melalui pelatihan, bantuan peralatan, fasilitas permodalan serta gerakan peningkatan inovasi dan kreatifitas serta sarana pemasaran. Hal tersebut menjadi langkah yang diperlukan untuk menjawab rendahnya produktivitas komoditi unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Komitmen pemerintah untuk menempatkan program pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) seharusnya masuk ke dalam rencana prioritas. Perlunya studi banding ke daerah yang memiliki jenis komoditas yang serupa juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing pada IKM. Perlu peran pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas yang diiringi dengan perlindungan produk lokal melalui penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), adanya peraturan tentang produk lokal, memiliki ciri dan signatur otentik untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan branding dan logo yang sesuai dengan wilayah tersebut agar menjadi faktor identik untuk wilayah tersebut.

Produk kerajinan tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat signifikan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Model usaha berbentuk UMKM dan kegiatan usaha rumahan serta penyerapan tenaga kerja yang turun temurun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas UMKM dapat dilakukan melalui *digital marketing*, ekspor produk kerajinan ke luar negeri, membuat label merk, membuat lisensi merk dagang atau bahkan HKI atas suatu model atau corak anyaman ataupun mebel. Brand dan merk dagang yang jelas pada produk kerajinan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikenal dengan mudah dan tidak akan terjadi klaim atas suatu corak atau model kerajinan yang diperdagangkan di pasar nasional ataupun internasional. Perlindungan produk ini diharapkan mampu melindungi produk asli wilayah ini sehingga apabila ada kompetitor yang lain produk-produk wilayah ini sudah aman dan tidak akan

mengalami pembajakan. Selain itu lisensi dagang juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk dibidik pada pasar internasional.

Peningkatan eksistensi UMKM dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai dukungan seperti peningkatan infrastruktur fisik, jaringan pembinaan dan langkah pengajuan legalitas formal yang perlu dibuka selebar-lebarnya. Kemudahan aturan pengajuan legalitas industri dapat menjadi langkah baru agar banyaknya industri non formal dapat meningkatkan industrinya menjadi industri formal. Dengan adanya dukungan administratif maka akan menyebabkan semakin mudahnya perlindungan produk lokal digalakkan. Produsen industri akan menyadari eksklusifitas merk industri baik industri pangan, sandang, logam, kimia, bahan bangunan dan terlebih kerajinan. Perlindungan produk lokal atas kerajinan bisa sangat dihargai apabila memiliki entitas legal yang memadai.

Peran pemerintah daerah dalam perlindungan produk lokal juga dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain pendampingan usaha produk lokal agar semakin berkembang, pengembangan usaha produk lokal, pengaturan penempatan klaster produk lokal dan daerah potensial, pembangunan pasar input maupun output, proses distribusi produk lokal. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, perlindungan terhadap produk lokal sangat diperlukan. Perlindungan Produk lokal dapat digunakan untuk melindungi faktor input, faktor output, perlindungan produk industri, perlindungan kekayaan intelektual pada produk kerajinan dan produk-produk IKM serta penerbitan HAKI. Dengan adanya perlindungan produk lokal maka dapat meningkatkan pendapatan lokal daerah dan melindungi sumberdaya alam asli Kabupaten Hulu Sugai Utara.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi hanya sebesar 1,77% dari sebelumnya 6,62% di tahun 2019. Penurunan pada sisi penawaran maupun permintaan telah menyebabkan kondisi perekonomian mengalami penurunan. Pandemi tahun 2020 ini juga telah menyebabkan tingkat pengangguran mengalami peningkatan hingga mencapai 4,49% dari sebelumnya hanya 3,47%. Kondisi ini memicu pemerintah daerah berupaya melakukan perencanaan pembangunan untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi.

Dalam upaya pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu memanfaatkan semua *endowment* yang ada termasuk lahan rawa. Lahan rawa sangat potensial untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan (Noor, 2007). Pemanfaatan lahan rawa sampai saat ini perlu diupayakan terus menerus agar menjadi maksimal khususnya pemanfaatan terhadap lahan rawa yang masih berupa lahan tidur yang belum digunakan sama sekali. Hal ini disebabkan lahan rawa masih sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keadaan topografi yang datar, ketersediaan air melimpah dan teknologi yang cukup tersedia (Noor, 2007).

Perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara berkala dan konsisten sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan rakyat (Dwiputri et al, 2019). Perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain adalah dengan optimalisasi pemanfaatan produk lokal. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbesar *multiplier effect* dari perdagangan produk lokal selama ini. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki produk lokal yang cukup unggul dan potensial. Produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas produk tanaman pangan, produk perikanan terutama ikan rawa dan ikan sungai, produk peternakan seperti itik dan kerbau.

Selain produk pertanian dan peternakan, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki potensi produk lokal berupa kerajinan tangan yang diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi jumlah permintaan yang cukup tinggi. Sesuai dengan SK Bupati No. 218 Tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana produk-produk yang termasuk dalam SK tersebut antara lain anyaman purun, anyaman enceng gondok, anyaman rotan/lupu, anyaman bambu, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bambu, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu, lampit rotan. Pada SK tersebut, produk yang mendominasi sebagai produk unggulan adalah bidang kerajinan.

Dengan adanya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait produk lokal, maka dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maka produk lokal tersebut perlu diberikan perlindungan. Maka, diperlukan sebuah kajian untuk menganalisis perlindungan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan formulasi kebijakan terkait perlindungan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2. Tujuan

Maksud dari pekerjaan penyusunan kajian “Perlindungan Produk Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah untuk menyediakan data, analisis pemanfaatan dan perlindungan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a) Untuk memperoleh data faktual atas produk lokal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara,
- b) Untuk mengetahui kondisi dan pemanfaatan produk lokal khususnya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang dapat digunakan untuk proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c) Untuk menformulasikan kebijakan masa mendatang yang terkait perlindungan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya.

1.3. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan kajian ini adalah tersusunnya laporan “Perlindungan Produk Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan program-program pembangunan khususnya upaya peningkatan produktivitas dan perlindungan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021.

1.5. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan kajian ini adalah:

- a) Menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lima tahun terakhir
- b) Menggambarkan produktivitas dan pemanfaatan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c) Memberikan saran formulasi kebijakan ekonomi makro berdasarkan kondisi atau data terkait produk lokal daerah dan menformulasikan kebijakan masa mendatang yang terkait perlindungan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya.

1.6. Keluaran

- a) Hasil analisis kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara 2016-2020, yang mencakup beberapa indikator ekonomi.
- b) Hasil analisis terhadap produktivitas dan pemanfaatan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara
- c) Rekomendasi berupa formulasi kebijakan yang dibuat di masa mendatang terkait perlindungan produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya.

1.7. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Tahap persiapan, meliputi persiapan dasar, antara lain penyusunan metode

pelaksanaan, rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, studi literatur dan kajian wilayah.

- b) Tahap pengumpulan data, meliputi pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber.
- c) Tahap kompilasi dan analisis data
- d) Tahap finalisasi, yaitu tahap penyusunan hasil kegiatan berupa dokumen hasil kajian “Perlindungan Produk Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Menurut Todaro (2005) dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat 3 (tiga) komponen penentu utama yaitu: (1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia; (2) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (3) kemajuan teknologi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan dari pendapatan nasional suatu negara dalam jangka waktu tertentu serta pada periode tertentu.

Selain pertumbuhan ekonomi, terdapat pembangunan ekonomi yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh penduduk dalam rangka menyediakan barang ekonomi, dimana semakin banyak barang ekonomi yang mampu disediakan maka akan semakin sejahtera dalam wilayah negara tersebut (Jhingan, 2000). Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keselarasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sukirno (2010) menyatakan bahwa suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh apabila memiliki jumlah balas jasa riil terhadap faktor produksi pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan adalah mengarah pada standar hidup yang layak serta peningkatan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Arsyad (2010) memaparkan formulasi dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB t - PDRB t - 1}{PDRB t - 1} \times 100\%$$

Dimana:

PDRB t = PDRB pada tahun t

PDRB t-1 = PDRB pada tahun sebelumnya (t-1)

Menurut Todaro (2003), terdapat tiga komponen penentu pertumbuhan ekonomi:

1. Akumulasi modal, meliputi semua jenis investasi yang ditanamkan baik berupa tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang dapat meningkatkan jumlah angkatan di tahun mendatang
3. Kemajuan teknologi.

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo dan W.A Lewis.

Teori pertumbuhan ekonomi modern menyatakan bahwa karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar memaparkan perkembangan langsung dari Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang. Dimana pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (AD) tetapi juga terhadap penawaran agregat (AS) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif jangka panjang, investasi menambah stok

capital (K). Dalam teori ekonomi modern, penambahan stok capital masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output yang potensial adalah output yang dapat menghasilkan stok capital yang ada. Sedangkan output yang terealisasi belum tentu sama dengan output potensial, hal ini tergantung pada jumlah permintaan agregat (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008).

Menurut Jhinghan (1993), terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya antara lain adalah:

1. Laju pertumbuhan penduduk cepat serta produk per kapita tinggi
2. Peningkatan dari produktivitas yang ditandai dengan peningkatan laju produk per kapita
3. Laju perubahan structural yang tinggi, mencakup perubahan dari sector pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa dan peralihan dari usaha perorangan menjadi skala perusahaan.
4. Tingginya tingkat urbanisasi
5. Ekspansi dari negara lain, dan
6. Peningkatan arus barang dan modal.

Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui pertumbuhan output suatu daerah yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam upaya peningkatan output sebagai refleksi dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Dengan demikian, peningkatan output akan berimplikasi pada peningkatan PDB suatu negara. Beberapa SDA yang ada di daerah telah menjadi suatu produk lokal yang perlu untuk dilindungi agar dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk lokal yang berupa hasil dari SDA tentu akan banyak memiliki kontribusi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan SDA yang

diproduksi oleh suatu wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti oleh para ahli. Secara logika, pertumbuhan ekonomi dapat dipicu oleh ketersediaan SDA yang melimpah. Namun pada beberapa faktanya, negara yang memiliki SDA melimpah justru tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki SDA kurang melimpah (Sachs dan Warner, 1995). Namun riset terhadap Negara Pakistan, Hye dan Siddiqui (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara SDA dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka 17system17. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan sebuah upaya pengelolaan SDA yang baik sebagai sebuah produk lokal agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Produk Lokal Hasil Pertanian dan Integrasi Usaha Tani Terpadu

Lahan pertanian ditanami dengan tujuan untuk diperdagangkan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada saat ini sistem pertanian di Inonesia telah dapat dikategorikan sudah maju. Teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan modern telah diaplikasikan terhadap hampir seluruh aktivitas pertanian. Aktivitas tersebut antara lain adalah seperti pemilihan bibit tanaman, pemberian pupuk, implementasi pengairan di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian khususnya. Bahkan limbah pertanian yang ada dapat dimanfaatkan di sektor atau bidang lain terkait. Sebagai contoh limbah pertanian dapat digunakan sebagai pakan ternak di bidang peternakan. Demikian juga bahwa produk yang tidak digunakan di sektor pertanian dapat digunakan di sektor lainnya seperti perkebunan dan peternakan. Demikian juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada sinergi antara bidang-bidang pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Selama ini dapat diidentifikasi bahwa di Indonesia telah terdapat interaksi komplementer antara perusahaan tanaman dan ternak. Tanaman pangan menghasilkan sisa tanaman (biomas) yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan selain rumput dan hijauan makanan ternak (HMT) yang sengaja ditanam di pekarangan, sementara ternak memberikan tenaga dan kotoran yang dapat

dijadikan pupuk. Berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari usaha pertanian/perkebunan dapat digunakan sebagai bahan pakan bagi ternak ruminansia, dan sebaliknya kotoran ternak dapat dibuat menjadi kompos dan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman.

Sistem usaha tani terpadu yang paling banyak dilakukan oleh petani dan dapat terlihat dengan nyata hasilnya adalah usaha terpadu antara tanaman pangan dan perkebunan dengan pemeliharaan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba). Sebagai contoh adalah a) sapi dengan tanaman pangan (padi, jagung, ubikayu); b) sapi dengan tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, kopi, melinjo, lada, jambu mete, tebu, salak); c) kambing/domba dengan tanaman pangan (kacang tanah, jagung); d) kambing/domba dengan tanaman perkebunan (lada, kakao, kopi, karet, kelapa sawit).

Integrasi antara pemeliharaan itik petelur dengan padi sawah juga sudah biasa dilakukan oleh peternak, karena sampai saat ini masih banyak itik petelur yang dipelihara secara tradisional, yaitu digembalakan secara berpindah dari suatu lokasi sawah setelah panen ke lokasi lainnya (Abduh dan Nurhayu 2004; Zuraida 2004). Dalam sistem integrasi seperti ini, ternak itik memperoleh pakan berupa sisa-sisa padi yang rontok atau tertinggal pada saat panen, rumput-rumputan yang tumbuh di sawah, serangga, keong sawah, kepiting batu, katak kecil dan sebagainya. Sedangkan, padi sawah akan mendapatkan keuntungan dari berkurangnya serangan hama berupa gulma, serangga dan lain-lain karena telah dimakan oleh ternak itik. Selain itu juga, diperoleh pupuk organik berupa kotoran dari ternak itik pada saat digembalakan.

Penggunaan pupuk dan pestisida yang berupa bahan kimia dan atau bahan anorganik akan berkurang dalam penerapan sistem integrasi ini. Ternak itik mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fertilisator, pestisidator dan sekaligus sebagai herbisidator (Mahfudz *et al.*, 2004). Simanjuntak (2005) juga menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari sistem integrasi ini adalah meliputi: a) berkurangnya biaya produksi akibat penurunan pemberian pupuk, pestisida, dan herbisida serta upah tenaga kerja untuk menyingi rumput; b) padi/beras yang dihasilkan menjadi padi/beras organik mempunyai harga jual yang lebih tinggi; c)

peningkatan mutu dan kondisi lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang minimal; d) biaya produksi menjadi lebih rendah karena sebagian besar sumber pakan lokal; dan e) rendahnya biaya pemeliharaan ikan.

2.3. Produk Lokal di Sektor Perikanan dan Potensi Rawa sebagai Penyedia Pakan Ikan

Usaha budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan yang cukup dalam jumlah dan kualitasnya untuk mendukung kualitas yang maksimal. Faktor pakan menentukan biaya produksi mencapai 60% - 70% dalam usaha budidaya ikan, sehingga perlu pengelolaan yang efektif dan efisien. Beberapa syarat bahan yang baik untuk diberikan adalah memenuhi kandungan gizi (protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral) yang tinggi, tidak beracun, mudah diperoleh, mudah diolah, dan bukan sebagai makanan pokok manusia. Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tampilan produktivitas ikan Nila. Beberapa jenis pakan ikan dapat ditemukan pada rawa. Dengan demikian rawa dapat menjadi sumber potensi penyedia pakan ikan.

Terdapat beberapa alternatif bahan pakan untuk ikan yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan, salah satunya adalah tepung *Azolla*. Tanaman *Azolla* potensial digunakan sebagai pakan karena banyak terdapat di perairan tenang seperti danau, kolam, rawa dan persawahan. Pertumbuhan *Azolla* sangat cepat yaitu dalam waktu 3 –4 hari sudah dapat memperbanyak diri..

2.4. Produk Lokal di Sektor Peternakan

a. Pakan ternak

Hijauan pakan merupakan bahan pakan yang mutlak diperlukan baik secara kuantitatif atau kualitatif sepanjang tahun dalam sistem produksi ternak (Abdullah *et al.*, 2005). Peternakan rakyat yang masih subsisten, hampir sebagian besar pakan yang diberikan adalah rumput dan hanya usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan rumput domestik/hijauan lokal. Tanaman budidaya yang produktif di peternakan rakyat masih sangat terbatas, umumnya rumput domestik/hijauan lokal rendah produktivitasnya.

Upaya peningkatan produksi ternak dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber protein hewani akan sangat sulit dicapai apabila ketersediaan hijauan tidak sebanding dengan kebutuhan dan populasi ternak yang ada (Rostini, 2014). Di lain pihak, produksi hijauan dari waktu ke waktu semakin menurun seiring dengan beralihnya fungsi lahan untuk pemukiman, jalan, industri serta produksi tanaman pangan dan perkebunan, sementara produksi hijauan dan padang penggembalaan sebagian besar dilakukan pada lahan-lahan marjinal (Humpreys 2001).

b. Potensi Rawa sebagai Lahan Penyedia Pakan ternak

Luas total lahan rawa Indonesia diperkirakan mencapai 33 juta hektar, yang terdiri dari 20 juta hektar rawa pasang surut dan 13 juta hektar rawa non pasang surut (rawa lebak). Berdasarkan luasan tersebut, empat juta hektar sudah dikembangkan, yang meliputi 2,6 juta hektar secara spontan oleh masyarakat/swasta, dan 1,3 juta hektar dengan bantuan pemerintah. Disamping itu, masih ada lahan rawa yang potensial untuk dikembangkan seluas empat juta hektar. Daerah rawa ini tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dimana dari 434 kabupaten/ kota di Indonesia yang ada saat ini diperkirakan 34.56 % atau lebih dari 150 kabupaten/kota mempunyai daerah rawa (BPS, 2010). Pemanfaatan dan penggunaan lahan rawa ini sangat beragam, antara lain sebagai kawasan konservasi, pengembangan tanaman pangan, hortikultura, tanaman sayur-mayur, pengembangan perkebunan, budidaya perikanan, peternakan, pengembangan tanaman industri, serta pemukiman dan prasarana.

Kalimantan Selatan saat ini diperkirakan memiliki rawa mencapai 235,676 ha yang sangat potensial untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan (Noor, 2007). Dengan demikian lahan rawa masih sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keadaan topografi yang datar, ketersediaan air melimpah dan teknologi yang cukup tersedia.

c. Potensi Rawa sebagai Penyedia Pakan Ruminansia

Rawa banyak menyimpan potensi pakan untuk peternakan, utamanya pada ternak ruminansia seperti kerbau rawa (kerbau kalang), sapi, dan kambing. Melimpahnya beragam rumput (kumpai) dan leguminosa di rawa menjadi pakan alami ternak, yang merupakan andalan peternak, terutama saat tibanya musim

kemarau. Pemanfaatan rumput rawa sebagai pengganti rumput unggul oleh peternak tradisional secara langsung dengan sistem gembala (*diangon*) atau sebagai sumber hijauan secara *cut and carry* (rumput potong), dan juga merupakan salah satu upaya dalam penyediaan pakan bagi ternak (Rostini, 2014).

Hijauan rawa merupakan hijauan yang tumbuh di lahan rawa yang mempunyai potensi pakan untuk ternak ruminansia seperti kerbau rawa (kerbau kalang), sapi, dan kambing. Melimpah dan beragam rumput dan leguminosa di rawa yang merupakan pakan alami untuk ternak, digunakan peternak sebagai pakan andalan terutama saat tibanya musim kemarau. Dalam penyediaan pakan di lahan rawa umumnya peternak memanfaatkan rumput rawa sebagai pengganti rumput unggul. Rumput rawa oleh peternak secara tradisional dimanfaatkan langsung dengan sistem pengembalaan (*diangon*) atau sebagai *cut and carry* (rumput potongan) sebagai pengganti rumput unggul (Rostini, 2014).

Ketersediaan hijauan rawa baik rumput maupun leguminosa masih sangat terbatas karena musim, pada saat musim surut hijauan rawa sulit ditemukan walaupun ada jumlahnya sangat sedikit (Fahriani & Eviyati 2008). Pemanfaatan hijauan rawa sebagai pakan ternak ruminansia belum banyak dimanfaatkan selama ini hanya digunakan untuk ternak kerbau yang digembalakan di daerah rawa, mengingat ketersediaanya fluktuatif tergantung musim (Rostini 2014). Penelitian Rostini (2014) menunjukkan bahwa tumbuhan rawa di Kalimantan Selatan memiliki 18 jenis, dengan 4 jenis spesies dominan berdasarkan skoring yang memiliki produksi cukup tinggi dan kualitas nutrisi yang baik pada musim pasang.

d. Potensi Rawa sebagai Penyedia Pakan Itik

Salah satu kunci keberhasilan pemeliharaan itik peking secara intensif adalah kualitas dan kuantitas pakan. Pakan yang berkualitas mengandung nutrisi yang seimbang, seperti protein, karbohidrat, serat kasar, lemak, vitamin, mineral, serta energi metabolis, tetapi untuk mendapatkan pakan yang berkualitas baik peternak itik harus mengeluarkan biaya cukup besar karena selain harga bahan pakan yang tinggi itik juga termasuk unggas yang konsumsi pakannya tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan bahan pakan yang tepat sehingga menghasilkan formulasi pakan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan ternak dengan

efisiensi penggunaan pakannya yang tinggi serta dapat menekan biaya produksi. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yaitu Azolla dan Lemna yang selama ini dianggap sebagai gulma pada sawah dan kolam ikan (Prasojo *et al.* 2013).

Azolla yang merupakan gulma air ternyata mempunyai potensi yang cukup tinggi sebagai pakan alternatif untuk ternak itik khususnya itik peking, karena pada Azolla kering kandungan proteinnya cukup tinggi sekitar 19,54 %. Lemna memiliki kandungan protein 13,2%. Azolla dan Lemna banyak digunakan sebagai pakan ikan dan pakan tambahan pada ayam broiler, belum banyak yang memanfaatkan Azolla dan Lemna sebagai pakan itik, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang pemanfaatan Azolla dan Lemna sebagai pakan itik khususnya itik pedaging dilihat dari kandungan nutrisi Azolla dan Lemna. Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang penggunaan kombinasi Azolla dan Lemna serta level protein pakan yang berbeda dalam ransum diharapkan mampu meningkatkan bobot dan persentase daging dan tulang karkas itik peking umur delapan minggu (Prasojo *et al.* 2013).

Usaha bidang pemeliharaan ternak unggas khususnya itik kini semakin berkembang dengan baik. Itik merupakan jenis unggas yang memiliki potensi dwiguna, yaitu sebagai penghasil telur dan daging. Ternak itik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan pangan bergizi. Selain itu, itik memiliki kemampuan lebih tahan terhadap penyakit, dapat dipelihara tanpa dan atau dengan air serta pertumbuhannya lebih cepat dari ayam buras. Pengembangan usaha peternakan itik pedaging di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai kendala.

Salah satu kendala dalam pengembangan usaha peternakan khususnya ternak itik, yaitu penyediaan pakan yang berkualitas baik. Kendala dalam penyediaan pakan meliputi ketersediaan bahan baku pakan yang bernilai nutrisi, harga mahal terutama sumber protein dalam pakan yang masih impor seperti tepung ikan dan bungkil kedelai. Pada usaha peternakan biaya pakan mencapai 60%-70% dari total biaya produksi. Untuk menekan biaya pakan tersebut perlu dilakukan usaha untuk mencari sumber bahan baku yang lebih murah, mudah didapat, bergizi baik, tetapi tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Untuk itu perlu digali potensi bahan

pakan yang banyak tersedia dalam negeri. Apabila biaya pakan dapat ditekan, maka akan meningkatkan keuntungan peternak dan sekaligus membantu mengembangkan usaha pemeliharaan itik pedaging. Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan memanfaatkan *Azolla microphylla* yang dijadikan bahan pakan alternatif untuk ternak itik pedaging. Selain *Azolla microphylla*, *Lemna polyrhiza* juga dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif untuk itik pedaging. *Azolla microphylla* adalah nama tumbuhan paku-pakuan akuatik yang mengapung di permukaan air.

Teknologi penggunaan tumbuhan air bernama *Azolla* (*Azolla microphylla*) telah diperkenalkan untuk dipadukan dengan sistem produksi minapadi (Suriapermana *et al.* 1993). Oleh sebab itu, penggunaan *Azolla* dapat mengurangi jumlah pupuk anorganik pada penanaman padi dan selain itu hasil ikan yang diperoleh dengan pemberian *Azolla* akan lebih banyak daripada tanpa pemberian *azolla* (Suriapermana *et al.* 1993). *Azolla* dapat dimanfaatkan oleh sebagai bahan pakan hijauan sumber protein.

e. Pengawetan Pakan Hijauan

Usaha pengawetan hijauan pakan, ada beberapa cara yaitu dengan pembuatan hay, silase, dan haylase (Ridwan *et al.*, 2005). Hay adalah pengawetan hijauan pakan dengan cara pengeringan berkadar air rendah (14-15%) sehingga hijauan akan diberikan kepada ternak dalam bentuk kering. Silase adalah pengawetan hijauan pakan yang memiliki kadar air tertentu dan telah diawetkan melalui proses fermentasi *an-aerob* dalam keadaan segar, sehingga ketika diberikan kepada ternak diupayakan untuk tetap dalam keadaan segar (Widyastuti, 2008), sedangkan Haylase adalah gabungan dari keduanya (Sariri *et al.*, 2011). Pengawetan menggunakan *Laktobacillus plantarum* menempati urutan teratas dalam pemakaian sebagai inokulan karena sangat efisien dalam menggunakan karbohidrat terlarut pada hijauan dan menghasilkan asam laktat sehingga cepat menurunkan pH (Weinberg & Much 2003).

Hasil kajian potensi penggunaan hijauan rawa sebagai pakan ternak ditinjau dari pencernaan dan performa ternak Kambing Kacang di Kalimantan Selatan dilaporkan Rostini (2014). Perlakuan dengan metode silase hijauan rawa mampu

meningkatkan konsumsi dan pencernaan pakan, yaitu meningkatkan protein kasar, konsumsi protein, konsumsi bahan kering, konsumsi Bet-N, sehingga mampu meningkatkan bobot badan total 3,5 kg dalam 8 minggu dengan pertambahan berat badan harian ($62,60 \text{ g hari}^{-1}\text{ekor}^{-1}$). Silase hijauan rawa berpotensi untuk digunakan sebagai pengganti hijauan lapangan bagi ternak kambing pada saat musim surut. Produk-produk lokal tersebut harus terus dapat diproduksi dan dikembnagkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya agar terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang no.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintah daerah telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Widjaja (2004), inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah selanjutnya telah menimbulkan hak kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikeloladalam suatu system pengelolaan keuangan daerah secara profesiona, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas serta *value of maney* (efektif, efisien dan ekonomis)

sebagai alat perwujudan akuntabilitas public (*accounting for governance*) (Rante et al, 2017).

2.5.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa pemberian otonomi daerah berimplikasi terhadap penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Rahayu (2010) mengemukakan beberapa konsep desentralisasi, yaitu:

- a. Desentralisasi administratif
- b. Desentralisasi politik
- c. Desentralisasi Ekonomi
- d. Desentralisasi fiskal

Dalam desentralisasi pada hakekatnya pemerintah mengemban tiga fungsi utama diantaranya fungsi Distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stinglitz, 2000). Dalam fungsi Distribusi pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih lengkap untuk dapat melaksanakan adas pemerataan pendapatan kepada masyarakat melalui Distribusi pembangunan ekonomi serta menjadi serta menjain adanya keadilan dalam mengatur Distribusi pendapatan. Fungsi aloasi merupakan peran pemerintah dalam mengendalikan dan mengalokasikan sumberdaya ekonomi termasuk alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat. Dalam fungsi stabilisasi pemerintah bertindak sebagai penyeimbang di berbagai aspek sosial ekonomi seperti pengangguran, harga da pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan tujuan desentralisasi bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan termasuk dana transfer yang diberikan, maka apabila pemerintah memanfaatkannya secara efektif pertumbuhan ekonomi yang stabil akan tercapai dan kestabilan tingkat harga akan tercapai dengan baik (Kusuma, 2016).

2.5.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002) mengemukakan terdapat beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1). Rasio kemandirian

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumberdana luar atau eksternal. Adapun Rasio Kemandirian diukur dengan :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat Pemerintah+Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2). Kemampuan Keunagan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keungan dapat mendukung otonomi daerah (Mardiasmo, 2002) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KKDt = \frac{TPDt}{TBDt} \times 100\%$$

Keterangan:

KKDt = Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Persen

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBDt = total belanja daerah tahu t

3). Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapayan sesuai yang ditargetkan (Mardiasmo, 2002):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.6. Pengelolaan Ekonomi Lokal

Potensi ekonomi daerah didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan pendirinya dan berkesinambunan (Suparmoko, 2002). Sumiharjo (2008) selanjutnya menjelaskan bahwa pengembangan sector unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalam RPJPD dan RPJMD tampak bidang-bidang prioritas

pada setiap program daerah kabupaten/kota dalam memperkuat pengembangan sector unggulan. Selain itu, APBD harus mencerminkan program-program dan tujuan-tujuan pembangunan karena suatu rencana akan bersifat operasional apabila anggarannya tersedia. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah (Husna et al, 2013).

Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing. Pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sector unggulan tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003).

Tarigan (2007), menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi 2 (dua) sector, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak diekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak utama (*prior mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sector basis dan non basis menggunakan metode Location Quotient (LQ) (Triyuwono & Yustika, 2003). Dengan mengetahui kegiatan basis disuatu daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka dapat menguatkan daya saing daerah tersebut (Husna, et al, 2013).

Abdullah (2002), menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan internasional. Indikator-indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah menurut Abdullah et al (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2.7. Perlindungan Produk Lokal

Pada era otonomi daerah, penguatan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah sangat diperlukan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudrajat, 2004). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Susanti, 2013). Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sector pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dimana keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya penting, dinamis dan bahan sangat menentukan dalam strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut Munir (2007), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi pengembangan wilayah dianggap sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan kelembagaan secara lokal.

Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha
2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
3. Keberadaan lembaga keuangan mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran
4. Keberadaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal

Sesuai dengan fungsi dan keberadaannya, produk lokal suatu daerah tentu membutuhkan perlindungan yang jelas sebagai produk yang otentik. Pemerintah nasional memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menerbitkan peraturan tentang perlindungan produk lokal. Namun hingga kini, hanya terdapat beberapa wilayah yang telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Produk Lokal antara lain Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kabupaten Sumbawa (NTB), Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lombok Timur. Dalam undang-undang tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa perlindungan produk lokal sangat dibutuhkan guna memelihara, dikembangkan, didayagunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan

kekhasan daerah untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga untuk mencapai pengembangan dan perlindungan yang tetap terhadap produk lokal pada daerah masing-masing sehingga mampu memberikan perlindungan daya kreatif dan daya saing terhadap pangsa pasar lokal, nasional dan internasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan dalam Hulu Sungai Utara Dalam Angka (HSU DA). Beberapa kekurangan data dalam penelitian ini diambil dari website BPS yang dipublikasikan secara gratis kepada masyarakat. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis juga dibandingkan dengan kondisi pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Data pada tingkat provinsi juga diakses melalui HSU DA dan website BPS.

Data primer diperoleh dari wawancara terhadap para pemangku kepentingan, yaitu khususnya pejabat dan pegawai publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta sejumlah petani, peternak, dan penghasil produk lokal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Data yang tersedia diharapkan dapat memberikan informasi tentang profil wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, profil potensi, pengelolaan sumber daya alam sebagai produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta hubungan antara ketersediaan sumber daya alam dan produksi produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat. Dari hasil analisa data diharapkan dapat diperoleh informasi tentang sumber daya alam dan produk lokal yang memiliki kontribusi paling besar terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, akan dilakukan pembuatan sebuah formulasi kebijakan demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara di masa yang akan datang yang dapat berupa baik kebijakan dalam jangka pendek maupun kebijakan dalam jangka panjang.

1.2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat yaitu analisis statistika deskriptif. Metode yang cocok diimplementasikan dalam kajian ini dengan ketersediaan data yang ada adalah metode statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa memiliki tujuan membuat kesimpulan untuk melakukan generalisasi.

Metode penyajian data yang biasa dilakukan dalam statistika deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram pie atau disebut juga sebagai diagram lingkaran, pengukuran tendensi sentral yaitu menggunakan modus, median atau rata-rata, serta mengidentifikasi penyebaran data dengan menghitung nilai simpangan baku atau deviasi standar, dan melakukan perhitungan serta analisis dengan prosentase. Selain itu melalui analisis statistika deskriptif peneliti bisa membandingkan suatu grafik pertumbuhan jumlah sumber daya alam potensial sebagai produk lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kabupaten terdekat. Selanjutnya metode statistika deskriptif juga akan membandingkan kontribusi produksi sumber daya alam serta produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap produksi produk lokal yang ada di level provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu proses dalam penyusunan faktor penentu keberhasilan diawali dengan kajian atas lingkungan yang diteliti meliputi situasi, kondisi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah, dalam konteks ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dikarenakan kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat dalam pembangunan, mencakup kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman yang berpengaruh terhadap lingkungan internal dan eksternal.

Untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan, analisis lingkungan strategis dilakukan dengan cara menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi. Analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya

akan selalu berada pada posisi strategis yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan strategis mencakup di dalamnya adalah analisis atas sistem kelembagaan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PRODUK

LOKAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

4.1. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara

Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

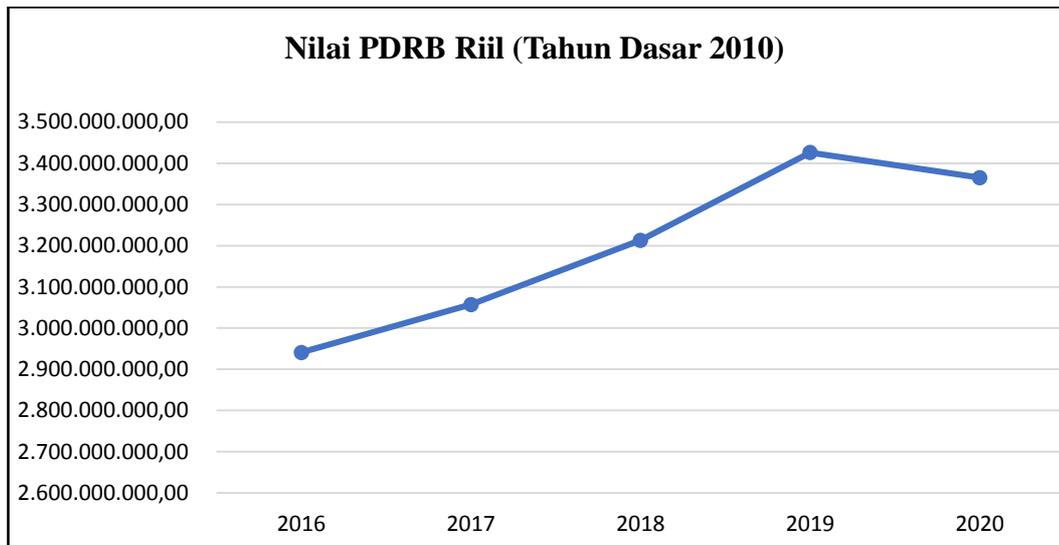
Salah satu variabel penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu periode tertentu. Kinerja perekonomian daerah juga dapat dinilai dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Adapun nilai PDRB selama lima tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Nilai PDRB Riil (Berdasarkan harga konstan tahun 2010)

Tahun	Nilai PDRB (Ribuan Rupiah)	Nilai PDRB Riil (Tahun Dasar 2010) Ribuan Rupiah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	3.865.387.500	2.940.593.055,53	5,89
2017	4.190.377.350	3.057.136.873,14	3,96
2018	4.572.896.470	3.213.098.566,03	5,10
2019	4.954.312.630	3.425.929.661,45	6,62
2020	4.965.900.000	3.365.292.487,19	1,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Tabel 4.1 menunjukkan nilai PDRB nominal dan nilai PDRB Riil di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai PDRB riil Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 nilai PDRB riil mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dapat dikarenakan karena adanya kemunduran perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 hampir pada seluruh daerah di Indonesia.



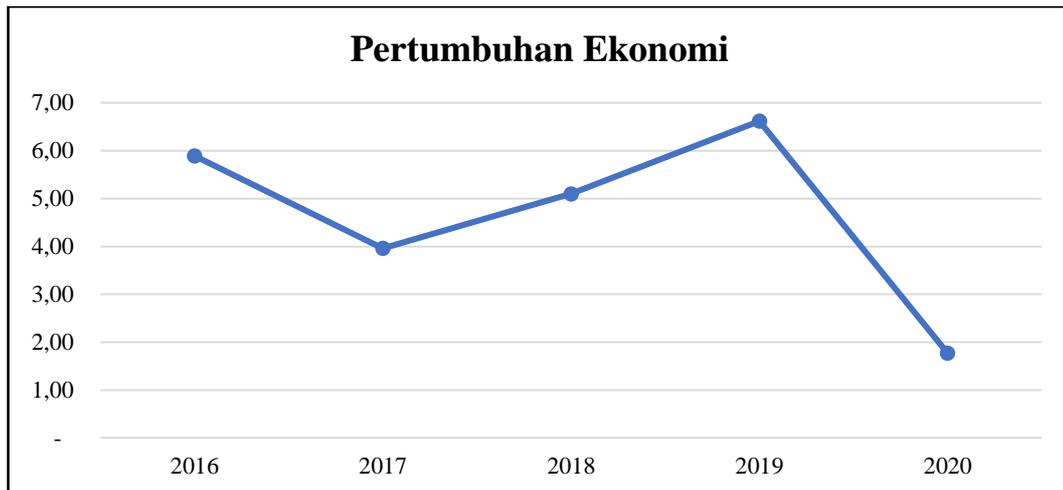
Gambar 4.1. Nilai PDRB Konstan (2010) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2016-2020.
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Pada tahun 2016 nilai PDRB riil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 2,94 triliun rupiah. Selanjutnya nilai PDRB riil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sebesar 3,42 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2020 nilai PDRB riil justru mengalami penurunan seperti yang terlihat pada gambar. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan nilai PDRB riil menjadi sebesar 3,36 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan di suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui melalui perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil). Tabel 4.2 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 hingga tahun 2020. Selanjutnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih jelasnya diilustrasikan pada Gambar 4.2.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan. Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai utara tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi turun

sebesar 1,93 persen dari tahun sebelumnya yakni dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,89 persen di tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 3,96%. Selanjutnya pada tahun berikutnya hingga 2019 tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Gambar 4.2. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2016 – 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yakni sebesar 6,62 persen, dan terendah pada tahun 2020 yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai sebesar 1,77 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini telah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya demi mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun-tahun berikutnya khususnya pasca pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat diperlukan khususnya dalam penyusunan formulasi kebijakan serta perencanaan pembangunan yang strategis dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun (Dwiputri, Kusufi, dan Allo; 2019). Dengan demikian pembangunan daerah yang telah dilakukan diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif yaitu 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas. Tabel 4.2 menyajikan angka ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2. Angka Ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016-2020

Tahun	Angka Ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2016	1,95
2017	1,96
2018	1,97
2019	1,97
2020	2,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir berkisar pada angka dua. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 2 (dua) penduduk produktif menanggung 1 (satu) penduduk non-produktif. Kondisi ini cukup ideal karena jumlah yang menanggung lebih banyak dibandingkan jumlah tertanggung. Terlebih lagi dengan adanya pandemi yang menyebabkan angka ketergantungan semakin membaik. Hal ini dikarenakan jumlah yang tertanggung menjadi semakin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang menanggung. Dengan demikian semakin tinggi angka ketergantungan seperti pada Tabel 4.2 menunjukkan suatu kondisi yang semakin ideal atau semakin baik secara ekonomi.

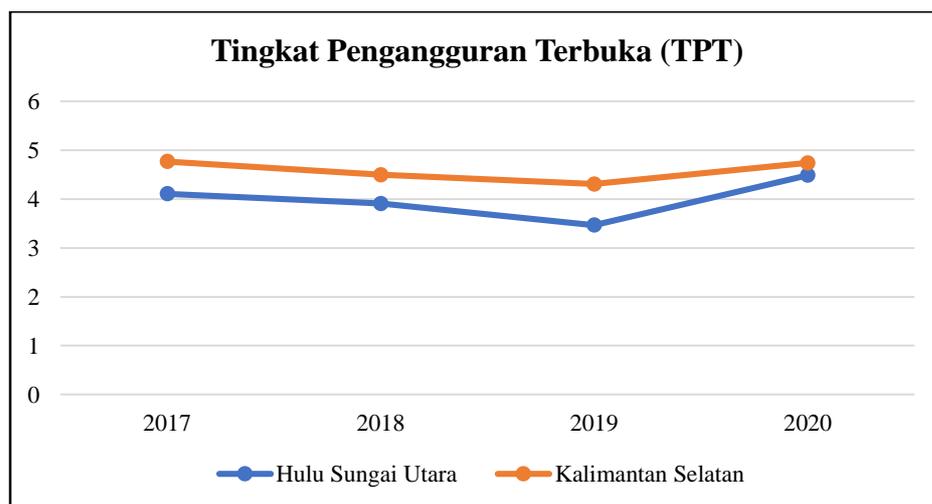
Angka ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 sebesar 2,13 persen merupakan angka ketergantungan tertinggi dari lima tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka ketergantungan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semakin rendah beban yang

harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek pokok dalam pembahasan ketenagakerjaan penduduk yang menjadi dasar bagi formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dalam pembahasan ketenagakerjaan, tidak terlepas dari pembahasan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Variabel ini merupakan salah satu variabel yang penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi makro suatu daerah.

Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, maka menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin baik. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 adalah 4,11%. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya tingkat pengangguran mengalami penurunan sehingga pada tahun 2019 tingkat pengangguran telah mencapai 3,47%. Namun sayangnya, tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga mencapai 4,49%. Hal ini mungkin dapat dipicu karena krisis akibat pandemi Covid-19.



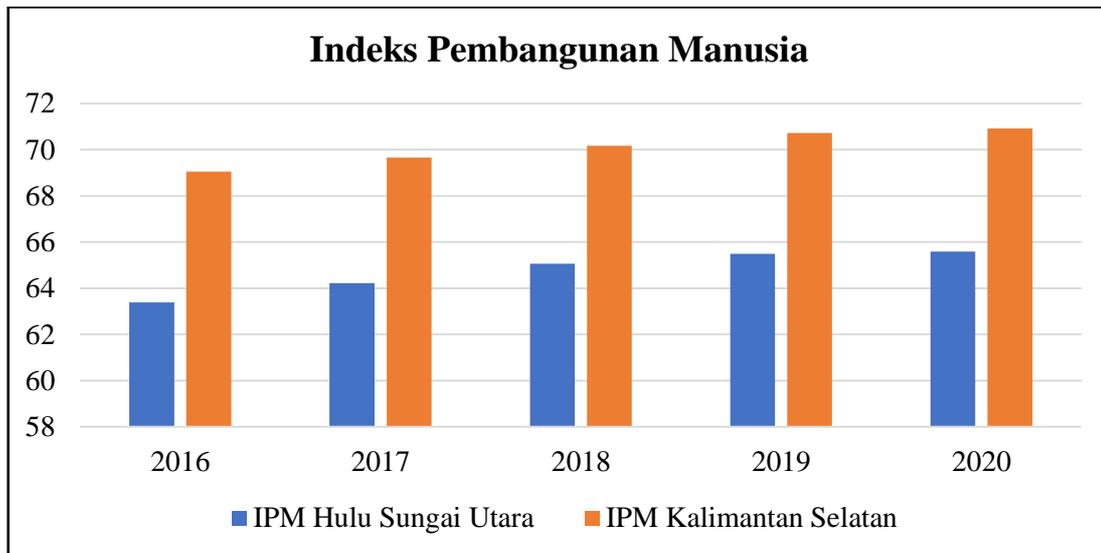
Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Krisis akibat pandemi Covid-19 disebabkan karena adanya penurunan baik di sisi permintaan dan penawaran. Dengan diimplementasikannya pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan sektor produksi tidak bisa berjalan dengan baik sehingga sisi penawaran mengalami penurunan. Demikian halnya dengan sisi permintaan, pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan masyarakat mengurangi beberapa konsumsinya sehingga juga terjadi penurunan di sektor permintaan. Rendahnya sektor permintaan dan penawaran menyebabkan terjadi peningkatan tingkat pengangguran pada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara umum, TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara representatif dan terukur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.



Gambar 4.4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 sebesar 64,21. Angka tersebut termasuk dalam peringkat kinerja pembangunan manusia kategori “sedang”. Selama tahun 2016 hingga 2019 nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan bahwa strategi pembangunan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah berdampak positif khususnya pada pembangunan manusia. Sedangkan di tahun 2020 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki nilai indeks yang sama dengan tahun sebelumnya yakni 65,49 persen. Kondisi pandemi telah menyebabkan nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami perubahan. Secara umum, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang bersifat kompleks dan multidimensional. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penganggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Tabel 4.4 menunjukkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2016 hingga 2020 yang direpresentasikan dalam Tingkat Kemiskinan (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) selama lima tahun terakhir. Tingkat kedalaman kemiskinan (P2) merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan (P3) menunjukkan persebaran (kesenjangan) pengeluaran antar penduduk miskin.

Tabel 4.3 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara (2016 – 2020)

Tahun	Tingkat Kemiskinan (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2016	6,76	0,83	0,17
2017	6,65	1,22	0,28
2018	6,38	1,14	0,27
2019	6,50	0,66	0,12
2020	6,14	0,85	0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat memiliki tren yang fluktuatif. Upaya pengurangan tingkat kemiskinan yang ideal yaitu mencapai tingkat kemiskinan 0 (nol) persen yang artinya tidak terdapat penduduk berkategori miskin lagi. Meskipun demikian, upaya ini tidak mudah dilakukan. Dengan demikian sebuah formulasi kebijakan yang bersifat khusus dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan kemiskinan selain diupayakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi

mampu menikmati kehidupan yang layak serta bermartabat. Pemerintah daerah harus menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi ketidakmerataan pendapatan pada lapisan masyarakat. Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Perkembangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 hingga 2019 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4 Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan (2015-2019)

Tahun	Indeks Gini Hulu Sungai Utara	Indeks Gini Kalimantan Selatan
2015	0,36	0,35
2016	0,32	0,33
2017	0,31	0,35
2018	0,32	0,34
2019	0,32	0,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung fluktuatif. Secara umum nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih merata dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2. Produk Lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam kajian ini produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi menjadi produk pertanian lokal, produk peternakan lokal, produk perikanan lokal, dan produk kerajinan lokal.

4.2.1. Produksi Tanaman Palawija

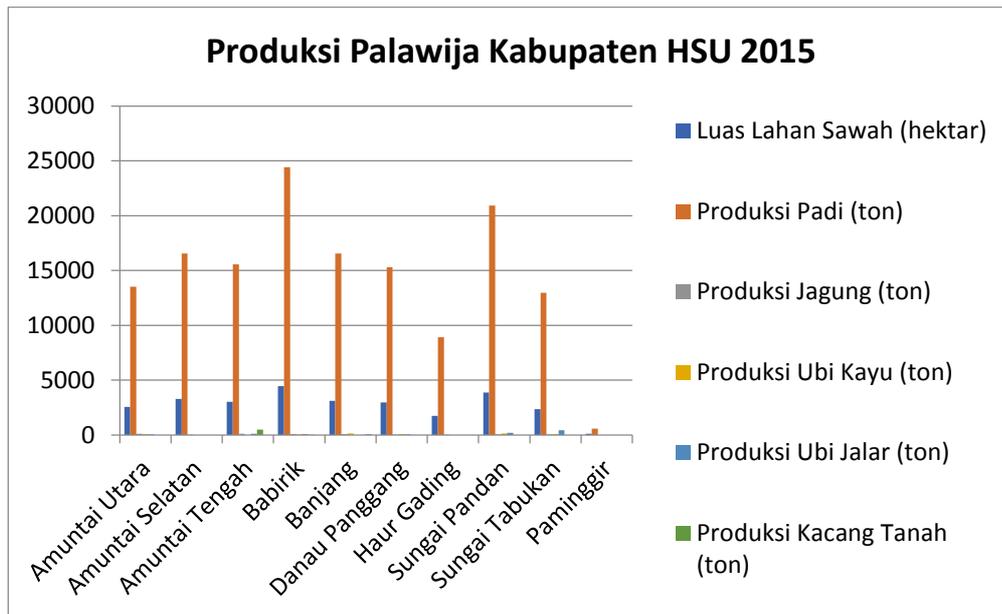
Kegiatan bercocok tanam merupakan salah satu sumber perekonomian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kegiatan bercocok tanam tanaman palawija. Palawija adalah tanaman kedua atau selingan ketika petani memproduksi satu jenis tanaman. Palawija juga bentuk upaya melakukan peningkatan produksi pangan dengan cara menciptakan diversifikasi atau keragaman. Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memproduksi beberapa jenis tanaman palawija, berikut ini disajikan tabel produksi palawija di kecamatan-kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015.

Tabel 4.1. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (hektar)	Produk si Padi (ton)	Produk si Jagung (ton)	Produksi Ubi Kayu (ton)	Produksi Ubi Jalar (ton)	Produksi Kacang Tanah (ton)	Produktivitas Kacang Hijau (ton)
1	Amuntai Utara	2564	13510	97	70	34	0	0
2	Amuntai Selatan	3293	16562	3	0	0	0	0
3	Amuntai Tengah	3032	15557	93	0	111	488	0
4	Babirik	4464	24426	79	56	89	12	0
5	Banjang	3123	16543	71	123	0	0	5
6	Danau Panggang	2955	15289	25	69	56	0	0
7	Haur Gading	1747	8901	16	0	0	0	0
8	Sungai Pandan	3864	20920	37	124	202	0	0
9	Sungai Tabukan	2341	12973	32	70	439	0	0
10	Paminggir	110	562	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Tabel 4.1. menunjukkan luas lahan sawah, jumlah produksi palawija, dan produktivitas kacang hijau di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015. Selanjutnya untuk jumlah produksi palawija di setiap kecamatan lebih jelasnya diilustrasikan pada Gambar 4.1. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa luas lahan sawah, jumlah produksi palawija dan produktivitas kacang hijau di setiap kecamatan berbeda-beda. Terjadi perbedaan jumlah yang cukup signifikan pada beberapa kecamatan, hal ini dapat disebabkan karena letak geografis, iklim dan cuaca, serta kualitas sumber daya manusia.



Gambar 4.1. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.1. dapat dilihat bahwa luas lahan sawah berbeda-beda di setiap kecamatan, yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Babirik dengan luas 4464 hektar. Luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 110 hektar. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi palawija, semakin luas lahan sawahnya produksinya juga semakin besar. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu yang memiliki lahan luas produksinya selalu besar. Pada produksi padi jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Babirik. Pada produksi jagung jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan produksi 93 ton sedangkan produksi Kecamatan Babirik sebesar 79 ton. Produksi ubi kayu terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan jumlah 124 ton. Produksi Ubi Jalar terbesar adalah Kecamatan Sungai Tabukan, dan produksi kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 488 ton. Untuk produktivitas kacang hijau hanya terdapat pada Kecamatan Banjarang dengan produktivitas 5 ton, sedangkan kecamatan lainnya tidak ada hasil.

Produksi palawija merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting, karena tanaman ini dapat menjaga kesuburan tanah dengan menstabilkan pH atau

keasaman tanah. Hal ini dilakukan supaya tanah dapat menghasilkan produk pangan yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Palawija juga dapat membantu mencukupi pangan masyarakat Indonesia. Apabila produksi pangan maksimal maka keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dicapai. Semakin besar jumlahnya maka sumbangan yang diberikan terhadap PDRB suatu daerah juga akan semakin besar. Jumlah produksi yang besar artinya akan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi ke arah yang lebih baik. PDRB sangat penting bagi suatu daerah karena mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jika sektor ekonominya selalu menunjukkan hasil yang baik, PDRB daerah tersebut tentu juga akan semakin baik.

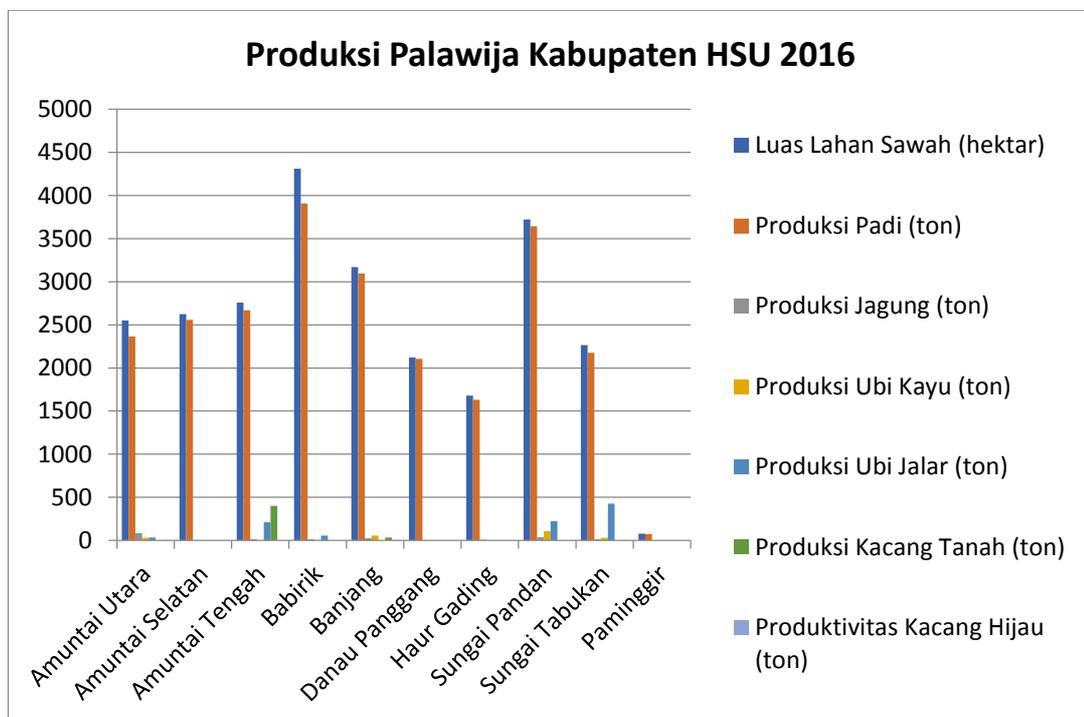
Pada tahun 2016 terjadi peningkatan ataupun penurunan pada beberapa produksi tanaman palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, secara umum terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada produk palawija yang ada pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016.

Tabel 4.2. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (hektar)	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Ubi Kayu (ton)	Produksi Ubi Jalar (ton)	Produksi Kacang Tanah (ton)	Produktivitas Kacang Hijau (ton)
1	Amuntai Utara	2551	2366	85	28	33	0	2
2	Amuntai Selatan	2625	2558	2	0	0	0	0
3	Amuntai Tengah	2759	2669	15	0	211	399	0
4	Babirik	4310	3907	15	0	56	0	0
5	Banjang	3168	3096	25	55	0	33	1
6	Danau Panggang	2121	2104	3	0	0	0	0
7	Haur Gading	1681	1631	7	0	0	0	0
8	Sungai Pandan	3723	3645	38	109	223	0	0
9	Sungai Tabukan	2266	2176	15	28	425	0	2
10	Paminggir	78	75	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Tabel 4.2. menunjukkan luas lahan sawah dan jumlah produksi palawija, di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2016. Selanjutnya untuk jumlah produksi palawija di setiap kecamatan lebih jelasnya diilustrasikan pada gambar 4.5. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa luas lahan sawah, jumlah produksi palawija dan produktivitas kacang hijau di setiap kecamatan berbeda-beda. Terjadi perbedaan jumlah yang cukup signifikan pada beberapa kecamatan, hal ini dapat disebabkan karena letak geografis, iklim dan cuaca, serta kualitas sumber daya manusia.



Gambar 4.2. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa luas lahan sawah berbeda-beda di setiap kecamatan, yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Babirik dengan luas 4.310 hektar. Luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 78 hektar. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi palawija, semakin luas lahan sawahnya produksinya juga semakin besar.

Tetapi pada kenyataannya tidak selalu yang memiliki lahan luas produksinya selalu besar. Pada produksi padi jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Babirik sebesar 3.907 ton. Pada produksi jagung jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Amuntai Utara dengan produksi 85 ton sedangkan produksi Kecamatan Babirik sebesar 15 ton. Produksi ubi kayu terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan jumlah 109 ton. Produksi Ubi Jalar terbesar adalah Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 425 ton, dan produksi kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 399 ton. Untuk produktivitas kacang hijau sudah terdapat pada beberapa kecamatan yaitu Amuntai Utara, Banjang dan Sungai Tabukan.

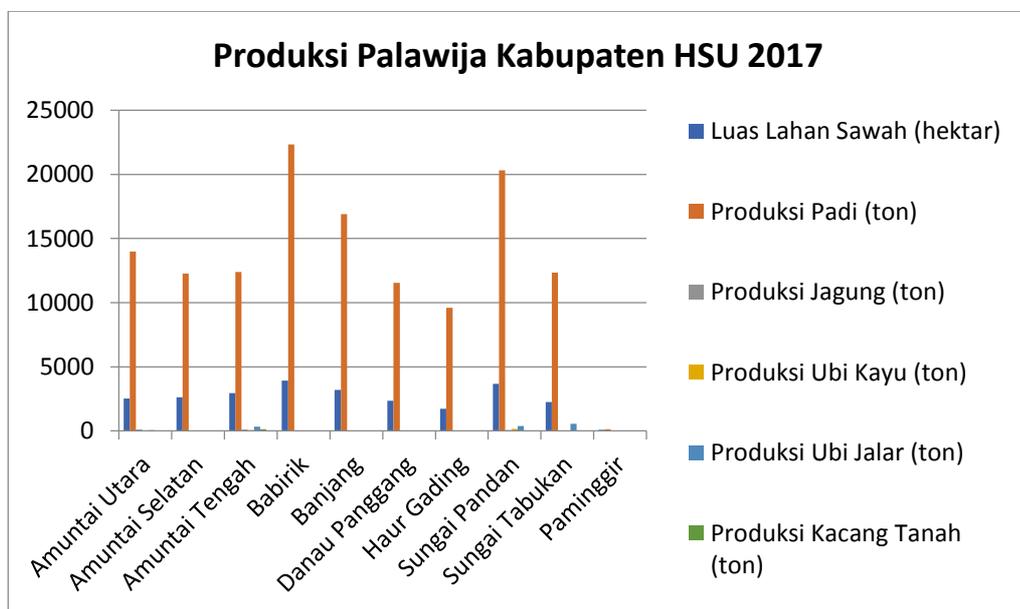
Produk palawija pada Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menonjol yaitu pertanian padi dan yang paling sedikit produksinya yaitu Kacang Hijau. Secara lebih jelas, produksi tanaman ini diperoleh angka sebagai berikut.

Tabel 4.3. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (hektar)	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Ubi Kayu (ton)	Produksi Ubi Jalar (ton)	Produksi Kacang Tanah (ton)	Produktivitas Kacang Hijau (ton)
1	Amuntai Utara	2524	13994	118	41	51	0	3
2	Amuntai Selatan	2628	12266	3	0	0	0	0
3	Amuntai Tengah	2953	12391	114	55	347	143	0
4	Babirik	3935	22333	0	0	0	0	0
5	Banjang	3203	16893	12	0	0	6	0
6	Danau Panggang	2362	11542	0	0	0	0	0
7	Haur Gading	1739	9591	7	0	0	0	0
8	Sungai Pandan	3670	20302	69	150	394	0	0
9	Sungai Tabukan	2252	12340	23	27	548	0	0
10	Paminggir	77	135	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Tabel 4.3 diketahui bahwa perolehan palawija terbanyak yaitu pada komoditi padi yang kemudian diikuti oleh komoditi ubi jalar dan produksi jagung. Meskipun produksi kacang tanah dan kacang hijau masuk dalam daftar palawijaya yang banyak ditanam oleh petani pada Kabupaten Hulu Sungai Utara namun kurang memberikan produktivitas yang signifikan. Terbukti hanya Kecamatan Amuntai Tengah yang menghasilkan kacang tanah dan Amuntau Utara yang menghasilkan kacang hijau.



Gambar 4.3. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.3. dapat dilihat bahwa luas lahan sawah berbeda-beda di setiap kecamatan, yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Babirik dengan luas 3.935 hektar. Luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 77 hektar. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi palawija, semakin luas lahan sawahnya produksinya juga semakin besar. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu yang memiliki lahan luas produksinya selalu besar. Pada produksi padi jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Babirik sebesar 22.333 ton. Pada produksi jagung jumlah produksi terbesar adalah

Kecamatan Amuntai Utara dengan produksi 118 ton sedangkan produksi Kecamatan Babirik sebesar 0 ton. Produksi ubi kayu terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan jumlah 150 ton. Produksi Ubi Jalar terbesar adalah Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 548 ton, dan produksi kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 143 ton. Untuk produktivitas kacang hijau hanya terdapat pada Kecamatan Amuntai Utara dengan produktivitas 3 ton.

Secara umum produksi palawija tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Komoditi paling tinggi produksinya adalah tanaman padi. Komoditi kedua adalah jagung dan ketiga adalah ubi jalar. Untuk kacang tanah dan kacang hijau produktivitasnya masih cukup rendah dan tidak semua kecamatan mampu memproduksinya.

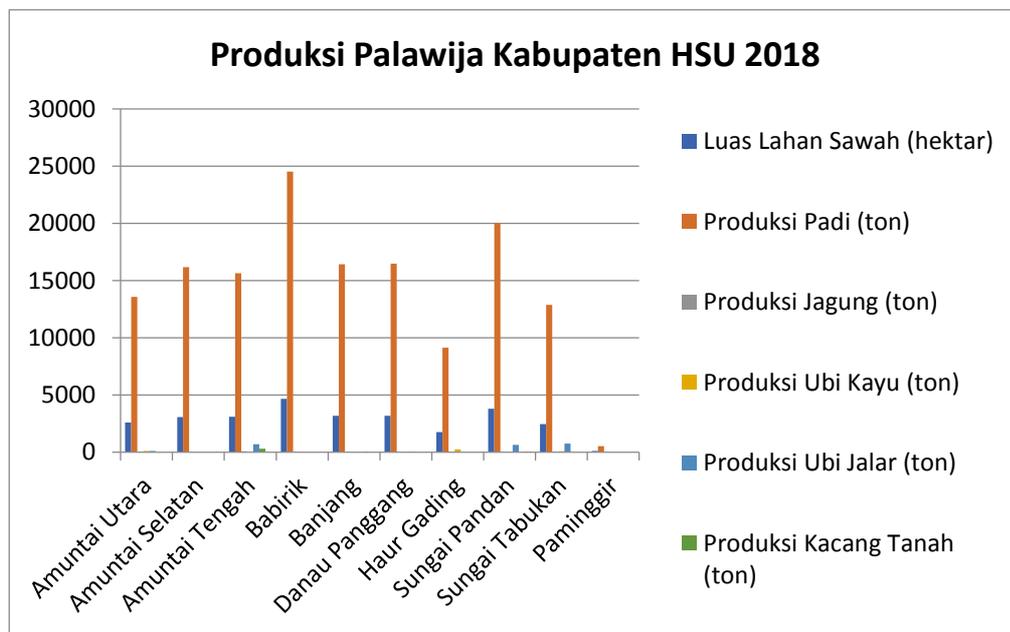
Tabel 4.4 Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (hektar)	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Ubi Kayu (ton)	Produksi Ubi Jalar (ton)	Produksi Kacang Tanah (ton)	Produktivitas Kacang Hijau (ton)
1	Amuntai Utara	2609	13586	69	111	102	0	0
2	Amuntai Selatan	3078	16190	0	0	0	0	0
3	Amuntai Tengah	3098	15645	74	0	711	306	0
4	Babirik	4675	24528	21	0	0	0	0
5	Banjang	3198	16417	36	0	0	47	0
6	Danau Panggang	3180	16473	1	0	34	0	0
7	Haur Gading	1771	9131	6	264	0	0	0
8	Sungai Pandan	3791	20043	32	0	654	0	1
9	Sungai Tabukan	2448	12882	10	75	742	0	0
10	Paminggir	106	533	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa hasil panen padi terbanyak berasal dari Kecamatan Sungai Pandan yaitu mencapai 20.043 dengan luas lahan yang

digunakan 3.791 ha. Selanjutnya untuk produksi tanaman jagung terbanyak yaitu pada Kecamatan Amuntai Tengah dengan produksi jagung. Untuk produksi ubi kayu paling banyak diproduksi oleh Kecamatan Haur Gading. Ubi jalar adalah komoditi yang cukup banyak diproduksi oleh beberapa kecamatan dan paling banyak adalah Kecamatan Sungai Tabukan, sedangkan kacang tanah dan kacang hijau produksi pada Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.



Gambar 4.4. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018
 Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.4. dapat dilihat bahwa luas lahan sawah berbeda-beda di setiap kecamatan, yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Babirik dengan luas 4675 hektar. Luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 106 hektar. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi palawija, semakin luas lahan sawahnya produksinya juga semakin besar. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu yang memiliki lahan luas produksinya selalu besar. Pada produksi padi jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Babirik sebesar 2.4528 ton. Pada produksi jagung jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan produksi 74 ton sedangkan produksi Kecamatan Babirik sebesar 21 ton. Produksi ubi kayu terbesar adalah Kecamatan

Haur Gading dengan jumlah 264 ton. Produksi Ubi Jalar terbesar adalah Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 742 ton, dan produksi kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 306 ton. Untuk produktivitas kacang hijau hanya terdapat pada Kecamatan Sungai Pandan dengan produktivitas 1 ton.

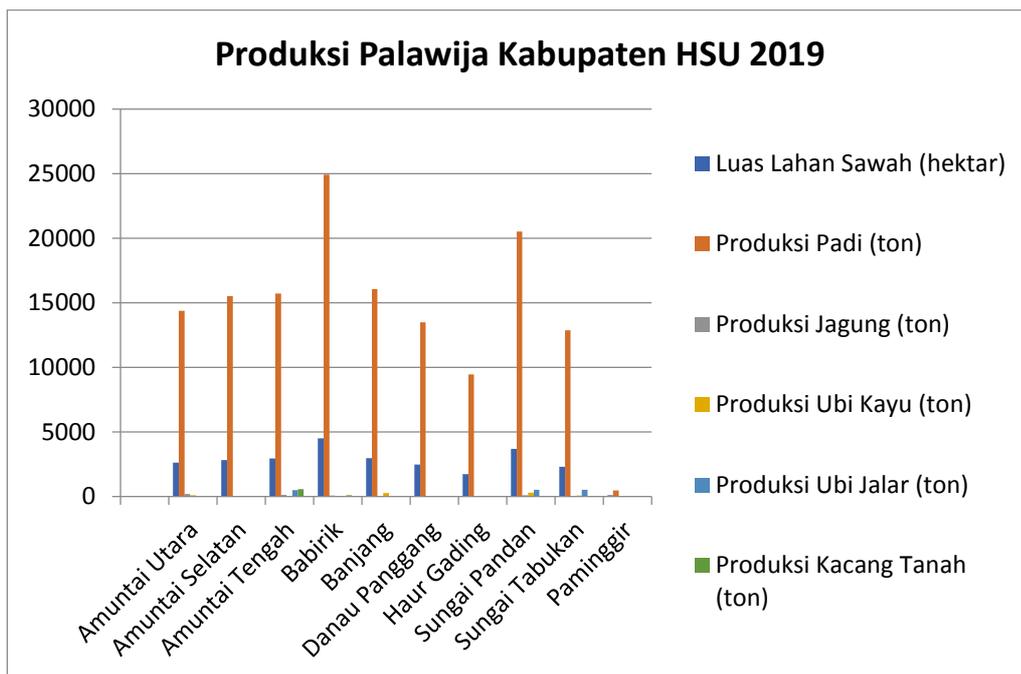
Produksi palawija pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode 2018. Peningkatan signifikan ini terjadi pada semua komoditas palawija yang ada di kabupaten tersebut.

Tabel 4.5. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (hektar)	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Ubi Kayu (ton)	Produksi Ubi Jalar (ton)	Produksi Kacang Tanah (ton)	Produktivitas Kacang Hijau (ton)
1	Amuntai Utara	2604.3	14391.23	184.4	78	49	0	2.8
2	Amuntai Selatan	2801.7	15509.89	0	0	0	0	0
3	Amuntai Tengah	2929.8	15719.54	115.65	0	496	565.49	0
4	Babirik	4496.5	24921.91	69.09	0	0	89.79	0
5	Banjang	2954.2	16060.28	49.51	260.93	0	0	0
6	Danau Panggang	2467.2	13483.45	9.2	0	0	0	0
7	Haur Gading	1718.1	9446.97	9.4	0	0	0	0
8	Sungai Pandan	3688.7	20524.27	89.34	281.65	502.68	0	0
9	Sungai Tabukan	2302	12880.54	36.51	75	509.27	0	0
10	Paminggir	86.1	464.94	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Tabel 4.5. ditunjukkan bahwa produksi padi terbanyak terdapat pada kecamatan Babirik, sedangkan produksi jagung terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu untuk produksi ubi kayu terbanyak adalah pada kecamatan Sungai Pandan, sedangkan produksi kacang tanah pada Amuntai Tengah dan kacang hijau terbanyak pada Amuntai Utara.



Gambar 4.5. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.5. dapat dilihat bahwa luas lahan sawah berbeda-beda di setiap kecamatan, yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Babirik dengan luas 4496,5 hektar. Luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 86,1 hektar. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi palawija, semakin luas lahan sawahnya produksinya juga semakin besar. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu yang memiliki lahan luas produksinya selalu besar. Pada produksi padi jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Babirik sebesar 24921,91 ton. Pada produksi jagung jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan produksi 115,65 ton sedangkan produksi Kecamatan Babirik sebesar 69,09 ton. Produksi ubi kayu terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan jumlah 281,65 ton. Produksi Ubi Jalar terbesar adalah Kecamatan Sungai Tabukan sebesar 509,27 ton, dan produksi kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 565,49 ton. Untuk produktivitas kacang hijau hanya terdapat pada Kecamatan Amuntai Utara dengan produktivitas 2,8 ton.

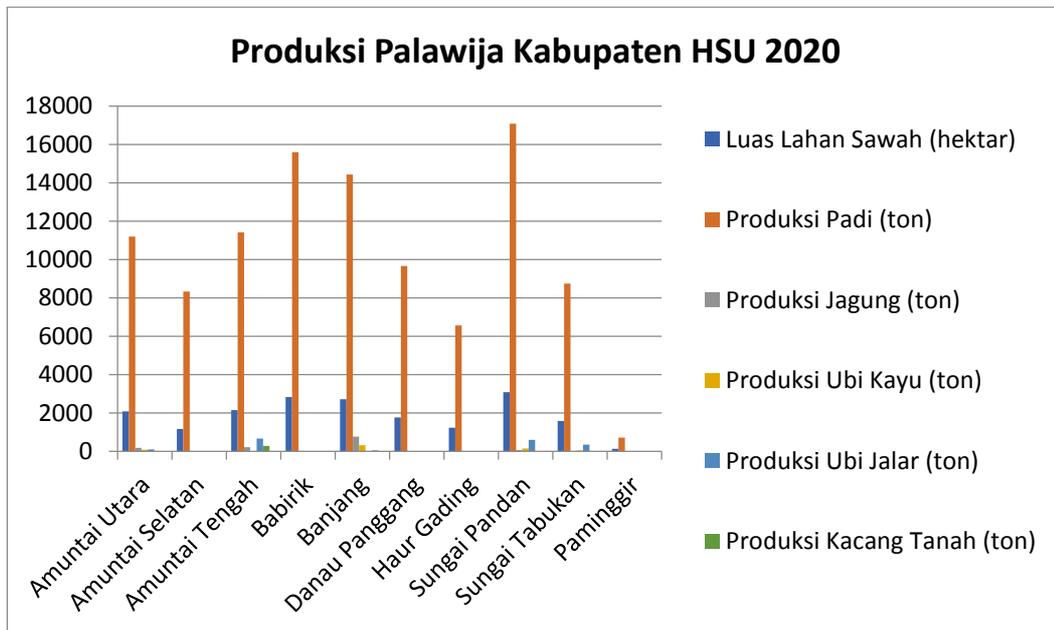
Palawija pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan daripada tahun 2019. Peningkatan ini diakibatkan karena adanya program pemerintah yang berhasil dalam pengembangan pertanian palawija pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 4.6. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (hektar)	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)	Produksi Ubi Kayu (ton)	Produksi Ubi Jalar (ton)	Produksi Kacang Tanah (ton)	Produktivitas Kacang Hijau (ton)
1	Amuntai Utara	2075.2	11202.6	175	72.5	100	0	2.2
2	Amuntai Selatan	1157.9	8327.7	0	0	0	0	0
3	Amuntai Tengah	2152.5	11420.7	213.2	0	660.5	281.47	0
4	Babirik	2832.1	15598.4	18.6	0	0	0	0
5	Banjang	2721.4	14424.1	764.7	312	0	46.92	0
6	Danau Panggang	1761.1	9670.7	4	0	0	0	0
7	Haur Gading	1223.3	6559.5	7.6	0	0	0	0
8	Sungai Pandan	3088.3	17089.6	58.3	152.75	590.88	0	0
9	Sungai Tabukan	1588	8743	8.9	40	348.23	0	1
10	Paminggir	132	712.8	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Sesuai dengan Tabel 4.6, produksi palawijaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 menunjukkan bahwa produksi padi terbanyak yaitu dari Kecamatan Sungai Pandan. Produksi jagung pada tahun 2018 terbanyak adalah Kecamatan Banjang. Sedangkan untuk produksi ubi jalar terbanyak adalah kecamatan Amuntai Tengah. Produksi kacang tanah terbanyak adalah Amuntai Tengah dan produktivitas kacang hijau terbanyak adalah Amuntai utara.



Gambar 4.6. Produksi Palawija di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020
 Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.6. dapat dilihat bahwa luas lahan sawah berbeda-beda di setiap kecamatan, yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan luas 3.088 hektar. Pada tahun 2015 hingga 2019 Kecamatan Babirik adalah kecamatan dengan luas lahan sawah paling luas. Pada tahun 2020 Kecamatan Sungai Pandan menempati posisi pertama luas lahan sawah paling luas. Luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Paminggir dengan luas 132 hektar. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi palawija, semakin luas lahan sawahnya produksinya juga semakin besar. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu yang memiliki lahan luas produksinya selalu besar. Pada produksi padi jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan sebesar 17.089,6 ton. Pada produksi jagung jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Banjang dengan produksi 764,7 ton. Produksi ubi kayu terbesar adalah Kecamatan Sungai Pandan dengan jumlah 152,75 ton. Produksi Ubi Jalar terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah sebesar 660,5 ton, dan produksi kacang tanah terbesar adalah Kecamatan Amuntai Tengah dengan jumlah 281,47 ton. Untuk produktivitas kacang hijau hanya terdapat pada Kecamatan Amuntai Utara dengan produktivitas 2,2 ton dan Kecamatan Sungai Tabukan 1 ton.

4.2.2. Produksi Tanaman Sayuran

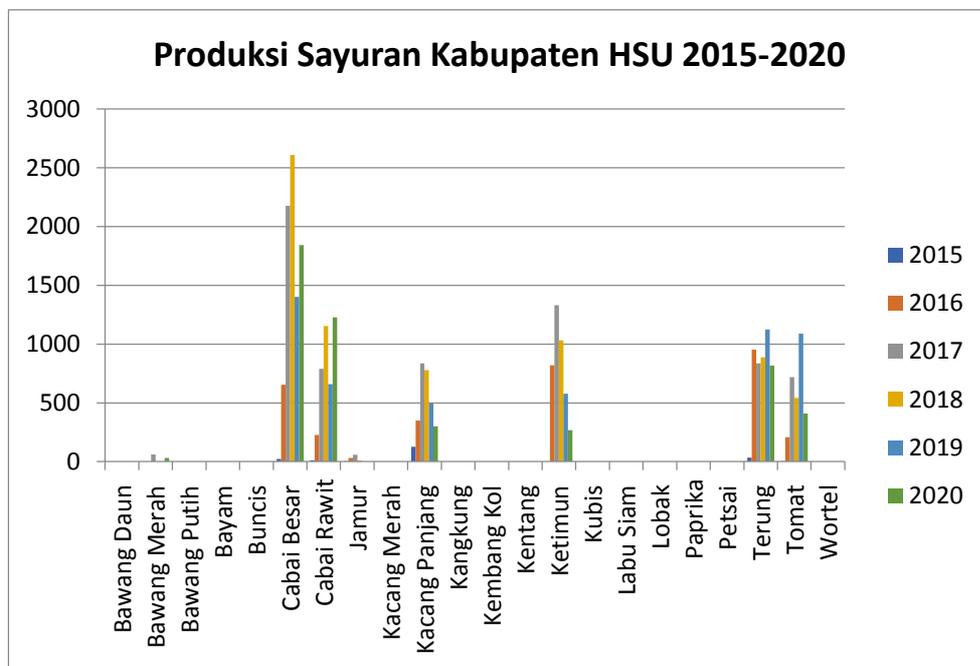
Sayuran merupakan komoditi yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan permintaan sayuran sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kesehatan. Iklim sub-tropis membuat berbagai macam jenis sayuran dapat dibudidayakan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sayuran terbesar di dunia. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan juga memiliki beraneka ragam jenis sayuran. Berikut ini merupakan tabel produksi sayuran tahun 2015 hingga tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 4.7 Produksi Sayuran (ton) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 – 2020

Jenis Sayuran	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bawang Daun	0	0	0	0	0	0
Bawang Merah	0	0	60	0	0	30
Bawang Putih	0	0	0	0	0	0
Bayam	0	0	0	0	0	0
Buncis	0	0	0	0	0	0
Cabai Besar	22	654	2178	2608	1403	1842
Cabai Rawit	12	226	790	1153	658	1228
Jamur	0.0018	31	58	10	0	0
Kacang Merah	0	0	0	0	0	0
Kacang Panjang	127.1	350	837	780	498	301
Kangkung	0	0	0	0	0	0
Kembang Kol	0	0	0	0	0	0
Kentang	0	0	0	0	0	0
Ketimun		819	1330	1032	578	268
Kubis	0	0	0	0	0	0
Labu Siam	0	0	0	0	0	0
Lobak	0	0	0	0	0	0
Paprika	0	0	0	0	0	0
Petsai	0	0	0	0	0	0
Terung	34	952	835	887	1124	818
Tomat	4	207	718	541	1089	409
Wortel	0	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Tabel 4.7. menunjukkan produksi sayuran di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Selanjutnya untuk produksi sayuran lebih jelasnya diilustrasikan pada Gambar 4.7. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa produksi sayuran mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020.



Gambar 4.7 Produksi Sayuran (ton) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.7. dapat dilihat bahwa hanya beberapa jenis sayuran yang berhasil diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis sayuran tersebut ialah cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, ketimun, terung, dan tomat. Sedangkan jenis sayur bawang daun, bawang putih, bayam, buncis, kacang merah, kangkung, kembang kol, kentang, kubis, labu siam, lobak, paprika, petsai dan wortel tidak diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat dua jenis sayuran yang diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara namun produksinya tidak optimal, dimana setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Bawang merah hanya

berhasil diproduksi pada tahun 2017 dan 2020, tetapi hasilnya hanya 60 ton pada tahun 2017 dan 30 ton pada tahun 2020 sedangkan tahun-tahun lainnya tidak ada hasil produksi. Begitu juga dengan jamur, pada tahun 2019 dan 2020 jamur sudah tidak diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara karena hasilnya yang kurang optimal. Jenis sayuran yang tidak diproduksi dan produksinya yang tidak optimal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satunya dikarenakan oleh cuaca yang kurang cocok untuk jenis sayuran tersebut.

Produksi sayuran merupakan salah satu sektor ekonomi, jumlah produksi sayuran dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semakin besar jumlahnya maka sumbangan yang diberikan terhadap PDRB suatu daerah juga akan semakin besar. Jumlah produksi yang besar artinya akan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi ke arah yang lebih baik. PDRB sangat penting bagi suatu daerah karena mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jika sektor ekonominya selalu menunjukkan hasil yang baik, PDRB daerah tersebut tentu juga akan baik.

4.2.3. Produksi Tanaman Buah

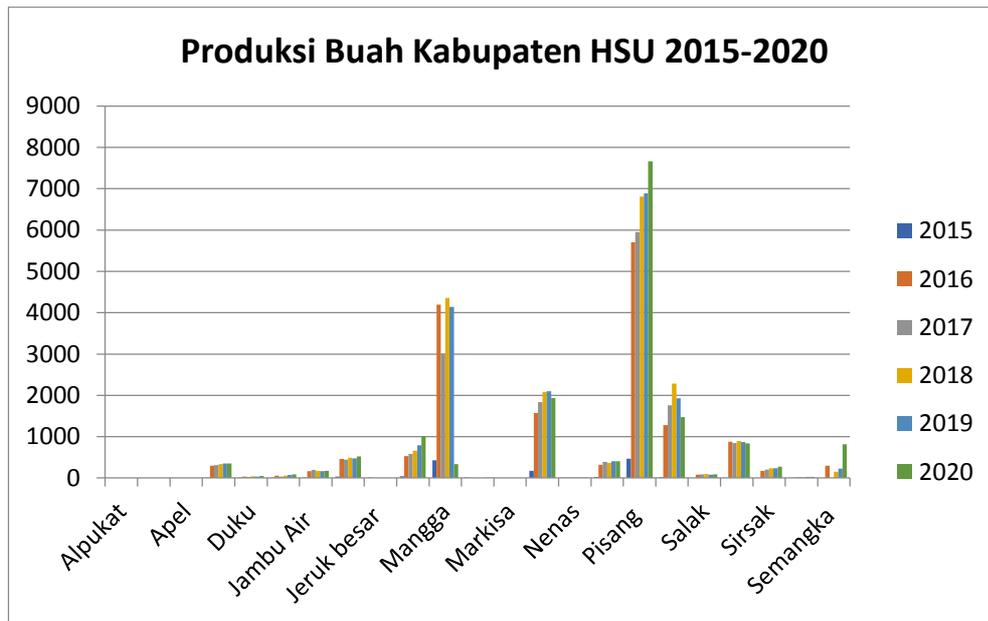
Tanaman buah-buahan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, tanaman buah-buahan semusim dan tanaman buah-buahan tahunan. Tanaman buah-buahan semusim merupakan buah yang berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Sedangkan tanaman buah-buahan tahunan merupakan tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun. Berikut ini merupakan tabel produksi buah-buahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

Tabel 4.8. Produksi Buah (ton) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2015- 2020

Nama Buah	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Alpukat	0	0	0	0	0	0
Anggur	0	0	0	0	0	0
Apel	0	0	0	0	0	0
Belimbing	2.7	300	309	334	354	352
Duku	5.6	34	24	44	37	50
Durian	7	55	36	55	73	92
Jambu Air	13.4	168	195	170	165	172
Jambu Biji	36.2	456	445	488	475	523
Jeruk besar	0.8	0	0	0	0	0
Jeruk Siam	39.7	529	582	659	794	1018
Mangga	429.2	4198	3011	4361	4140	333
Manggis	0.2	0	0	0	0	2
Markisa	0	0	0	0	0	0
Nangka	172.7	1572	1839	2086	2099	1940
Nenas	0.8	8	8	7	7	6
Pepaya	25	318	391	363	406	407
Pisang	471	5701	5949	6809	6887	7660
Rambutan	17.801	1278	1761	2283	1931	1473
Salak	0	80	86	97	84	89
Sawo	0	879	846	893	873	835
Sirsak	0	175	204	239	237	272
Sukun	0	11	17	16	25	28
Semangka	0	300		150	225	817

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Tabel 4.8 menunjukkan jumlah produksi buah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Selanjutnya untuk perkembangan jumlah produksi buah lebih jelasnya diilustrasikan pada gambar 4.3. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi buah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada beberapa jenis buah pada tahun 2020.



Gambar 4.8. Produksi Buah (ton) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa hanya beberapa jenis buah yang berhasil diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis buah tersebut ialah belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk siam, mangga, nangka, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun dan semangka. Sedangkan jenis buah alpukat, anggur, apel, dan markisa tidak diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat beberapa jenis buah yang diproduksi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara namun hasil produksinya tidak optimal, dimana setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Jeruk besar dan manggis hanya diproduksi pada tahun 2015 saja dan hasil produksinya kurang optimal yaitu jeruk besar 800 kg dan manggis 200 kg. Nanas terus diproduksi dari tahun 2015 hingga 2020, tetapi hasil yang didapatkan tidak seoptimal jenis buah lainnya. Pada tahun 2020 jenis buah yang mengalami penurunan yang sangat signifikan adalah mangga, produksi sebelumnya 4.140 ton dan turun menjadi 333 ton.

4.2.4. Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Kabupaten Hulu sungai utara masih memiliki luas perkebunan yang cukup mumpuni sehingga komoditi unggulan yang dihasilkan menjadi cukup tinggi.

Tabel 4.9. Produksi Perkebunan Kabupaten Sungai Hulu Utara Tahun 2015

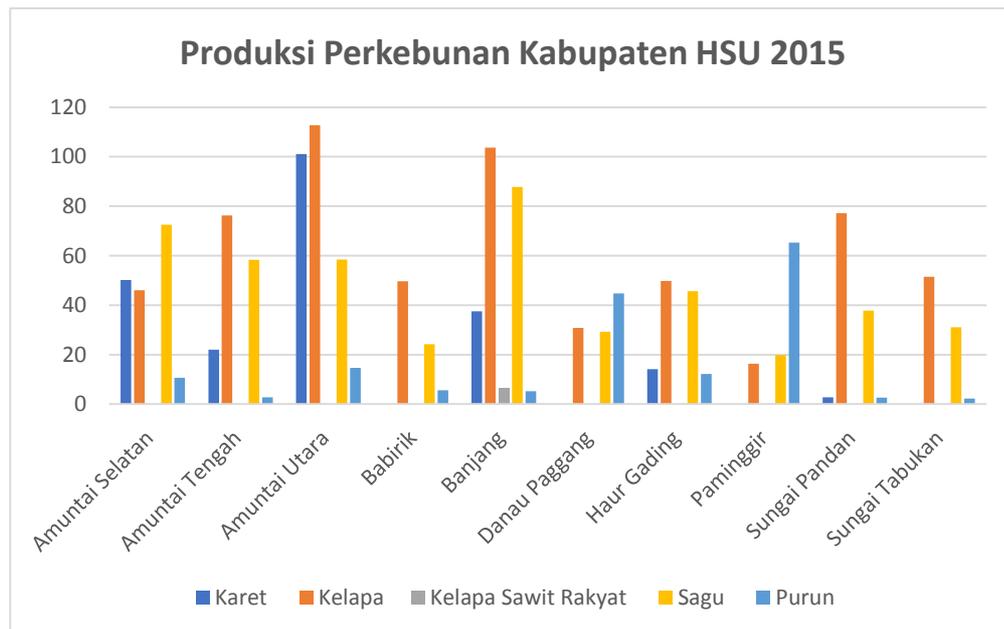
Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit Rakyat	Sagu	Purun
Amuntai Selatan	50.13	45.98	0	72.47	10.6
Amuntai Tengah	22	76.23	0	58.37	2.81
Amuntai Utara	101.09	112.67	0	58.49	14.67
Babirik	0	49.6	0	24.25	5.57
Banjang	37.52	103.6	6.59	87.8	5.24
Danau Paggang	0	30.79	0	29.27	44.73
Haur Gading	14.1	49.83	0	45.63	12.18
Paminggir	0	16.3	0	19.85	65.25
Sungai Pandan	2.77	77.15	0	37.81	2.64
Sungai Tabukan	0	51.5	0	31.04	2.3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Tabel 4.9 menunjukkan produksi perkebunan di setiap kecamatan yang ada Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015. Jenis-jenis tanaman hasil perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah karet, kelapa, kelapa sawit rakyat, sagu dan purun. Selanjutnya untuk jumlah produksi perkebunan diilustrasikan pada gambar 4.13. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produksi perkebunan setiap kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Terjadi perbedaan jumlah yang cukup signifikan pada beberapa kecamatan, hal ini dapat disebabkan karena letak geografis, iklim dan cuaca, serta kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2015, komoditi karet terbanyak diproduksi pada Kecamatan Amuntai Utara, sedangkan penghasil kelapa paling banyak berasal dari Kecamatan Amuntai Utara. Komoditi Kelapa Sawit Rakyat hanya diproduksi pada kecamatan Banjang. Komoditi sagu paling banyak diproduksi pada kecamatan Amuntai

Selatan dan tanaman purun paling banyak diproduksi pada Kecamatan Danau Panggang.



Gambar 4.9. Produksi Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.9. tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara beraneka ragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri terhadap jenis tanaman perkebunan. Produksi karet terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Utara, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi karet yaitu Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Amuntai Utara. Produksi kelapa sawit rakyat terbesar ada di Kecamatan Banjarang. Produksi sago terbesar ada di Kecamatan Amuntai Selatan. Dan produksi purun terbesar ada di Kecamatan Paminggir. Untuk produksi kelapa sawit rakyat pada tahun 2015 yang memproduksi hanyalah Kecamatan Banjarang, kecamatan yang lain tidak ada hasil produksi.

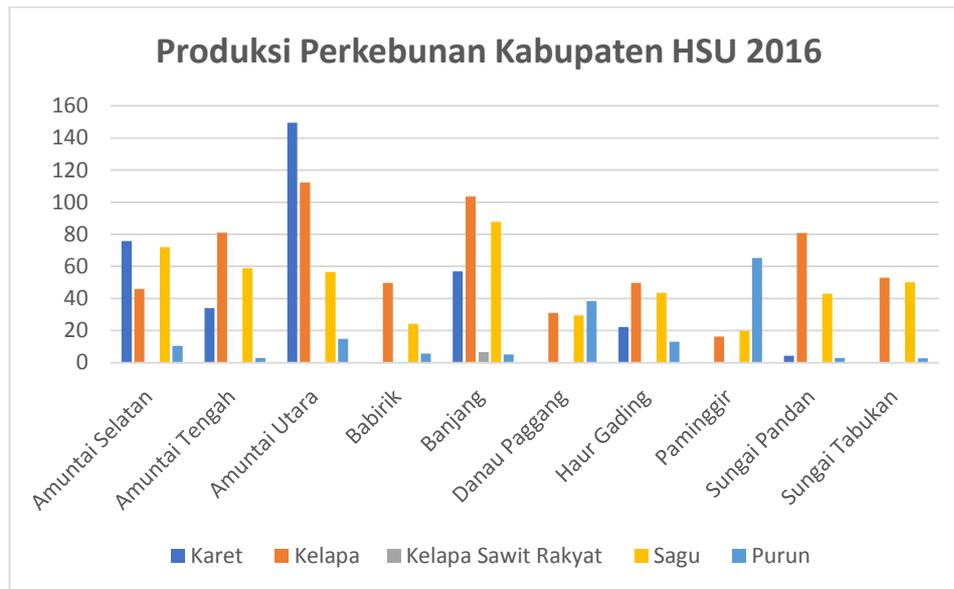
Pada tahun 2016, produksi tanaman perkebunan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada sebagian besar komoditi dan pada masing-masing kecamatan.

Tabel 4.10. Produksi Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit Rakyat	Sagu	Purun
Amuntai Selatan	75.86	45.98	0	71.96	10.6
Amuntai Tengah	33.94	81.07	0	58.84	2.98
Amuntai Utara	149.47	112.18	0	56.59	14.86
Babirik	0	49.71	0	24.32	5.8
Banjang	57	103.42	6.6	87.71	5.24
Danau Paggang	0	31.01	0	29.35	38.42
Haur Gading	22.3	49.83	0	43.54	13.06
Paminggir	0	16.32	0	19.87	65.27
Sungai Pandan	4.41	80.77	0	43.03	2.97
Sungai Tabukan	0	52.85	0	50.12	2.81

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Jumlah produksi tanaman perkebunan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Tanaman karet dan kelapa banyak diproduksi pada kecamatan Amuntai Utara. Sedangkan tanaman kelapa sawit rakyat banyak diproduksi pada Kecamatan Banjang. Komoditi sagu dan purun banyak diproduksi pada Kecamatan Amuntai Selatan dan dan Paminggir.



Gambar 4.10. Produksi Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara beraneka ragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri terhadap jenis tanaman perkebunan. Produksi karet terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Utara, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi karet yaitu Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Amuntai Utara. Produksi kelapa sawit rakyat terbesar ada di Kecamatan Banjang, produksi kelapa sawit rakyat hanya dilakukan di Kecamatan Banjang saja sedangkan kecamatan lain tidak ada hasil produksi kelapa sawit rakyat. Produksi sagu terbesar ada di Kecamatan Banjang dan produksi purun terbesar ada di Kecamatan Paminggir.

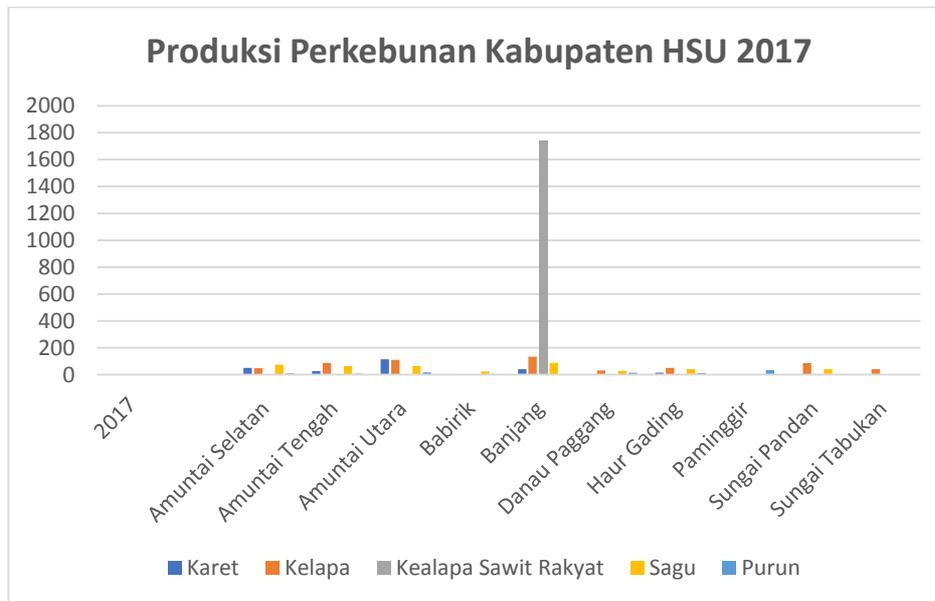
Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan pada komoditi kelapa sawit. Pada produksi ini mencapai 1741.2 ton. Selengkapnya, beberapa komoditi tetap mengalami peningkatan namun tidak signifikan kepala sawit rakyat.

Tabel 4.11. Produksi Perkebunan Kabupaten Sungai Hulu Utara Tahun 2017

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit Rakyat	Sagu	Purun
Amuntai Selatan	50.13	48.25	0	73.98	10
Amuntai Tengah	25.97	87.12	0	64.18	8.14
Amuntai Utara	115.63	109.2	0	64	17.25
Babirik	0.95	5.12	0	24.25	5.8
Banjang	40.68	135.12	1741.12	87.91	0.56
Danau Paggang	0	31.42	0	29.98	15.76
Haur Gading	15.76	49.96	0	41.69	12.76
Paminggir	0	0	0	0	33.25
Sungai Pandan	1.91	87.2	0	40.63	5.75
Sungai Tabukan	0	41.08	0	4.16	3.81

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Produksi karet terbanyak terdapat pada kecamatan Amuntai Utara dengan jumlah komoditi 115 ton, sedangkan komoditi kelapa terbanyak terdapat pada kecamatan Banjang dengan jumlah komoditi 135,12 ton. Selanjutnya untuk komoditi kelapa sawit diproduksi paling banyak di kecamatan banjang dengan jumlah 1.741,12 ton. Komoditi sagu dan purun, paling banyak diproduksi pada kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 73, 98 ton dan produksi purun paling banyak Sungai Pandan.



Gambar 4.11. Produksi Perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.11. tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara beraneka ragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri terhadap jenis tanaman perkebunan. Produksi karet terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Utara, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi karet yaitu, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Pada tahun ini Kecamatan Babirik sudah mulai memproduksi karet dengan hasil yang diperoleh sebesar 950 kg. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Banjang, terdapat kecamatan yang tidak ada hasil produksi kelapa yaitu Kecamatan Paminggir. Produksi kelapa sawit rakyat terbesar ada di Kecamatan Banjang, produksi kelapa sawit rakyat hanya dilakukan di Kecamatan Banjang saja sedangkan kecamatan lain tidak ada hasil produksi kelapa sawit rakyat. Produksi sago terbesar ada di Kecamatan Banjang. Dan produksi purun terbesar ada di Kecamatan Paminggir.

Produksi tanaman perkebunan pada periode 2018 menurut data yang dihimpun oleh penulis mengalami penurunan jumlah komoditi yang dipublikasi.

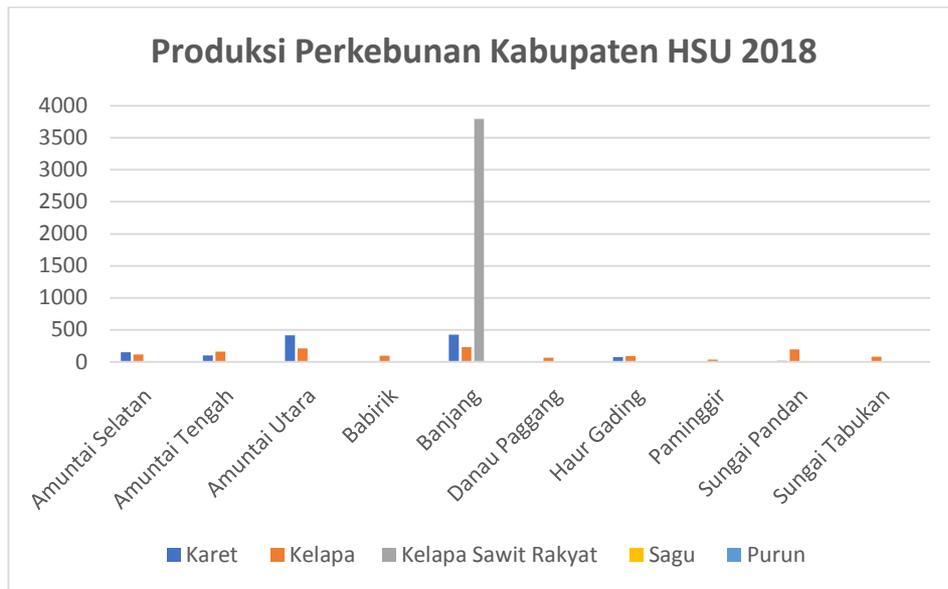
Namun untuk jumlah komoditi karet, kelapa dan kepala sawit rakyat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 4.12. Produksi Perkebunan Kabupaten Sungai Hulu Utara Tahun 2018

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit Rakyat	Sagu	Purun
Amuntai Selatan	149	115	2	0	0
Amuntai Tengah	99	160	0	0	0
Amuntai Utara	415	210	0	0	0
Babirik	1.75	96	0	0	0
Banjang	426	229	3796.42	0	0
Danau Paggang	0	64	0	0	0
Haur Gading	74.9	88.8	0	0	0
Paminggir	0	37.2	0	0	0
Sungai Pandan	14.27	194.5	0	0	0
Sungai Tabukan	0	78	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Komoditi karet dan Kelapa paling banyak pada kecamatan banjang sejumlah 426 ton dan 229 ton. Begitu pula dengan kelapa sawit rakyat yang produksinya mencapai 3.796,42 ton juga pada kecamatan Banjang.



Gambar 4.12. Produksi Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.12. tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara beraneka ragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri terhadap jenis tanaman perkebunan. Produksi karet terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Selatan, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi karet yaitu, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Amuntai Utara. Produksi kelapa sawit rakyat terbesar ada di Kecamatan Banjarang, produksi kelapa sawit rakyat hanya dilakukan di Kecamatan Banjarang dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan produksi 2 ton kelapa sawit rakyat, sedangkan kecamatan lain tidak ada hasil produksi. Produksi sagu dan purun pada tahun 2018 tidak ada hasil produksi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sungai Hulu Utara.

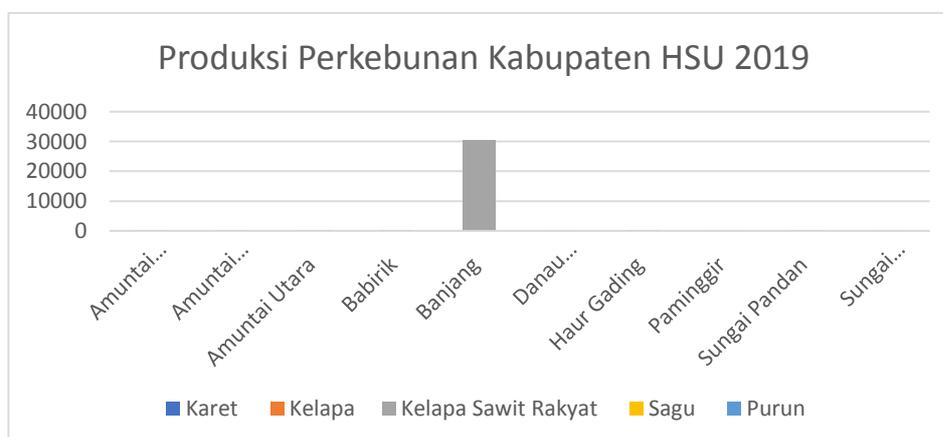
Produksi tanaman perkebunan pada periode 2019 menurut data yang dihimpun oleh penulis mengalami penurunan jumlah komoditi yang dipublikasi. Namun untuk jumlah komoditi karet, kelapa dan kepala sawit rakyat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 4.13. Produksi Perkebunan Kabupaten Sungai Hulu Utara Tahun 2019

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit Rakyat	Sagu	Purun
Amuntai Selatan	37.11	54.39	0	0	0
Amuntai Tengah	34.4	94.34	0	0	0
Amuntai Utara	147.89	93.49	0	0	0
Babirik	1.41	50.14	0	0	0
Banjang	140.6	102.64	30.179,62	0	0
Danau Paggang	0	30.43	0	0	0
Haur Gading	38.53	52.88	0	0	0
Paminggir		16.45	0	0	0
Sungai Pandan	5.4	100.77	0	0	0
Sungai Tabukan	0	44.21	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Tabel 4.13. menunjukkan produksi perkebunan di setiap kecamatan yang ada Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019. Untuk komoditi karet pada tahun 2019 terbanyak pada wilayah kecamatan Amuntai Utara. Produksi kelapa terbanyak pada Kecamatan Banjang dan kelapa sawit dengan total produksi 30.179,62 ton. Untuk produksi sagu dan purun tidak terdapat publikasi yang memaparkannya.



Gambar 4.13. Produksi Perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.13. tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara beraneka ragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri terhadap jenis tanaman perkebunan. Produksi karet terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Utara, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi karet yaitu, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Banjarang. Produksi kelapa sawit rakyat terbesar ada di Kecamatan Banjarang, produksi kelapa sawit rakyat hanya dilakukan di Kecamatan Banjarang saja sedangkan kecamatan lain tidak ada hasil produksi. Produksi sagu dan purun pada tahun 2019 tidak ada hasil produksi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sungai Hulu Utara.

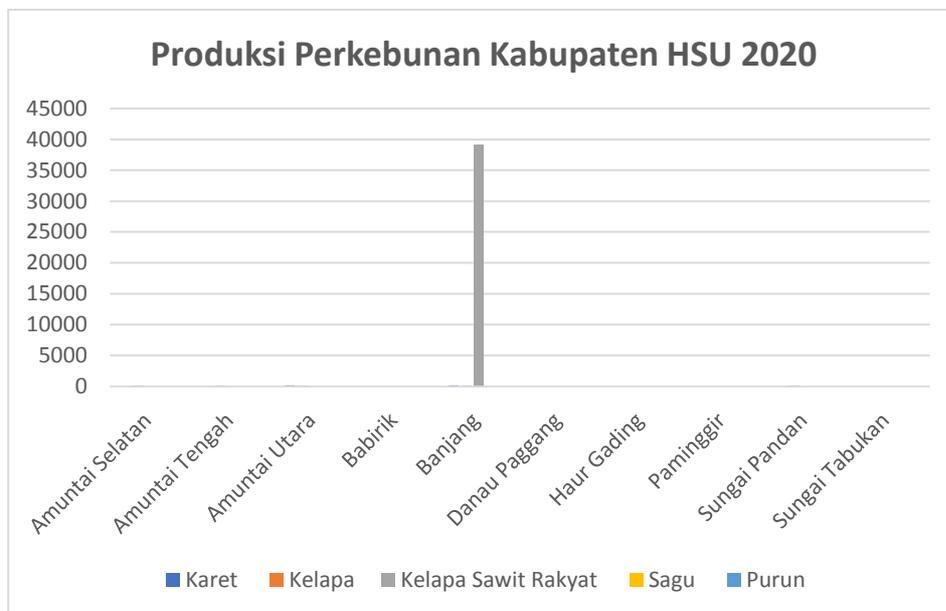
Pada tahun 2020 secara umum terjadi kenaikan yang signifikan pada komoditi karet, kelapa dan kelapa sawit. Produktivitas karet terbanyak pada kecamatan Amuntai Utara dan Banjarang yang masing-masing mencapai 145,29 ton dan 145,06 ton. Selanjutnya, untuk komoditi kelapa sawit rakyat produktivitas tertinggi pada kecamatan Banjarang dengan jumlah 39.223,7 ton.

Tabel 4.14. Produksi Perkebunan Kabupaten Sungai Hulu Utara Tahun 2020

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit Rakyat	Sagu	Purun
Amuntai Selatan	37.22	54.18	0	0	0
Amuntai Tengah	35.04	97.56	0	0	0
Amuntai Utara	145.29	93.37	0	0	0
Babirik	1.47	48.42	0	0	0
Banjarang	145.06	102.37	39.223.7	0	0
Danau Paggang	0	30.95	0	0	0
Haur Gading	40.23	50.46	0	0	0
Paminggir	0	16.95	0	0	0
Sungai Pandan	5.44	100.8	0	0	0
Sungai Tabukan	0	50.37	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

Pada Gambar 4.14. tersebut dapat dilihat bahwa produksi perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara beraneka ragam. Setiap kecamatan memiliki keunggulan sendiri-sendiri terhadap jenis tanaman perkebunan. Produksi karet terbanyak adalah Kecamatan Amuntai Utara, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memproduksi karet yaitu, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Tabukan. Produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Banjarang. Produksi kelapa sawit rakyat terbesar ada di Kecamatan Banjarang, produksi kelapa sawit rakyat hanya dilakukan di Kecamatan Banjarang saja sedangkan kecamatan lain tidak ada hasil produksi. Produksi sagu dan purun sama halnya dengan tahun 2018 dan 2019, tahun 2020 tidak ada hasil produksi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sungai Hulu Utara.



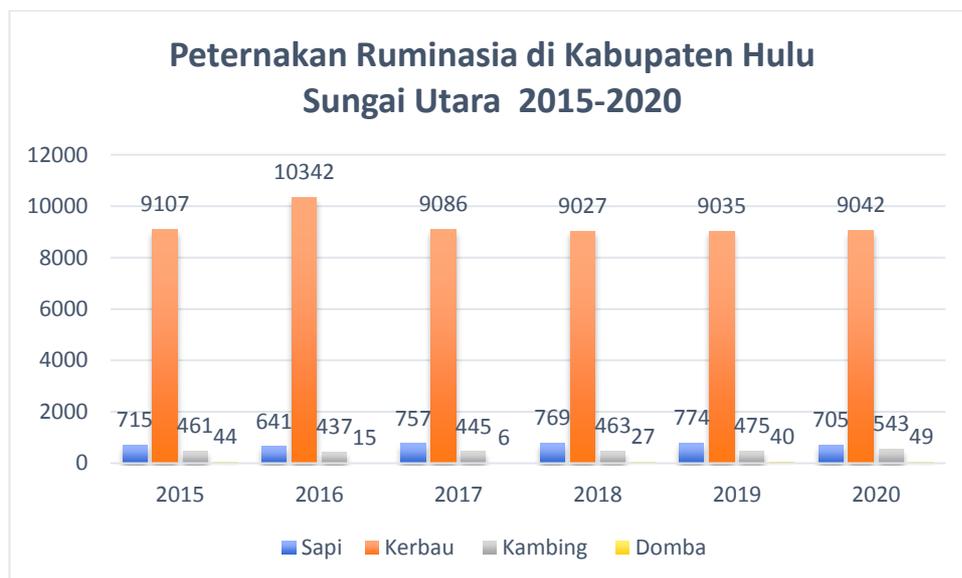
Gambar 4.14. Produksi Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah)

4.2.5. Produktivitas Peternakan

Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal dengan komoditi peternakannya antara lain sapi, kerbau, kambing dan domba. Jumlah hewan ternak yang paling banyak adalah kerbau dengan jumlah mencapai 9000 hingga 10.000 tiap tahunnya.

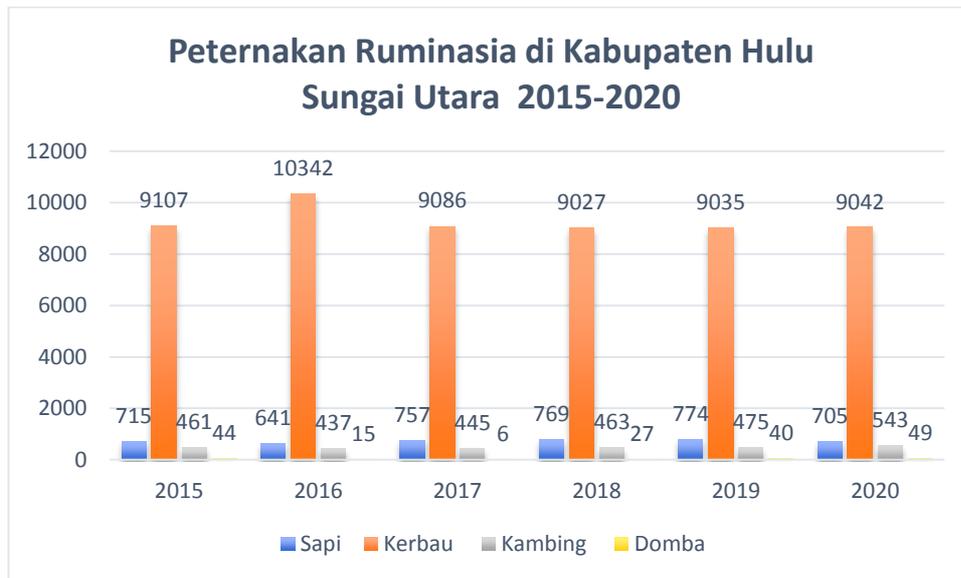
Sedangkan komoditi sapi mencapai 700 ekor tiap tahunnya. Komoditi kambing memiliki jumlah 400 hingga 500 ekor tiap tahunnya dan domba hanya mencapai 40 ekor tiap tahunnya.



Gambar 4.15. Peternakan Ruminansia Kabupaten HSU Tahun 2015 – 2020
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Banyaknya hasil komoditi ternak khususnya kerbau karena kerbau menjadi komoditi unggulan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis kerbau yang paling banyak adalah kerbau rawa. Kerbau rawa merupakan ternak asli daerah dan sumber plasma nutfah serta telah dikembangkan sebagai usaha tani spesifik lokasi pada agroekosistem lahan rawa. Ternak ini juga menjadi sumber pendapatan dan tabungan bagi keluarga peternak.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal dengan komoditi peternakannya antara lain sapi, kerbau, kambing dan domba. Jumlah hewan ternak yang paling banyak adalah kerbau dengan jumlah mencapai 9000 hingga 10.000 tiap tahunnya. Sedangkan komoditi sapi mencapai 700 ekor tiap tahunnya. Komoditi kambing memiliki jumlah 400 hingga 500 ekor tiap tahunnya dan domba hanya mencapai 40 ekor tiap tahunnya.

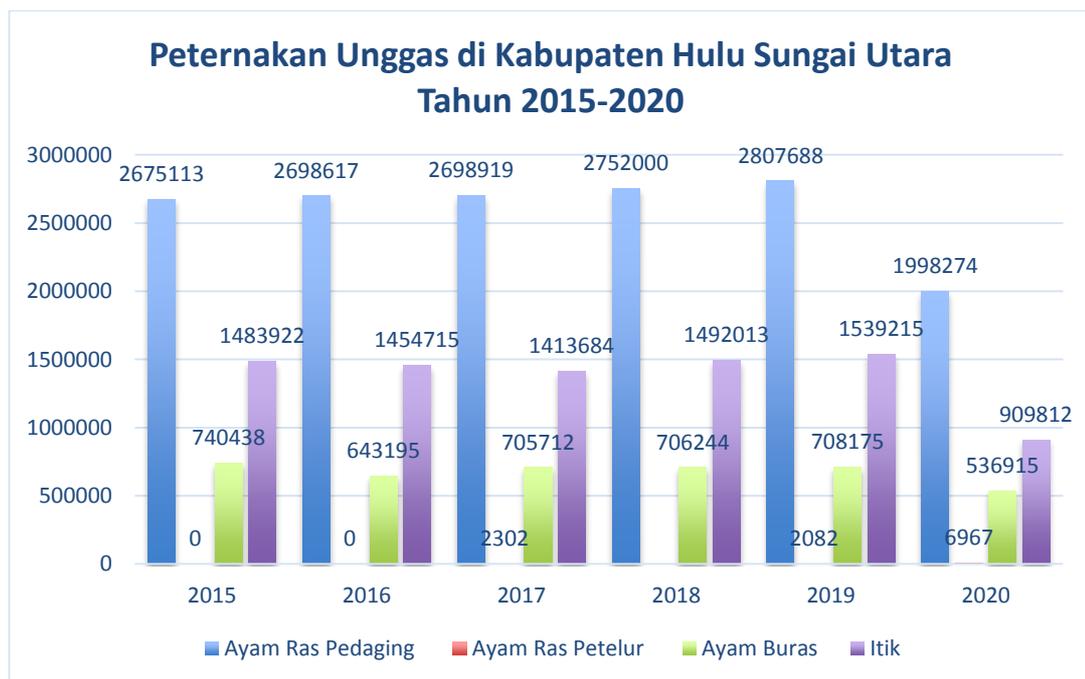


Gambar 4.16. Peternakan Ruminansia Kabupaten HSU Tahun 2015 – 2020
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Banyaknya hasil komoditi ternak khususnya kerbau karena kerbau menjadi komoditi unggulan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis kerbau yang paling banyak adalah kerbau rawa. Kerbau rawa merupakan ternak asli daerah dan sumber plasma nutfah serta telah dikembangkan sebagai usaha tani spesifik lokasi pada agroekosistem lahan rawa. Ternak ini juga menjadi sumber pendapatan dan tabungan bagi keluarga peternak.

Unggas adalah salah satu komoditi unggulan bidang peternakan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Komoditi yang paling banyak dihasilkan oleh wilayah ini adalah ayam ras pedaging yang memiliki jumlah output hingga mencapai 2.807.688 ekor pada tahun 2019. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada masa Covid-19 tahun 2020 dengan penurunan mencapai 1.998.274 ekor. Produksi kedua terbesar pada wilayah ini adalah itik. Jumlah produksi itik paling tinggi ada pada tahun 2019 mencapai 1.539.215. Rata-rata produktivitas itik pada wilayah ini memang cukup tinggi berkisar antara 1.400.000-1.500.000. Namun juga terjadi kemerosotan jumlah produksi pada tahun 2020 hingga mencapai 909.812 ekor. Posisi ketiga adalah produktivitas ayam buras. Produktivitasnya tertinggi mencapai 708.175 ekor pada tahun 2019, dan juga mengalami kemerosotan pada 2020 mencapai 536.915. Sedangkan komoditi ayam

ras petelur sangat sedikit produktivitasnya dibandingkan dengan yang lain hanya 2.302 ekor pada 2017, 2.082 ekor pada 2019, namun terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 6.967 ekor pada tahun 2020.



Gambar 4.17. Pternakan Hewan Unggas Kabupaten HSU 2015 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Tingginya hasil ayam pedaging didukung dengan jumlah konsumen yang mengkonsumsi ayam pedaging sebagai lauk pauk pendamping makanan pokok, sehingga jumlah produktivitasnya menduduki urutan nomor 1 pada produksi peternakan unggas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan posisi kedua diduduki oleh komoditi itik. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki komoditi unggulan itik alabio yang merupakan salah satu sumber plasma nutfah komoditi lokal yang memiliki keunggulan sebagai penghasil telur produktif. Itik alabio juga dikenal sebagai itik rawa yang mampu beradaptasi di wilayah rawa. Itik alabio merupakan itik lokal Kalimantan Selatan dan telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian No. 2921/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 (Fitriyanti,2018).

4.2.6. Perkembangan Jumlah Industri

Industri adalah sector perekonomian yang memiliki kontribusi pasti terhadap pendapatan daerah. Produktivitas industri dapat diukur melalui output produksi yang diperoleh dari kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi daripada hanya menjual barang mentahna saja.

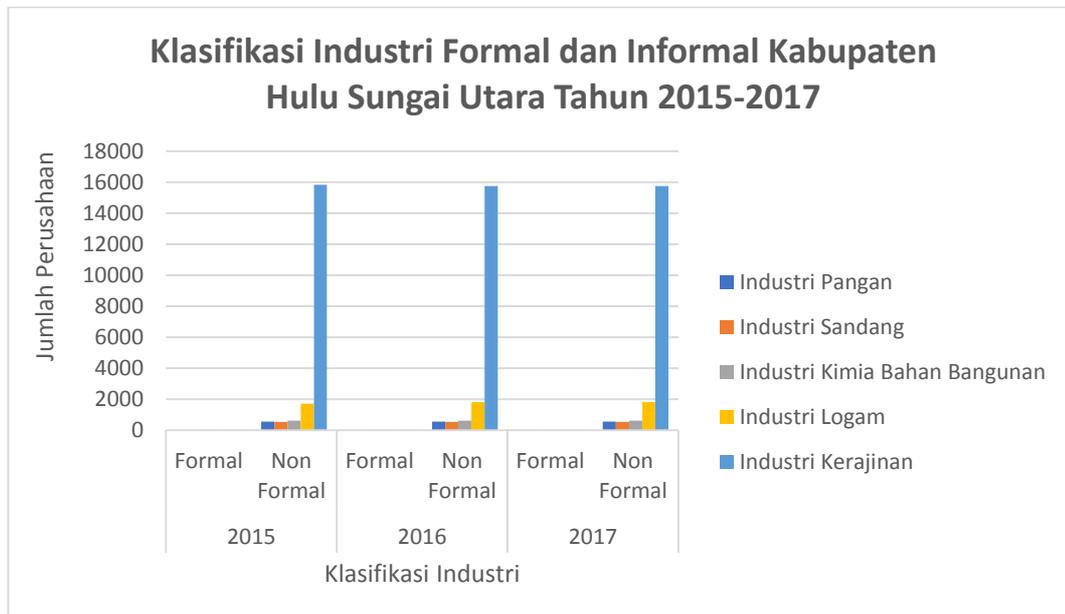
Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki berbagai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sesuai dengan Tabel 4.20 menunjukkan tentang jumlah industri formal dan informal pada klasifikasi industri terdapat 4 klasifikasi industri antara lain industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bangunan serta industri logam dengan jumlah keseluruhan hamper mencapai 19.000 pada masing-maisng tahun. Jumlah industri ini pula didominasi industri non formal yang sangat minim legalitas dan payung hukum dari sudut pandang administrasi. Industri juga merupakan suatu sector pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dengan cukup efektif karena sebagian besar indutri di kabupeten ini masih mengandalkan sistem padat karya dibandingkan sistem padat modal.

Tabel 4.18. Perkembangan Jumlah Industri Formal dan Non-Formal pada Klasifikasi Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2017

Klasifikasi Industri	2015		2016		2017	
	Formal	Non Formal	Formal	Non Formal	Formal	Non Formal
Industri Pangan	0	555	0	560	4	561
Industri Sandang	0	550	0	535	0	535
Industri Kimia Bahan Bangunan	2	616	2	631	6	631
Industri Logam	0	1722	0	1827	2	1827
Industri Kerajinan	4	15855	4	15752	9	15766
Jumlah	6	19298	6	19305	21	19320

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui sejak tahun 2015 hingga 2017, pada semua klasifikasi jenis industri sebagian besar masih menjadi industri non formal. Industri pangan ada tahun 2015 tidak ada industri yang telah bestatus formal namun

terdapat 555 unit industri non formal. Kenaikan jumlah industri tersebut terjadi pada tahun 2016 mencapai 560 unit. Pada tahun 2017 terjadi penambahan 4 unit industri pangan yang masuk pada jenis formal dan penambahan 1 unit pada industri pangan non formal. Hal yang mirip juga terjadi pada industri sandang dimana jumlahnya mencapai 550 pada 2015, 535 pada 2017 dan 535 pada 2017. Industri kimia bahan bangunan pada tahun 2015 memiliki 2 usaha pada industri formal dan 616 pada industri nonformal. Pada tahun 2016 memiliki jumlah industri formal 2 usaha dan 631 pada usaha non formal, serta pada tahun 2017 terjadi penambahan jumlah industri formal sebanyak 6 usaha dan 631 pada non formal. Industri logam tidak memiliki industri formal pada tahun 2016 dan 2017 dan memiliki 1.722 dan 1.827 pada masing-masing tahun. Namun terjadi peningkatan jumlah usaha formal di bidang industri logam pada tahun 2017 sebanyak 2 usaha yang berstatus formal serta 1.827 yang berstatus informal. Industri kerajinan merupakan industri yang memiliki jumlah paling besar dibandingkan dengan klasifikasi industri lainnya. Jumlahnya mencapai 80 persen lebih dibandingkan dengan jenis industri lain. Pada tahun 2015 hanya terdapat 4 industri kerajinan formal, padahal jumlah industri kerajinan non formal mencapai 15.855 usaha. Pada tahun 2016 jumlah usaha kerajinan formal tetap yaitu 4 usaha dan terjadi penurunan jumlah industri non formal mencapai 15.752. Peningkatan signifikan pada industri kerajinan formal terjadi pada tahun 2017 mencapai 9 usaha dan 15.566 usaha non formal pada tahun 2021. Namun sayangnya, publikasi tentang klasifikasi jenis industri dan jumlahnya pada jenis usaha formal dan non formal tidak mengalami keberlanjutan pada publikasi untuk tahun 2018 hingga 2020, sehingga pantauan terhadap fluktuasi jumlah industri tidak dapat diakses oleh masyarakat.



Gambar 4.18. Klasifikasi Industri Formal dan Informal Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2017

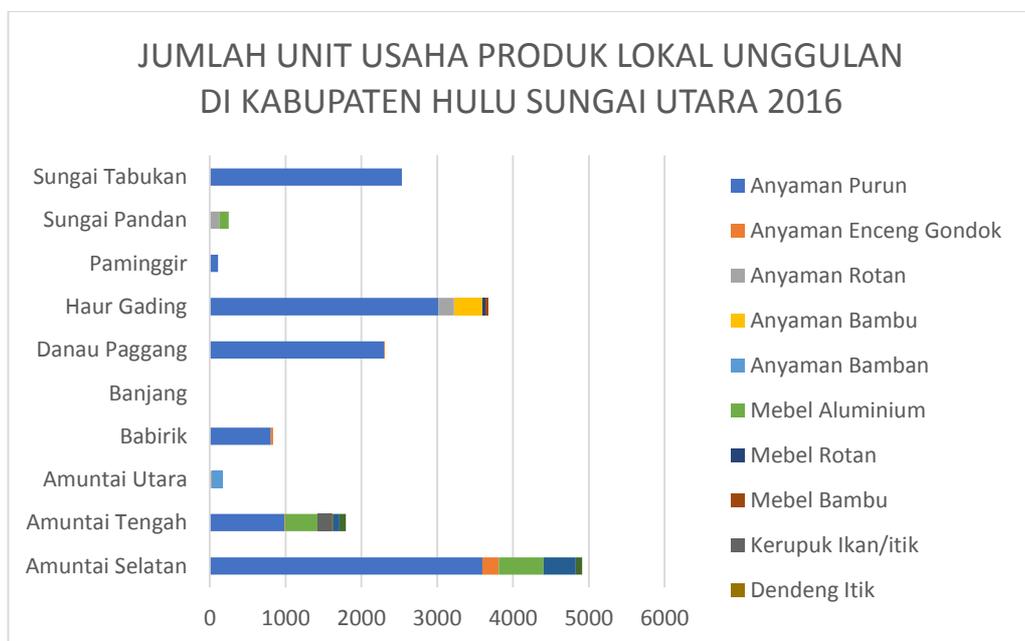
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.18 dapat dilihat bahwa dominasi industri kerajinan sangat tinggi dibandingkan dengan klasifikasi industri yang lain. Hal ini seharusnya menjadi indikasi positif bahwa industri kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2015-2017 berkembang sangat pesat. Disisi lain perkembangan industri logam juga berkembang cukup baik karena banyaknya tambang logam mulia di wilayah kabupaten tersebut. Selain itu industri pangan, sandang dan industri kimia bahan bangunan juga berkembang cukup baik. Namun yang menjadi ironi adalah masih sangat minimnya jumlah industri formal yang ada di daerah ini yang menunjukkan bahwa hampir semua industri di wilayah ini masih belum memiliki payung hukum yang jelas. Bantuan modal yang belum tercapai dengan baik serta terkonsentrasi pada padat karya menjadi eksistensi UMKM masih stagnan dan belum berkembang dengan baik.

4.2.7. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Produk Unggulan Kerajinan

Sesuai dengan SK Bupati No. 218 Tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana SK ini ditetapkan

karena tingginya jumlah produksi dan penyerapan tenaga kerja dibidang kerajinan tangan anyaman dan berbagai produk lainnya seperti anyaman purun, anyaman enceng gondok, anyaman rotan/lupu, anyaman bamboo, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bamboo, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu, lampit rotan. Jumlah unit usaha produk unggulan kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi sangat penting untuk diketahui guna menjadi informasi dan rencana selanjutnya terhadap keberadaan rumah usaha kerajinan.



Gambar 4.19. Jumlah Unit Usaha Produk Lokal Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2016

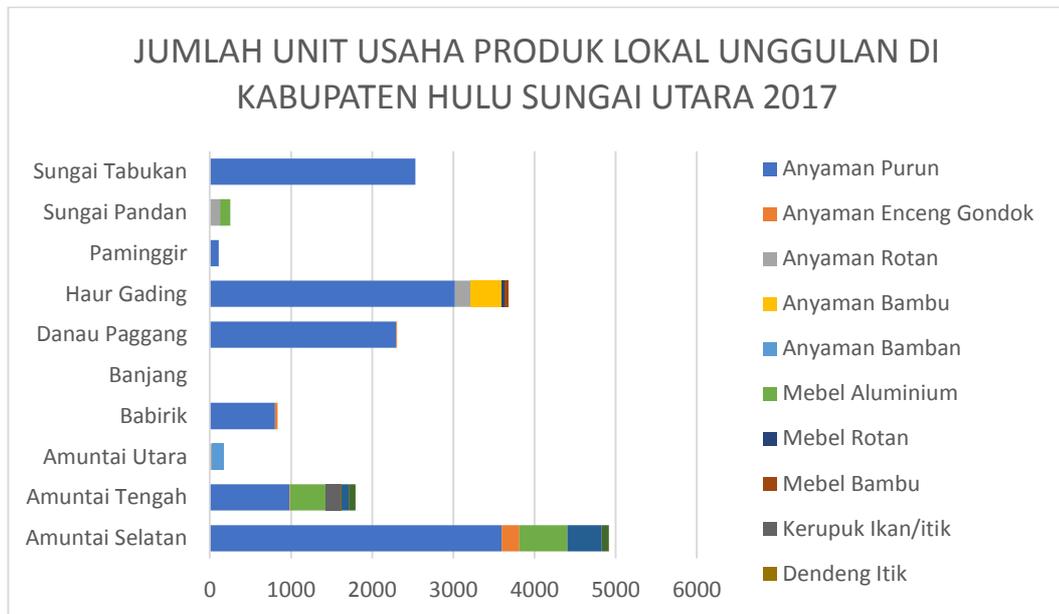
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.19 dapat diketahui bahwa pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2016 memiliki unit usaha kerajinan tangan yang sangat melimpah. Di Kecamatan Amuntai Selatan, terdapat 3.594 unit usaha anyaman purun, 216 unit usaha anyaman rotan, 592 unit usaha pengerajin mebel aluminium, dan sebanyak 425 pengerajin mebel kayu serta 85 unit usaha lampit kayu. Di Kecamatan Amuntai Tengah terdapat 981 unit usaha anyaman purun, 9 unit usaha anyaman enceng gondok, 439 unit usaha mebel aluminium, 179 unit usaha kerupuk ikan/itik, 10 usaha dendeng itik, 90 unit usaha

mebel kayu dan 86 unit usaha lampit kayu. Di Kecamatan Babirik, terdapat 803 unit usaha anyaman purun dan 31 unit usaha anyaman enceng gondok. Di Kecamatan Danau Panggang, terdapat 2.294 unit usaha anyaman purun dan 13 unit usaha anyaman enceng gondok. Di wilayah Kecamatan Haur Gading, terdapat 2.294 unit usaha anyaman purun, 201 unit usaha anyaman rotan, 381 unit anyaman bamboo, 31 unit usaha mebel rotan, dan 38 unit usaha mebel bamboo. Di Kecamatan Paminggir hanya terdapat 110 anyaman purun. Untuk Kecamatan Sungai Pandan terdapat 126 unit usaha anyaman rotan dan 124 unit usaha mebel aluminium dan Kecamatan Sungai Tabukan terdapat 2.533 unit usaha anyaman purun.

Secara keseluruhan, terdapat 16.575 unit usaha kerajinan lokal produk unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada tahun 2016. Produk yang paling banyak di produksi untuk masing-masing wilayah adalah anyaman purun. Wilayah yang paling banyak menghasilkan anyaman purun adalah Amuntai Selatan sebanyak 29,64 persen secara keseluruhan dari berbagai wilayah. Selain itu, jenis kerajinan anyaman purun menjadi produk unggulan yang paling banyak diproduksi sebanyak 80,44 persen dari keseluruhan unit usaha kerajinan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016.

Pada tahun setelahnya, di tahun 2017, jumlah unit usaha yang bergerak dibidang kerajinan tangan produk lokal unggulan mengalami peningkatan. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, hanya bertambah 13 unit usaha, dari 16.575 unit usaha di tahun 2016 dan 16.588 unit usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya unit usaha yang tutup atau gulung tikar, sehingga bidang usaha kerajinan lokal ini cukup kuat dalam menyumbangkan pendapatan untuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017.



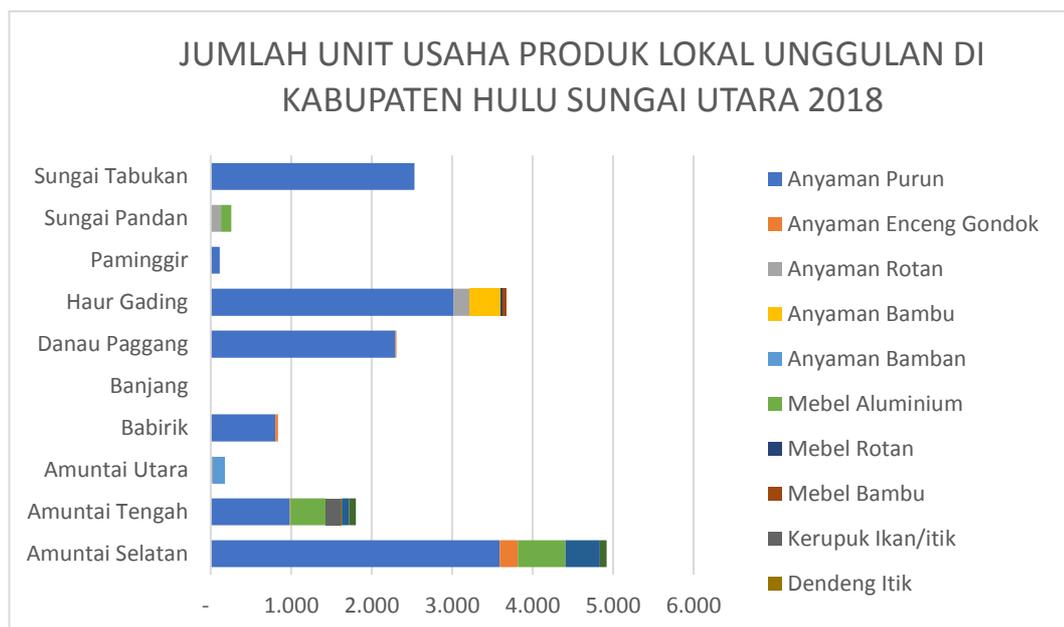
Gambar 4.20. Jumlah Unit Usaha Produk Lokal Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.20, pada tahun 2017 di Kecamatan Amuntai Selatan, terdapat 3.549 unit usaha anyaman purun, 219 unit usaha anyaman enceng gondok gondok, 592 unit usaha mebel aluminium, 425 unit usaha mebel kayu dan 85 unit usaha lampit kayu. Di Kecamatan Amuntai Tengah terdapat 982 unit usaha anyaman purun, 9 unit usaha enceng gondok gondok, 439 unit usaha mebel aluminium, 180 unit usaha kerupuk ikan/itik, 10 unit usaha dendeng itik, 90 unit usaha 90 unit mebel kayu dan 86 unit usaha lampit kayu. Di Amuntai Utara terdapat 28 unit usaha anyaman rotan dan 145 unit usaha di anyaman bamban. Di Kecamatan Babirik terdapat 803 anyaman purun dan 31 anyaman enceng gondok gondok. Di Danau Paggang terdapat 2.294 unit usaha anyaman purun dan 13 unit usaha anyaman gondok. Di Kecamatan Haur Gading, terdapat 3,019 unit usaha anyaman purun, 201 unit usaha anyaman rotan, 381 unit usaha ayaman bamboo, 31 unit usaha mebel rotan, dan 38 unit usaha mebel bamboo. Selebihnya, di Kecamatan Paminggir terdapat 110 unit usaha pengerajin anyaman purun, di Kecamatan Sungai Pandan terdapat 126 unit usaha anyaman rotan dan 124 unit usaha mebel aluminium, serta 2.533 unit usaha anyaman purun di Kecamatan Sungai Tabukan.

Di tahun 2017, perkembangan jumlah unit usaha kerajinan lokal unggulan masih di dominasi oleh kerajinan anyaman purun sebanyak 80,39 persen, dan wilayah yang paling banyak memproduksi adalah Kecamatan Amuntai Selatan dengan total sebanyak 29,63 persen. Selebihnya, beberapa wilayah yang menghasikan kerajinan tangan lokal yang cukup banyak adalah Kecamatan Haur Gading sebesar 22,12 persen, Kecamatan Sungai Tabukan sebanyak 15,27 persen, dan Kecamatan Danau Panggang sebesar 13,90 persen. Disisi lain, produk unggulan selain anyaman purun yang banyak diproduksi di wilayah Kabupaten HSU pada tahun 2017 adalah mebel aluminium sebanyak 6,96 persen dan mebel kayu sebanyak 3,1 persen.

Berkembang di tahun 2018, jumlah unit usaha kerajinan produk lokal unggulan bertambah 34 unit dari tahun sebelumnya menjadi 16.609 unit. Peningkatan positif terkait jumlah usaha produk kerajinan lokal unggulan terus terwujud. Animo masyarakat terkait dengan penumbuhan unit usaha kerajinan terus berkembang.



Gambar 4.21. Jumlah Unit Usaha Produk Lokal Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2018

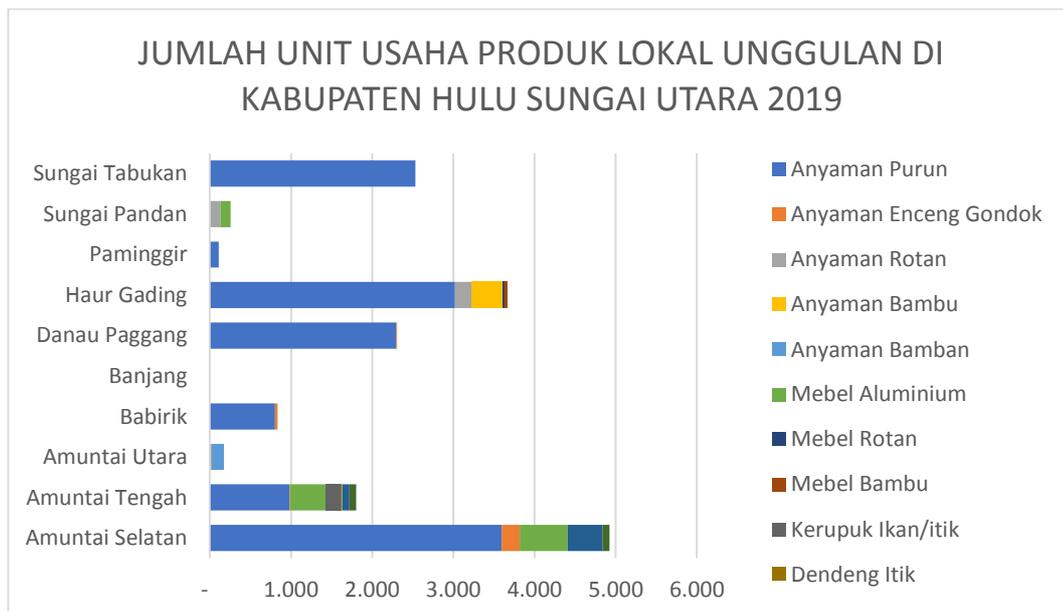
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Berdasarkan Grafik 4.21, pada tiap kecamatan di Kabupaten HSU tahun 2018 masih didominasi jumlah unit usaha anyaman purun. Selebihnya, beberapa usaha seperti mebel aluminium dan mebel kayu terus mengalami peningkatan jumlah unit usaha meskipun tidak setinggi usaha anyaman purun.

Jumlah unit usaha di Kecamatan Amuntai Selatan pada tahun 2018 terdapat 3.594 unit usaha anyaman purun, 222 unit usaha anyaman enceng gondok gondok, 592 unit usaha mebel aluminium, 430 unit usaha mebel kayu, dan usaha lampit kayu sebanyak 85 unit usaha. Di Kecamatan Amuntai Tengah terdapat 982 unit usaha anyaman purun, 9 unit usaha anyaman enceng gondok, 439 unit usaha mebel aluminium, 188 unit usaha kerupuk ikan/itik, jumlah unit usaha dendeng itik 10 unit, jumlah unit usaha 90 mebel usaha, dan 86 unit usaha lampit kayu. Di Kecamatan Amuntai Utara 28 anyamana rotan dan 145 unit usaha anyaman aluminium. Kecamatan Babirik terdapat 803 unit usaha anyaman purun dan 31 unit usaha anyaman enceng gondok. Di Kecamatan Danau Panggang terdapat 2.294 unit usaha anyaman purun dan 13 unit usaha anyaman enceng gondok. Kecamatan lain yang cukup banyak memproduksi anyaman purun adalah Kecamatan Haur Gading dengan jumlah 3.020 unit usaha, 201 unit usaha anyaman rotan, dan 381 unit usaha anyaman bamboo, 31 unit usaha mebel rotan, 38 unit usaha mebel bamboo. Di Kecamatan Paminggir terdapat 110 unit usaha anyaman purun. Untuk Kecamatan Sungai Pandan 128 unit usaha anyaman rotan dan 126 unit usaha mebel aluminium, sedangkan di Kecamatan Tabukan terdapat 2.533 unit usaha anyaman purun. Secara umum, terdapat 29,64 persen jumlah unit usaha di Amuntai Selatan, 22,10 persen unit usaha di Haur Gading, dan 15,25 persen unit usaha ada di Kecamatan Sungai Tabukan. Jenis kerajinan tangan yang diolah paling banyak adalah anyaman purun, sebanyak 80,29 persen dan 6,97 persen mebel aluminium.

Di tahun 2019, jumlah unit usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah unit usaha sejumlah 16.609 unit usaha. Jumlah ini sama dengan jumlah usaha tahun 2018. Jumlah usaha di tahun 2019 tidak mengalami penurunan yaitu sebanyak 16.609 unit usaha. Jumlah unit usaha anyaman purun di Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 3.594 unit usaha, 222 unit usaha anyaman enceng gondok, 592 unit usaha mebel aluminium, 430 unit usaha mebel usaha dan 85 unit usaha lampit kayu. Di

Kecamatan Amuntai Tengah, terdapat 982 unit usaha anyaman purun, 9 unit usaha anyaman enceng gondok, 439 unit usaha mebel aluminium, 188 unit usaha kerupuk ikan/itik, 10 unit usaha dendeng itik, 90 unit usaha mebel kayu dan 86 unit usaha lampit kayu. Di Kecamatan Amuntai Utara 28 unit usaha anyaman rotan, 145 unit usaha anyaman bamban. Kecamatan Babirik terdapat 803 unit usaha anyaman purun, 31 unit usaha anyaman enceng gondok. Di Kecamatan Danau Panggang terdapat 2.294 unit usaha anyaman purun, dan 13 unit usaha anyaman enceng gondok. Di Kecamatan Haur Gading 3.020 unit usaha anyaman purun, 201 unit usaha anyaman rotan, 381 unit usaha anyaman bamboo, 31 unit usaha mebel rotan dan 38 unit usaha mebel bamboo. Di Kecamatan Haur Gading terdapat 110 unit usaha anyaman purun. Di Kecamatan Paminggir terdapat 110 unit usaha anyaman purun. Di wilayah kecamatan Sungai Pandan, terdapat 128 unit usaha anyaman rotan dan 126 unit usaha mebel aluminium serta di Kecamatan Sungai Tabukan terdapat 2.533 unit usaha anyaman purun.



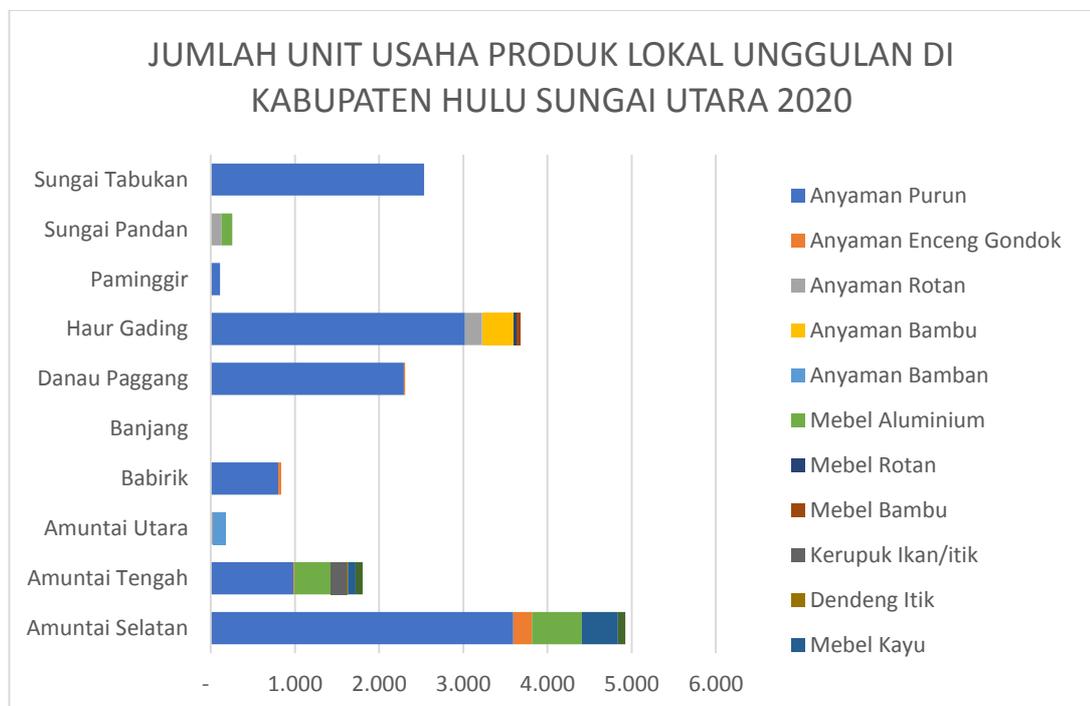
Gambar 4.22. Jumlah Unit Usaha Produk Lokal Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Secara keseluruhan, terdapat 29, 64 persen unit usaha di Amuntai Selatan, 22, 1 persen di Haur Gading dan 10,862 persen unit usaha berada di Kecamatan

Amuntai Tengah. Produksi Anyaman purun secara keseluruhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 80, 29 persen dan produksi mebel aluminium mencapai 6, 97 persen. Produk kerajinan lokal di Kabupaten tersebut masih di dominasi kerajinan anyaman purun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tidak berbeda jauh dengan tahun 2019, di tahun 2020 terdapat 16.609 unit usaha secara keseluruhan di Kabupaten Hulu Singai Utara dan masih didominasi dengan banyaknya unit usaha anyaman purun, kecamatan paling banyak terdapat unit usaha adalah di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan.



Gambar 4.23. Jumlah Unit Usaha Produk Lokal Unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4.23 tersebut bahwa secara umum jumlah unit usaha terbanyak terdapat di wilayah Amuntai Selatan sebanyak 29,64% persen dari jumlah keseluruhan unit usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah unit usaha tertinggi adalah ayaman purun mencapai 80, 29 persen di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dan disusul oleh 6,97 persen unit usaha mebel rotan dari jumlah keseluruhan produk lokal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

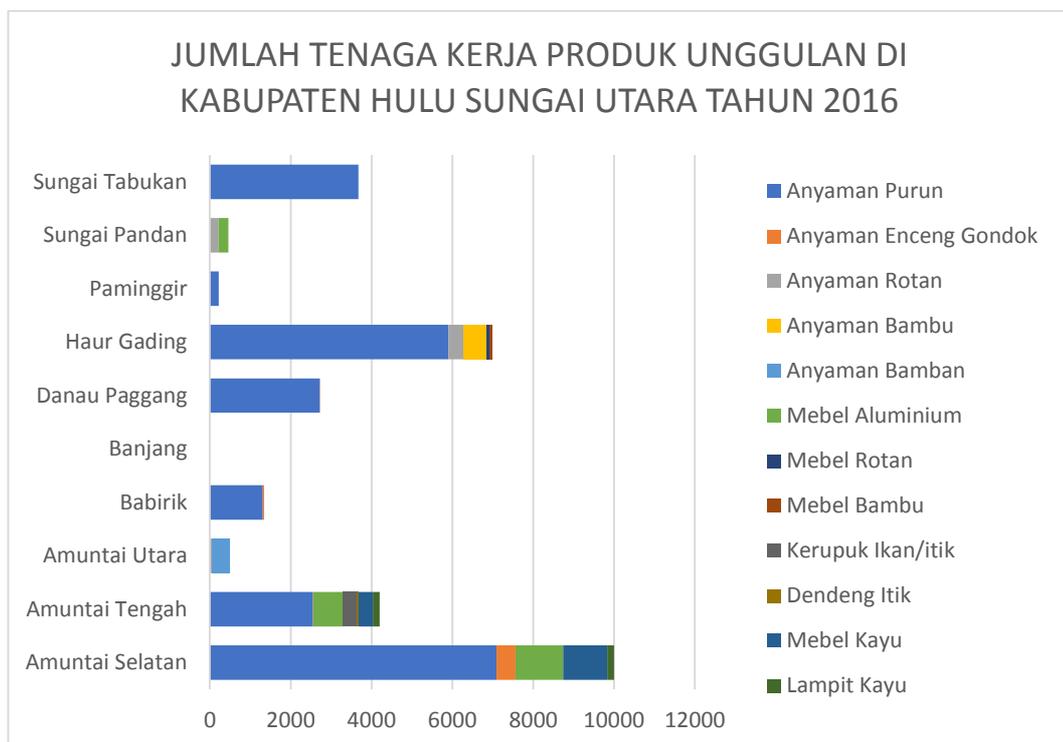
Berdasarkan pemaparan ini, maka secara umum, produk anyaman purun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sangat mendominasi jumlah produk kerajinan lokal yang melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun. Tidak pernah ada penurunan jumlah unit usaha selama rentang tahun tersebut dan bahkan mengalami peningkatan ataupun jumlah yang tetap. Produktivitas dan permintaan anyaman purun serta keberadaan jumlah sumberdaya purun yang melimpah mempuan unit usaha ini jumlahnya terus berkembang. Di sisi lain, terdapat beragam macam produksi kerajinan lokal yang variatif seperti anyaman enceng gondok, anyaman rotan, anyaman bamboo, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bambu, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu, dan ampit kayu. Wilayah yang paling banyak menghasilkan kerajinan produk lokal adalah Amuntai Selatan, Haur Gading, Sungai Tabukan, Danau Panggang, Babirik, Amuntai Utara, dan wilayah Sungai Pandan.

4.2.8. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Produk Unggulan Kerajinan

Banyaknya jumlah usaha kerajinan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2016 hingga tahun 2020 berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja lokal pada wilayah tersebut. Penyerapan tenaga kerja dapat menjadi indikator keberhasilan ekonomi masyarakat karena berdampak pada pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan SK Bupati No. 218 Tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana SK ini ditetapkan karena tingginya jumlah produksi dan penyerapan tenaga kerja dibidang kerajinan tangan anyaman dan berbagai produk lainnya seperti anyaman purun, anyaman enceng gondok, anyaman rotan/lupu, anyaman bamboo, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bambu, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu, lampit rotan. Penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh pengrajin yang telah turun menurun dan menjadi pekerja

keluarga dalam melanjutkan usaha keluarga. Kemampuan dalam melakukan kegiatan kerajinan telah ada sejak kecil sehingga menjadi kekuatan pasar tenaga kerja untuk menyerap pengrajin tanpa harus melakukan pelatihan. Penyerapan tenaga kerja di bidang ini sangat membantu pemerintah dalam alokasi tenaga kerja karena sudah memiliki *skill* yang spesifik terkait dengan keterampilan pengrajin.



Gambar 4.24. Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

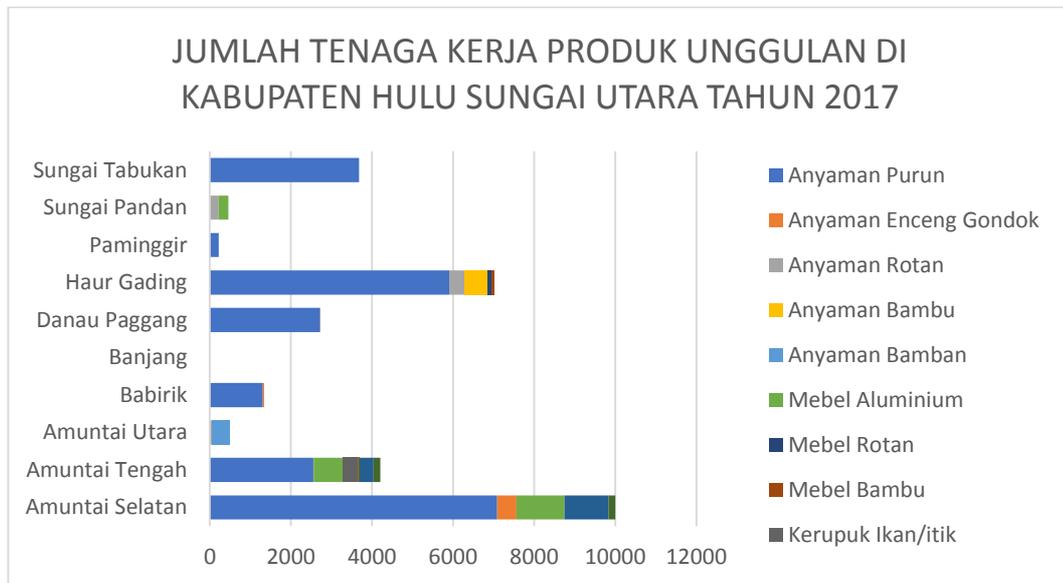
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Pada tahun 2016, total jumlah tenaga kerja pada bidang ini mencapai 30.121 orang pada seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2016. Penyerapan tenaga kerja paling banyak adalah pada bidang kerajinan anyaman purun yaitu mencapai 23.475 orang atau setara dengan 77,936%. Kerajinan anyaman enceng memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 525 orang atau 1,743%. Bidang kerajinan anyaman rotan, memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 640 orang atau setara dengan 2,12%. Pada kerajinan anyaman bambu, penyerapan tenaga kerja mencapai 566 orang atau setara dengan 1,87%. Untuk anyaman bamban

penyerapan tenaga kerja sebanyak 441 orang atau setara dengan 1,46%. Jumlah tenaga kerja kerajinan mebel aluminium mencapai 2.156 orang atau setara dengan 7,15%. Beberapa bidang kerajinan yang lain dan jumlah tenaganya adalah mebel rotan sejumlah 91 orang tenaga kerja atau 0,3%, jumlah tenaga kerja pada mebel bambu sebanyak 57 orang atau 0,18 persen, jumlah tenaga kerja kerajinan kerupuk ikan/itik mencapai 260 orang atau 1,19%, jumlah tenaga kerja dendeng itik sebanyak 30 orang atau sebanyak 0,099%, jumlah tenaga kerja mebel kayu sebanyak 1.447 orang atau setara dengan 1,10% dari jumlah tenaga kerja keseluruhan.

Berdasarkan sebaran jumlah tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja terbanyak berada di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 9.998 orang atau setara 33,193%. Penyerapan tenaga kerja terbanyak selanjutnya adalah di wilayah Haur Gading mencapai 6.993 orang atau setara dengan 23,216%. Penyerapan tenaga kerja di Sungai Tabukan yaitu sebanyak 3.679 orang atau setara dengan 12,21%. Jumlah unit usaha pada masing-masing wilayah akan mempengaruhi seberapa banyak tenaga kerja yang terserap pada wilayah tersebut. Semakin banyak jumlah unit usaha dan produktivitas kerajinan tangan yang diproduksi maka semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap.

Penyerapan tenaga kerja di tahun 2017 relatif tetap dibandingkan dengan tahun 2016, namun cenderung memiliki kenaikan meskipun tidak signifikan. Pada tahun ini, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 30.136 orang dengan komposisi tidak jauh berbeda dengan tahun 2016 dimana penyerapan tenaga kerja pada kerajinan tangan anyaman purun masih mendominasi mencapai 23.477 orang atau setara dengan 77,90% dari jumlah penyerapan tenaga kerja keseluruhan. Kerajinan lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah mebel aluminium yaitu sebanyak 2.158 atau setara dengan 7,160% dan kerajinan mebel kayu yang menyerap 1.445 tenaga kerja atau setara dengan 4,79% dari jumlah keseluruhan. Selebihnya, kerajinan tangan masih cukup rendah penyerapannya hanya berkisar antara 1-2 persen dari jumlah keseluruhan.

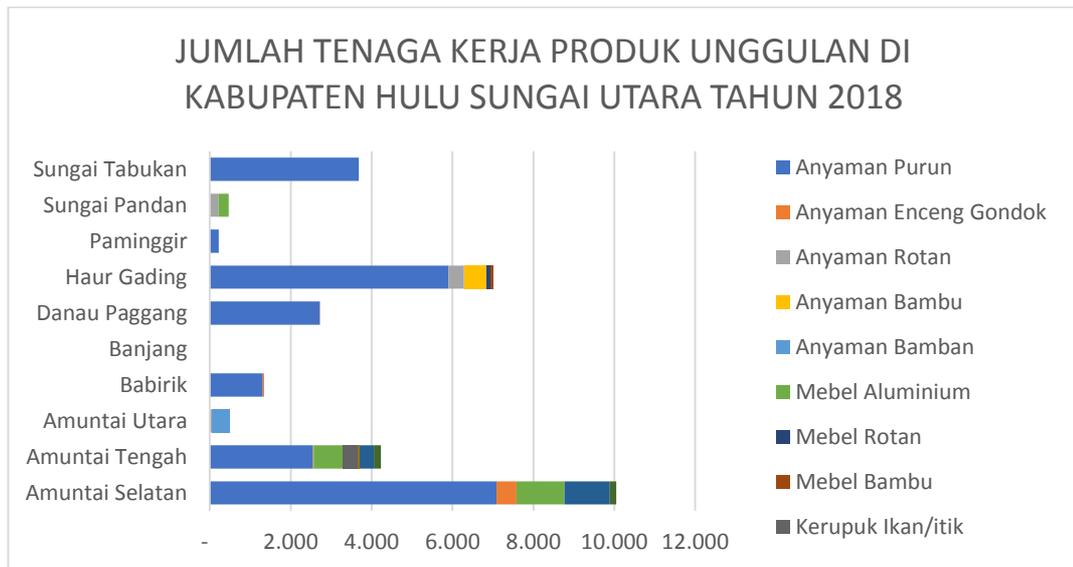


Gambar 4.25. Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Selain itu, daerah yang memiliki penyerapatan tenaga kerja paling banyak adalah Amuntai Selatan dengan jumlah penyerapatan tenaga kerja mencapai 9999 orang atau setara dengan 33,18% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya, penyerapan kedua terbanyak adalah di wilayah Haur Gading dengan jumlah penyerapan 6.998 orang tenaga kerja atau setara 23,22% dari jumlah tenaga kerja keseluruhan. Penyerapatan tenaga kerja terbanyak lainnya terdapat di wilayah Sungai Tabukan yang menyerap tenaga kerja hingga 3.679 orang atau setara dengan 12,208% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja di sector kerajinan lokal pada tahun 2018 masih stabil dari tahun sebelumnya dan tidak mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, namun terdapat penambahan tenaga kerja mencapai 30.217 orang. Penyerapatan tenaga kerja paling banyak masih didominasi dari kerajinan tangan anyaman purun dengan total 23,478 orang atau setara dengan 77,70% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja. Kerajinan mebel aluminium mampu menyerap tenaga kerja mencapai 2.162 orang atau setara dengan 7,15%.



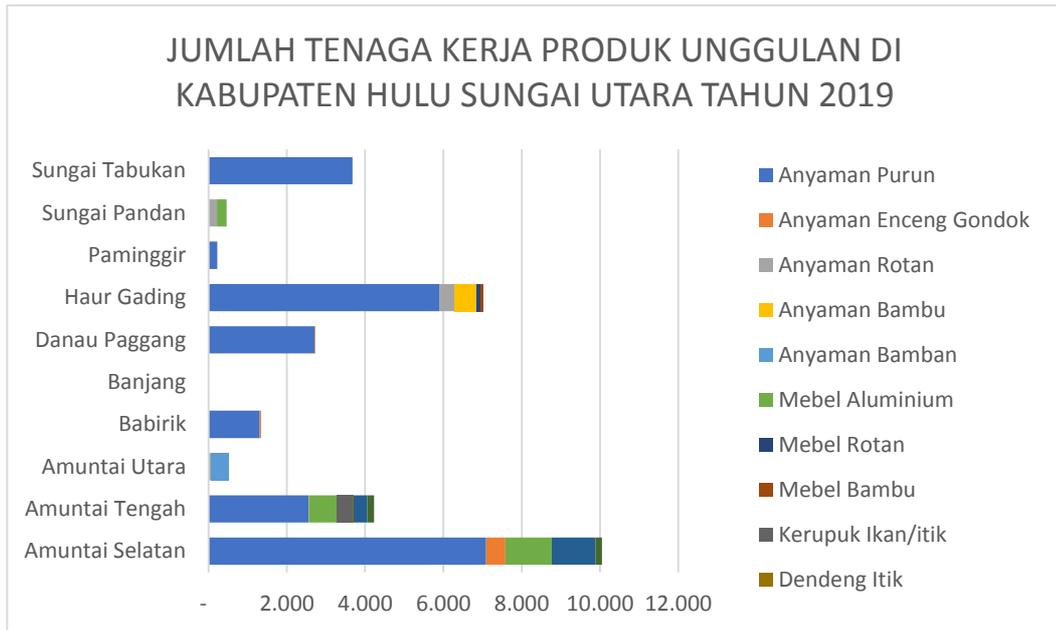
Gambar 4.26. Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Dilihat dari kewilayahan, Kecamatan Amuntai Selatan tetap mendominasi jumlah tenaga kerja karena memiliki paling banyak unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 10.049 orang atau sama dengan 33,25%. Kecamatan Haur Gading mampu menyerap 6.999 orang atau setara dengan 23,16% dari jumlah tenaga kerja keseluruhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di posisi ketiga adalah wilayah Amuntai Tengah dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.231 orang atau setara dengan 14,00% dari keseluruhan tenaga kerja. Terdapat daerah yang cukup banyak menyerap tenaga kerja pengerajin seperti di wilayah sungai tabukan sebesar 3.679 orang (12,17%), dan di wilayah Danau Panggang sebesar 2.730 orang (9,03%).

Pada tahun 2019, jumlah penyerapan tenaga kerja relative sama dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 30.217 orang dengan komposisi terbanyak ada di kerajinan anyaman purun sebagai pengerajin anyaman sebanyak 23.478 orang (77,70%) dan pada kerajinan mebel aluminium dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.162 (7,15%). Wilayah yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Amuntai Selatan dengan jumlah 10.049 orang (33,25%), Danau Panggang

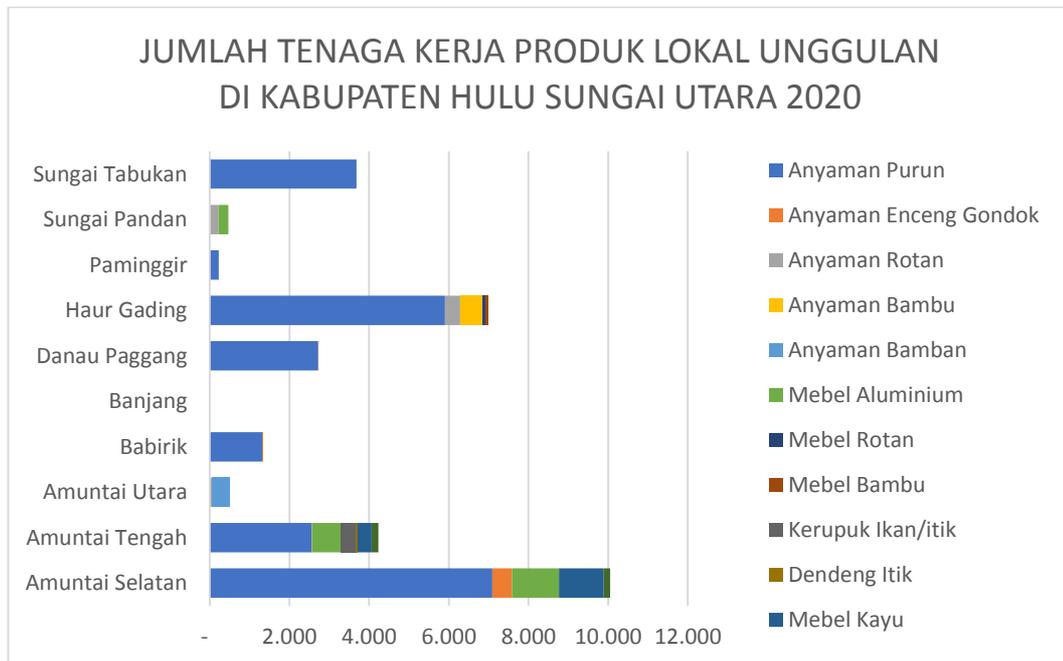
6.999 orang (23,16%), Amuntai Tengah sebanyak 4.231 (14,00%) dan Kecamatan Sungai Tabukan sebanyak 3.679 (12,17%).



Gambar 4.27. Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Pada tahun 2020, jumlah penyerapan tenaga kerja relatif sama dengan tahun 2019. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada waktu ini tidak banyak mengalami perubahan dan dinamika pasar kerja yang cukup stabil dikarenakan jumlah permintaan dan penawaran kerajinan tangan cenderung tetap sehingga penyerapata tenaga kerja juga tida terlalubanyak berubah. Sebanyak 30.217 orang dengan komposisi terbanyak ada di kerajinan anyaman purun sebagai pengerajin anyaman sebanyak 23.478 orang (77,70%) dan pada kerajinan mebel aluminium dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2,162 (7,15%). Wilayah yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Amuntai Selatan dengan jumlah 10.049 orang (33,25%), Danau Panggang 6.999 orang (23,16%), Amuntai Tengah sebanyak 4.231 (14,00%) dan Kecamatan Sungai Tabukan sebanyak 3.679 (12,17%).



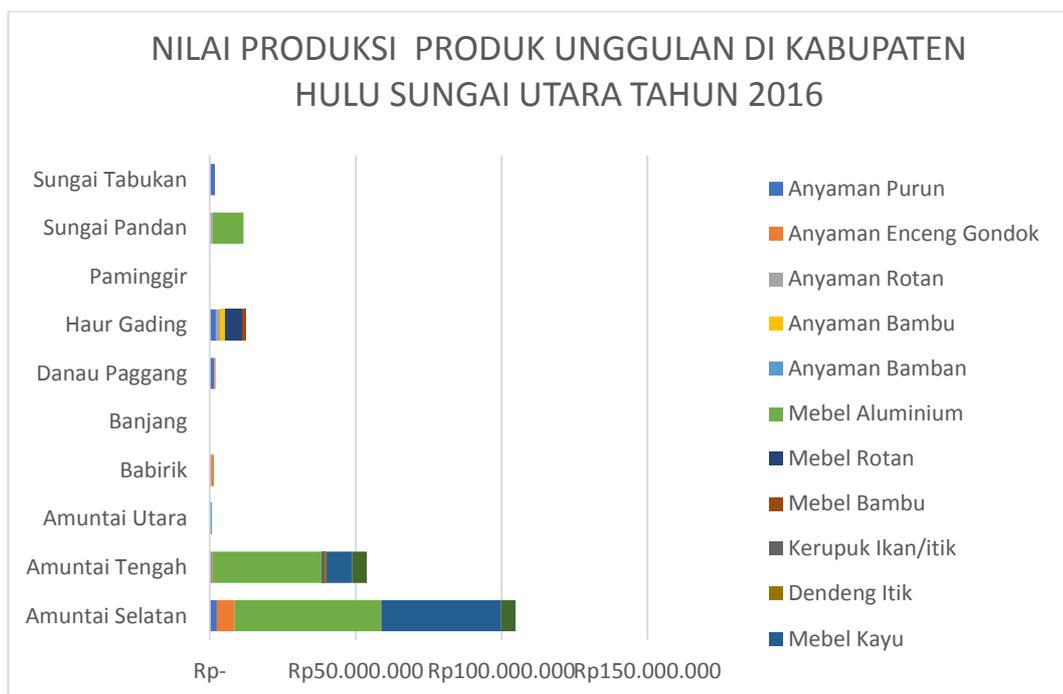
Gambar 4.28. Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Secara keseluruhan dari periode 2016 sampai dengan 2020, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya bidang produk lokal kerajinan tangan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah di Kecamatan Muntai selatan dengan rata-rata penerapannya mencapai 33% dan di Kecamatan Haur Gading yang penyerapannya mencapai 23%. Hal ini dikarenakan di kedua wilayah terdapat banyak macam kerajinan tangan yang digeluti oleh masyarakat seperti anyaman purun, anyaman bambu, dan mebel aluminium. Penyerapan terbanyak menurut jenis kerajinan adalah pada kerajinan anyaman purun karena jumlah unit usaha yang paling banyak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah anyaman purun sehingga penyerapannya pun mencapai 77,7 persen, diikuti dengan mebel aluminium yang menyerap jumlah tenaga kerja mencapai 7,15 persen dari seluruh jumlah tenaga kerja di wilayah kabupaten tersebut.

4.2.9. Perkembangan Nilai Produksi Produk Unggulan Kerajinan

Perkembangan nilai produksi produk unggulan kerajinan dapat terepresentasi kontribusinya terhadap perekonomian daerah melalui pendapatan pada masing-masing jenis pendapatan kerajinan. Semakin banyak pendapatan dari kerajinan tersebut juga menunjukkan tingkat produktivitas kerajinan pada suatu wilayah tertentu. Perkembangan nilai produksi ini dapat digunakan sebagai analisis pendapatan daerah dan wilayah serta menjadi perhatian pusat pendapatan daerah.

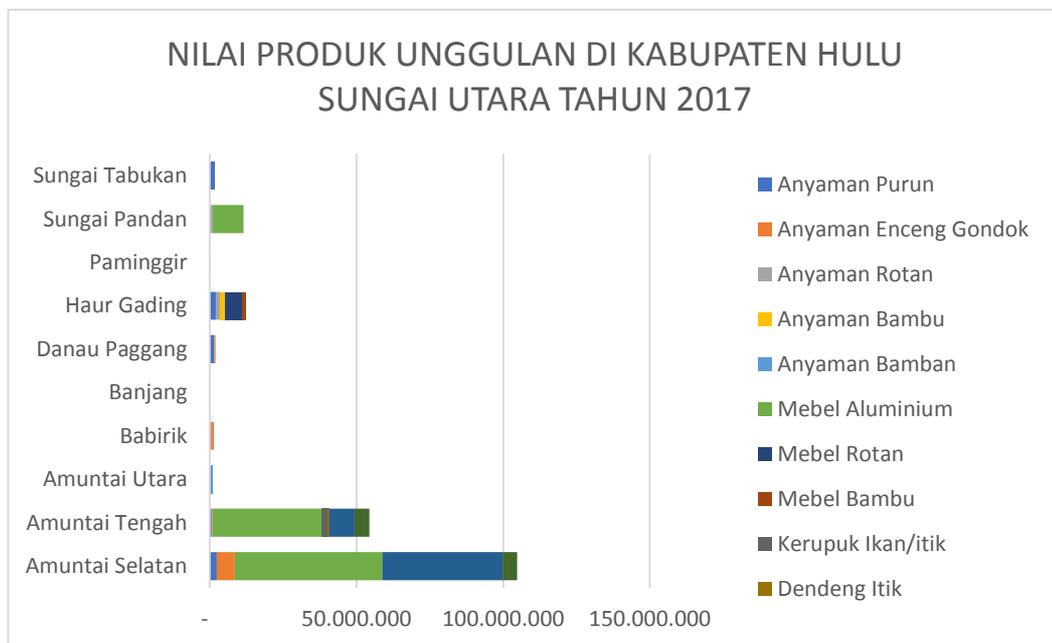


Gambar 4.29. Nilai Produksi Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Sesuai dengan data yang dihimpun oleh BPS, pada tahun 2016 nilai produksi produk unggulan kerajinan tangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai Rp188.303.496.000. Kecamatan yang paling banyak menyumbang nilai produksi barang adalah Kecamatan Amuntai Selatan dengan nilai Rp104.797.606.000, dan disusul oleh Kecamatan Amuntai Tengah dengan nilai produksi yang dikumpulkan mencapai Rp53.765.539.000, serta wilayah Kecamatan Haur Gading yang nilai produksinya mencapai Rp12.361.227.000.

Sedangkan jenis kerajinan tangan yang paling tinggi menyumbang nilai produksi adalah mebel aluminium dengan nilai produksi mencapai Rp98.114.462.000, dan Rp49.756.575.000, dari kerajinan mebel kayu. Meskipun paling banyak jumlah unit usaha ada pada anyaman purun, nilai produksi anyaman purun nilainya mencapai Rp8.825.015.000, dan anyaman enceng gondok yang nilainya mencapai Rp7.615.250.000. Kedua jenis anyaman tersebut merupakan kerajinan tangan yang sangat menjamur di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga memiliki nilai produksi yang sangat tinggi. Jumlah unit usaha yang melimpah dan jumlah pengrajin yang banyak membuat nilai produksi meningkat. Namun, harga jual mebel aluminium dan mebel kayu lebih tinggi, maka nilai produksi kedua produk kerajinan tersebut lebih tinggi dibandingkan produk anyaman purun dan enceng gondok.

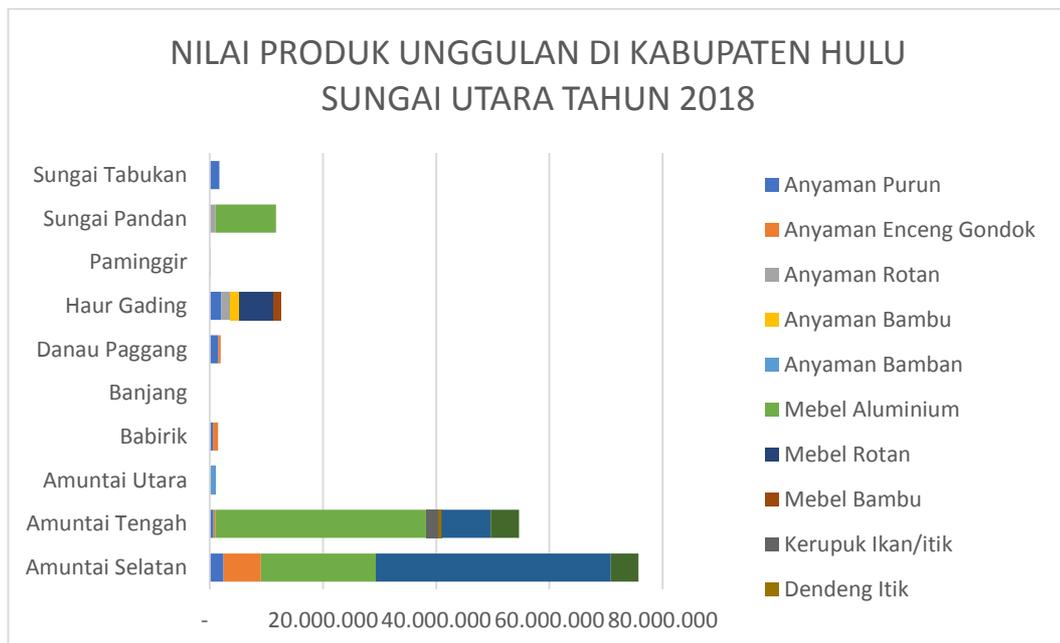


Gambar 4.30. Nilai Produksi Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Di tahun 2017, nilai produksi produk unggulan total mencapai Rp189.056.318.000. Paling banyak ada di wilayah Amuntai Selatan dengan jumlah Rp 104.796.956.000, dan disusul wilayah Amuntai Tengah sebesar Rp 54.350.750.000 serta wilayah Haur Gading dengan jumlah nilai produksi mencapai

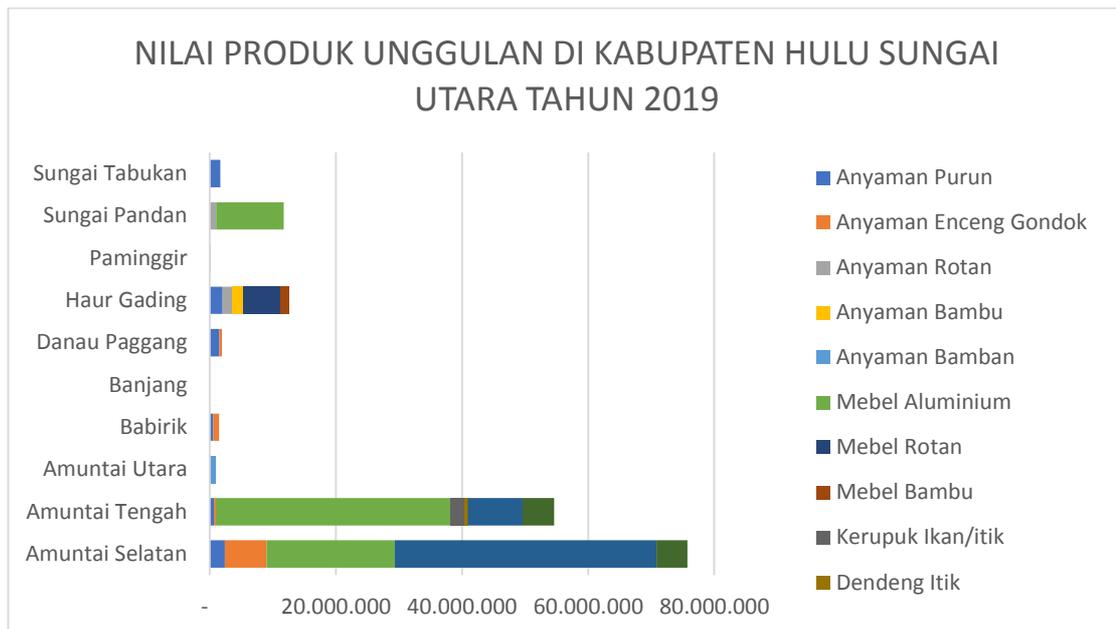
Rp12.443.227.000. Dilihat dari jenis nilai produksi unggulan, mebel aluminium memiliki nilai produksi yang paling tinggi yaitu mencapai Rp 98.114.462.000, dan mebel kayu memiliki nilai produksi Rp 49.756.571.000, serta produksi lampit kayu dengan nilai produksi mencapai Rp. 9.932.028.000. Nilai produksi anyaman purun mencapai Rp. 8.825.015.000, dan anyaman enceng gondok sebesar Rp 7.614.950.000.



Gambar 4.31. Nilai Produksi Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

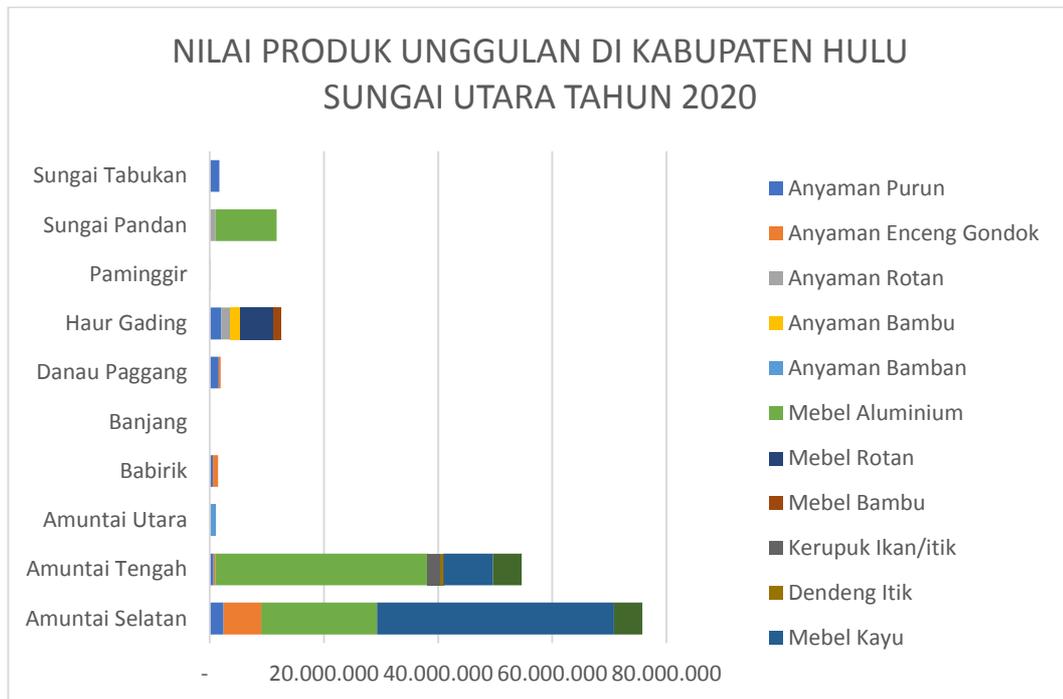
Di tahun 2018, nilai produksi produk unggulan total mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp160.595.022.000. Paling banyak ada di wilayah Amuntai Selatan dengan jumlah Rp 75.759.747.000, dan disusul wilayah Amuntai Tengah sebesar Rp 54.607.913.000 serta wilayah Haur Gading dengan jumlah nilai produksi mencapai Rp 12.466.606.000. Dilihat dari jenis nilai produksi unggulan, mebel aluminium memiliki nilai produksi yang paling tinggi yaitu mencapai Rp 68.274.462.000 dan mebel kayu memiliki nilai produksi Rp 50.206.575.000, serta produksi lampit kayu dengan nilai produksi mencapai Rp 9.932.028.000. Nilai produksi anyaman purun mencapai Rp 8.868.215.000, dan anyaman enceng gondok sebesar Rp 8.215.250.000.



Gambar 4.30. Nilai Produksi Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Di tahun 2019, nilai produksi produk unggulan total mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp160.595.022.000. Paling banyak ada di wilayah Amuntai Selatan dengan jumlah Rp 75.759.747.000 dan disusul wilayah Amuntai Tengah sebesar Rp 54.607.913.000 serta wilayah Haur Gading dengan jumlah nilai produksi mencapai Rp 12.466.606.000. Dilihat dari jenis nilai produksi unggulan, mebel aluminium memiliki nilai produksi yang paling tinggi yaitu mencapai Rp 68.274.462.000 dan mebel kayu memiliki nilai produksi Rp 50.206.575.000 serta produksi lampit kayu dengan nilai produksi mencapai Rp 9.932.028.000. Nilai produksi anyaman purun mencapai Rp 8.868.215.000 dan anyaman enceng gondok sebesar Rp 8.215.250.000.



Gambar 4.30. Nilai Produksi Produk Unggulan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU dalam Angka, berbagai Edisi (data diolah)

Di tahun 2019, nilai produksi produk unggulan total mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp160.595.022.000. Paling banyak ada di wilayah Amuntai Selatan dengan jumlah Rp 75.759.747.000 dan disusul wilayah Amuntai Tengah sebesar Rp 54.607.913.000. Serta wilayah Haur Gading dengan jumlah nilai produksi mencapai Rp 12.466.606.000. Dilihat dari jenis nilai produksi unggulan, mebel aluminium memiliki nilai produksi yang paling tinggi yaitu mencapai Rp 68.274.462.000 dan mebel kayu memiliki nilai produksi Rp 50.206.575.000 serta produksi lampit kayu dengan nilai produksi mencapai Rp 9.932.028.000. Nilai produksi anyaman purun mencapai Rp 8.868.215.000 dan anyaman enceng gondok sebesar Rp 8.215.250.000.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

5.1. Pemanfaatan Produk Lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara

Permasalahan utama dalam pembangunan pertanian adalah pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi pertanian antara lain lahan dan ternak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh khusus Kabupaten Hulu Sungai Utara ternak ruminansia besar (kerbau dan sapi) selain sebagai ternak kerja, dapat juga merupakan sumber pupuk organik, yang saat ini belum banyak dikelola secara optimal. Berdasarkan wawancara banyak petani belum memanfaatkan pupuk kandang sebagai komponen dari kegiatan pertanian mereka. Petani lebih banyak menggunakan pupuk kimia (anorganik) yang berpotensi menurunkan kesuburan lahan.

Usaha peningkatan efisiensi dan mutu produk pertanian harus dilakukan berdasarkan potensi daya dukungnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/1 012006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang baik, dapat digalakkan pembibitan kerbau yang baik khas Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan kualitas kerbau sebagai produk lokal unggulan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerbau HSU. Kerbau Kalimantan yang berbibit unggul akan menambah daya beli dan meningkatkan pendapatan serta akan menurunkan sifat-sifat unggul kepada keturunannya, sehingga mampu menjadi komoditi unggulan baru dan tidak kalah saing dengan kualitas kerbau yang beredar di pasar.

Usaha pengembangan tanaman pangan memerlukan pupuk organik yang berasal dari limbah peternakan. Pengadaan pupuk organik kadang kala mengalami kesulitan pada awal musim tanam karena selain mahal, juga sulit didapatkan. Integrasi antara kegiatan usaha tani dengan kegiatan peternakan akan sangat menguntungkan petani dengan jalan pengurangan biaya produksi dan peningkatan penghasilan.

Peningkatan populasi ternak di kabupaten Sungai Hulu Utara akan meningkatkan limbah ternak yang dihasilkan. Limbah ternak yang dihasilkan antara

lain, limbah padat (kotoran ternak), limbah cair (urin), dan limbah sisa pakan. Apabila limbah tersebut tidak dikelola sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Pembuangan kotoran ternak sembarangan dapat menyebabkan pencemaran pada air, tanah, dan udara (bau), sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, kualitas hidup peternak dan ternaknya serta dapat memicu konflik sosial. Pengelolaan limbah yang baik selain dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan memberikan nilai tambah usaha peternakan.

Pemanfaatan limbah kotoran ternak sebagai pupuk kandang dapat menyehatkan dan menyuburkan lahan pertanian. Limbah urine dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair yang dapat diaplikasikan pada tanah maupun sebagai pupuk daun, sedangkan sisa pakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos atau digunakan sebagai mulsa. Selain yang tersebut diatas, kotoran ternak dapat digunakan sebagai sumber energi (biogas). Sumber energi biogas menjadi sangat penting karena harga bahan bakar minyak/fosil maupun gas yang terus meningkat dan ketersediaan bahan bakar yang tidak konstan dipasaran, menyebabkan semakin terbatasnya akses energi bagi masyarakat termasuk peternak. Integrasi sektor pertanian dengan perikanan dapat dilakukan khususnya dengan tanaman hortikultura (sayuran dan buah), mengingat sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perikanan darat dan rawa.

Integrasi usaha peternakan dengan usaha pertanian merupakan alternatif untuk mengembangkan usaha peternakan yang berkesinambungan. Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri dapat memperbaiki ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia. Akan tetapi biasanya limbah pertanian memiliki kualitas yang kurang baik untuk pakan ternak, maka perlu adanya pengolahan terlebih dahulu untuk meningkatkan mutu dari bahan pakan limbah pertanian misalnya dengan amoniasi atau dengan fermentasi.

Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak akan mengurangi ketergantungan terhadap pakan hijauan dari hasil budidaya yang kita ketahui bahwa lahan untuk budidaya pakan ternak terbatas jumlahnya. Selain itu juga dapat menekan biaya pakan karena limbah pertanian (khususnya jerami) harganya murah bahkan gratis. Dari sudut pandang pertanian pemanfaatan limbah ini akan

meningkatkan nilai tambah, karena limbah yang biasanya hanya dibakar dapat memiliki nilai ekonomi.

Sistem integrasi pertanian dengan ternak ruminansia merupakan upaya percepatan pembangunan peternakan dengan penerapan keterpaduan antara komoditas pertanian dengan ternak yang saling menguntungkan. Manfaat yang didapatkan oleh usaha tani padi adalah limbah ternak berupa kotoran sebagai sumber pupuk organik, sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh ternak adalah penyediaan pakan berupa jerami padi. Pelaksanaan sistem integrasi pertanian terpadu dapat mendorong terciptanya kawasan agribisnis terpadu antara pertanian-peternakan dan perikanan.

Beberapa hal yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan sistem integrasi pertanian terpadu antara lain:

a. Organisasi (komunitas) petani/peternak/pelaku perikanan

Organisasi/komunitas petani termasuk peternak dan pelaku usaha perikanan sebagai subjek utama dalam kegiatan. Organisasi diperlukan untuk mempermudah kegiatan dan pengaturan usaha, seperti pembinaan, pendampingan, penyuluhan dan termasuk mendapatkan bantuan alat pertanian, peternakan, perikanan dan modal.

Berdasarkan survey, organisasi atau komunitas petani mampu memberikan fasilitas pinjaman modal bagi petani. Lembaga keuangan formal memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meminjamkan modal bagi komunitas petani karena biasanya komunitas petani diketuai oleh petani yang cukup mampu secara keuangan sehingga lebih meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan formal dalam pemberian pinjaman.

b. Lembaga manajerial berbadan hukum (koperasi)

Suatu komunitas yang terbentuk akan lebih efisien jika berbadan hukum, sebagai contoh dalam bentuk koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama masyarakat yang tergabung dalam satu komunitas. Tidak semua petani kecil lahan sempit mampu untuk menanggung beban biaya demi menghasilkan produk yang baik. Kebanyakan para petani kecil ataupun kelompok tani bertindak sebagai penggarap/pelaku pertanian dengan cara bagi hasil, ataupun dengan meminjam dana pada pihak lain. Untuk melindungi petani atau kelompok tani diperlukan

adanya kelembagaan yang mengatur. Selain itu, koperasi juga dapat difungsikan sebagai lembaga yang mengatur penjualan produk pertanian, ternak maupun perikanan.

Dalam hal ini, pemerintah melalui dinas terkait dapat memberikan peran dalam penyuluhan dan pembinaan serta pendampingan kegiatan masyarakat. Hal lain yang diberikan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan berupa pupuk, dan bibit. Selain itu koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan semiformal yang dapat menjadi salah satu solusi bagi petani dalam mendapatkan pinjaman modal jika petani tidak mampu mendapatkannya melalui lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan semiformal seperti koperasi dapat menghindarkan masyarakat terjerat dari pinjaman modal melalui lembaga keuangan informal seperti rentenir, dan sebagainya yang memberikan bunga sangat tinggi yaitu kurang lebih 50% per bulan.

c. Lembaga penguat modal

Pada umumnya, pelaku usaha pertanian di daerah tergolong sebagai petani kecil, peternak dan pelaku usaha perikanan skala rakyat dengan penghasilan rendah. Adanya lembaga penguat modal diharapkan para petani, peternak, dan pelaku usaha perikanan akan terpenuhi kebutuhan modal usahanya. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan di beberapa daerah Indonesia, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Pradiptyo et al, 2013) diketahui bahwa masyarakat petani (petani, petani ikan, peternak) di Indonesia cenderung menggunakan lembaga keuangan informal dalam mencari kredit untuk mendukung usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban bunga kredit yang dibebankan oleh lembaga keuangan semiformal seperti koperasi cukup besar bagi petani yang notabene memiliki profit cukup rendah. Beban bunga kredit yang dibebankan oleh lembaga keuangan semiformal adalah kurang lebih 20% tiap bulannya. Bahkan, petani juga tidak jarang menggunakan lembaga keuangan informal seperti rentenir, dan sejenisnya yang memberikan bunga kurang lebih 50% setiap bulannya. Tentu saja, hal ini berdampak pada penurunan kesejahteraan petani, karena bunga yang dibayarkan cukup tinggi sementara hasil profit pertanian tidak cukup besar untuk membiaya bunga kredit dan penghidupan keluarga petani. Maka dari itu diperlukan

sebuah bantuan lembaga penguat modal bagi petani khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bank sebagai lembaga keuangan formal tidak mudah memberikan kredit sebagai pinjaman modal usaha pertanian. Hal ini dikarenakan hasil pertanian memberikan hasil yang fluktuatif tergantung musim dan penghambat sektor pertanian lainnya seperti hama, banjir, dan lainnya. Sehingga, bagi lembaga keuangan formal sektor pertanian merupakan sektor yang rentan dan kurang terpercaya dalam pengembalian kredit atau pinjaman. Akibatnya, petani sulit mendapatkan pinjaman modal dari bank. Maka dari itu perlu sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan formal maupun semiformal dalam pemberian pinjaman modal bagi petani.

Kerjasama keuangan antara lembaga keuangan formal dan pemerintah daerah selama ini telah dilakukan. Lembaga keuangan formal memiliki kecenderungan untuk pemberian pinjaman modal karena adanya jaminan dari pemerintah daerah berupa dana daerah yang didepositokan di lembaga keuangan yang bersangkutan. Namun, berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kerjasama penguatan modal petani belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama monitoring terhadap petani antara pegawai pemerintah daerah dengan pegawai lembaga keuangan formal. Pegawai pemerintah daerah memonitor dan membina petani agar dapat membayar pinjaman modal dan mendapatkan profit hasil pertanian yang maksimal. Sedangkan, pegawai lembaga keuangan formal memberikan pembinaan terkait pengelolaan keuangan untuk penguatan modal. Namun yang terjadi di lapangan bahwa pembinaan ini tidak memberikan hasil yang diinginkan. Saat pembinaan petani cenderung dapat melakukan usaha dengan baik, namun setelah pembinaan selesai petani masih belum bisa mandiri dalam usaha pertanian maupun pengelolaan keuangan, sehingga perilaku usahanya kembali seperti semula sebelum pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa efek pembinaan tidak dapat berlaku dalam jangka panjang.

Kendala lainnya yang muncul adalah karena rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan pembinaan tidak berjalan maksimal. Petani masih belum mampu secara teknis dan belum mampu menguasai teknologi secara cepat dan baik.

Sedangkan, program pembinaan seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang tidak lama. Selain itu, adanya penggantian kepengurusan kelompok petani membuat pembinaan juga tidak dapat bertahan lama. Beberapa fakta menunjukkan bahwa petani yang telah berhasil dibina seringkali ‘meninggalkan’ kelompok/komunitas petani dan mengadakan usaha secara mandiri, tidak berkelompok lagi. Sehingga, tidak terjadi transfer ilmu kepada petani lainnya atas pembinaan yang pernah dilakukan.

5.2. Perlindungan Produk Lokal Input Produksi

Permasalahan utama dalam pembangunan pertanian adalah pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dilokasi pertanian antara lain lahan pertanian dan komoditas peternakan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai contoh, di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat ternak ruminansia (kerbau dan sapi) yang melimpah. Selain sebagai ternak kerja, jenis peternakan ini juga dapat digunakan sebagai sumber pupuk organik yang saat ini belum banyak ditemui dan dikelola dengan baik oleh para peternak. Selama ini, petani kebanyakan menggunakan pupuk kimia (anorganik) untuk melakukan penyuburan tanah, padahal pupuk ini berpotensi menurunkan kesuburan lahan. Pemanfaatan penggunaan pupuk yang berasal dari hewan ini mampu menjadi komoditi baru asli Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seharusnya dapat dilindungi menjadi produk unggulan lokal.

Usaha peningkatan efisiensi dan mutu produk pertanian harus dilakukan berdasarkan potensi daya dukungnya. Usaha pengembangan tanaman pangan memerlukan pupuk organik yang berasal dari limbah peternakan. Pengadaan pupuk organik kadang kala mengalami kesulitan pada awal musim tanam karena selain mahal, juga sulit didapatkan. Integrasi antara kegiatan usaha tani dengan kegiatan peternakan akan sangat menguntungkan petani dengan jalan pengurangan biaya produksi dan peningkatan penghasilan. Potensi limbah peternakan ini biasa menjadi komoditi unggulan lain mengingat besarnya potensi lokal yang dapat diserap oleh pemerintah daerah.

Selain produk pertanian dan peternakan, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki potensi produk kerajinan tangan yang besar dan dibutuhkan oleh pasar

yang besar. Sesuai dengan SK Bupati No. 218 Tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana produk-produk yang termasuk dalam SK tersebut antara lain anyaman purun, anyaman enceng gondok, anyaman rotan/lupu, anyaman banbu, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bamboo, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu, lampit rotan. Pada SK tersebut, produk yang mendominasi sebagai produk unggulan adalah bidang kerajinan. Kerajinan purun dan sejenisnya telah terkenal dilakukan oleh produsen Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berbagai variasi kerajinan dan anyaman biasanya diperdagangkan di pasar-pasar induk dengan konsumen berasal dari daerah tersebut ataupun luar daerah. Keberagaman varian dan harga yang lebih terjangkau membuat ragam kerajinan di daerah tersebut digemari oleh banyak pengunjung secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Disisi lain, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat luar biasa. Wilayah yang sebagian besarnya adalah rawa ini secara garis besar memiliki potensi pada peternakan hewan rawa dan perikanan rawa. Terbukti, berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dituangkan pada publikasi hasil pertanian dan peternakan terdapat komoditi yang hasil produksinya melimpah seperti padi, peternakan kerbau, pengembangbiakan itik, perikanan tangkap yang cukup mendominasi pendapatan daerah dibidang agroindustri. Salah satu potensi besar adalah pemanfaatan lahan rawa untuk budidaya ternak unggas di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah banyak dilakukan. Sejak dahulu kala, kabupaten ini terkenal dengan itik alabio yang merupakan salah satu plasma nutfah unggas lokal yang dibudidayakan di rawa.

Itik alabio terkenal sangat adaptif terhadap kondisi lahan rawa sehingga bisa menjadi komoditas potensial bagi daerah dengan kondisi alam daerah setempat. Hal ini bisa menjadi potensi yang besar untuk mendukung ketercapaian produk asli daerah dan dikembangkan pada berbagai produk lanjutan yang bernilai komersial. Namun belum disadari atas potensi hal ini yang menyebabkan perlindungan produk hasil olahan sumberdaya alam belum maksimal untuk dikelola dengan baik oleh masyarakat. Rendahnya kegiatan peatihan dan peningkatan mutu serta peningkatan

pemanfaatan limbah kotoran hewan menyebabkan hingga kini efektifitas perlindungan produk lokal belum berjalan secara maksimal.

Kelimpahan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki manajemen perlindungan yang baik. Dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam selama ini masih belum ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa bahan baku yang menjadi komoditas unggulan, yang kemudian dijual ke luar Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dalam keadaan mentah. Beberapa kajian menyebutkan bahwa sumberdaya alam mentah tersebut seharusnya diolah terlebih dahulu dengan tujuan menjaga eksklusifitas perolehan bahan baku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelimpahan sumberdaya yang dimiliki belum dilindungi dengan baik dan belum terjaga keaslian sumberdaya alamnya. Padahal tingginya eksploitasi sumberdaya alam mentah tidak hanya menurunkan keseimbangan lingkungan namun juga akan mengurangi pendapatan daerah dalam jangka panjang.

Selain kajian berkaitan dengan perlindungan terhadap produk lokal yang menjadi input produksi di atas, perlu juga dipertimbangan perlindungan usaha untuk input produksi UMKM dan IKM produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memerlukan perlindungan ketersediaan dan keterjangkauan input produksi yang diperoleh dari daerah lain. Dalam hal ini diperlukan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dan fasilitasi kemitraan dengan instansi atau entitas usaha yang ada di daerah lain (seperti Kabupaten/Kota dan Provinsi lain) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan akses pasokan bahan baku agar UMKM dan IKM produk lokal di HSU memiliki kesinambungan produksi dan kualitas produksi. Model kerjasama dan kemitraan strategis dapat dilakukan dengan skema *Government to Government* (G to G), atau *Government to Bussiness* (G to B), atau *Bussiness t Bussiness* (B to B), dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebijakan (*policy paper*) skema atau model mana yang akan dipilih yang cocok dan efektif.

Input produksi lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan input tenaga kerja lokal. Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal yang bekerja di sektor pengolahan dan pemasaran produk lokal juga penting untuk

dipertimbangkan. Hal ini terutama terkait dengan kebijakan penanaman modal yang berasal dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Investor yang akan mengembangkan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan tetap melakukan pembinaan dan kemitraan terhadap pelaku usaha lokal dan juga menggunakan tenaga kerja lokal. Hal ini untuk menjamin keaslian dan keberlangsungan produk lokal yang ada dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam jangka panjang.

Secara umum, perlindungan produk lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum maksimal dilaksanakan. Terbukti dengan belum adanya Undang-undang yang menyertakan tentang perlindungan produk lokal seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. Perlindungan produk lokal atas potensi sumberdaya alam sangatlah penting, karena mampu menjadi pengaman dalam penggunaan produk serta memaksimalkan komoditi unggulan untuk melakukan produksi massal sehingga menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Disisi lain, perlindungan output produksi juga dapat dilakukan dengan adanya kajian yang mengemukakan tingginya pendapatan daerah atas penggunaan produk tersebut. Perlindungan produk lokal dapat dimanfaatkan untuk menjaga autentifikasi (keaslian) produk lokal sehingga mampu mengembangkan produktivitas daerah yang berujung pada kemandirian pendapatan daerah.

5.3. Perlindungan Produk Output Lokal Produksi

Tingginya potensi sumberdaya alam yang ada pada Kabupaten Hulu Sungai utara dituangkan dalam berbagai produk unggulan, salah satunya kerajinan tangan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Seiring dengan hal tersebut, aksi realisasi dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membuka showroom kerajinan Dekranasda sejak tanggal 1 Januari 2018 yang berlokasi di Pasar Rakyat Muara Tapus, Ds. Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah. Dengan adanya showroom tersebut diharapkan bias menjadi wadah untuk memperkenalkan kerajinan asli daerah kepada masyarakat luas.

Seiring dengan dikenalnya produk lokal tersebut namun masih ada kendala yang dihadapi oleh para pengarjin terkait dengan teknologi pengolahan yang

digunakan. Secara umum, masih banyak pengrajin yang menggunakan mesin manual untuk produk kerajinan tangan dan pengolahan makanan. Hal ini mengakibatkan kualitas produk yang tidak seragam, pengerjaan yang memakan waktu lama dan pada akhirnya akan meningkatkan harga jual. Meskipun pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memfasilitas pelatihan bagi pelaku usaha dan beberapa kali memberikan bantuan alat berteknologi sederhana, namun pelatihan yang dirasakan masih kurang merata bagi setiap sector usaha. Bantuan alat terkadang juga kurang tepat sasaran serta kurangnya modal bagi pelaku usaha juga menghambat peningkatan produktivitas kerajinan di daerah kabupaten tersebut.

Adanya produk luar yang masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi ancaman tersendiri atas keberadaan produk lokal. Produk luar yang masuk cenderung lebih mudah dan murah untuk didapatkan. Apabila berbagai kendala di dalam pembangunan kapasitas IKM tidak kunjung selesai, maka ancaman ini menjadi semakin menggerus produk lokal. Antisipasi atas hal ini sebaiknya segera dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan perlindungan produk lokal yang memadai.

Di sisi lain, keberagaman produksi olahan pangan berbasis itik dan kerajinan purun/rotan telah banyak variasi namun kurang inovasi. Meskipun variasi dalam hal jenis, desain dan model kemasan telah bervariasi namun masih belum melakukan inovasi yang signifikan. Banyaknya jenis barang masih memiliki kemiripan yang cukup tinggi sehingga signature suatu barang atau brand masih belum terlihat. Ditambah dengan produksi yang masih manual, belum menggunakan teknologi yang mumpuni membuat waktu dan biaya produksi menjadi meningkat. Hal ini cenderung memberikan kerugian untuk produsen karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dan kehilangan omzet. Masalah omzet dan pendapatan produsen juga diperparah dengan ketergantungannya terhadap konsumen yang sebagian besar adalah pegawai pertambangan di wilayah tersebut, sehingga apabila terjadi penurunan aktivitas pertambangan maka akan berdampak pada kemerosotan daya beli masyarakat terhadap produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro setempat.

Pelatihan, bantuan peralatan, fasilitas permodalan serta gerakan peningkatan inovasi dan kreatifitas serta sarana pemasaran menjadi langkah yang diperlukan untuk menjawab rendahnya produktivitas komoditi unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Komitmen pemerintah untuk menempatkan program pengembangan IKM dan usaha mikro seharusnya masuk ke dalam rencana prioritas. Disisi lain, perlunya studi banding ke daerah yang memiliki jenis komoditas yang serupa juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing pada IKM dan usaha mikro. Perlu peran pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas yang dibarengi dengan perlindungan produk lokal melalui penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), adanya peraturan tentang produk lokal, memiliki ciri dan signatur otentik untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan branding dan logo yang sesuai dengan wilayah tersebut agar menjadi faktor identik untuk wilayah tersebut. Langkah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan daya saing, meningkatkan harga jual serta memberikan perlindungan terhadap produk dan produsen sehingga produsen dan konsumen dan secara eksklusif memproduksi dan mengonsumsi barang asli Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5.4. Analisis Produk Unggulan Kerajinan

Berdasarkan SK Bupati no.218 Tahun 2012 tentang Penetapan Produk Unggulan Kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain anyaman purun, anyaman enceng gondok, anyaman rotan/lupu, anyaman bamboo, anyaman bamban, mebel aluminium, mebel rotan, mebel bamboo, kerupuk ikan/itik, dendeng itik, mebel kayu dan lampit rotan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan hasil produksi yang dihasilkan dari produk unggulan kerajinan sangat tinggi dan tidak pernah mengalami penurunan.

Jumlah unit usaha produk unggulan kerajinan yang menembus angka hingga ribuan menunjukkan eksistensi dan tingkat produktivitas masyarakat untuk menghasilkan produk kerajinan terutama anyaman purun. Hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat kelompok masyarakat yang menjadi pengerajin anyaman purun yang jumlahnya ratusan hingga ribuan unit

usaha kerajinan. Eksistensi ini menandakan bahwa besarnya permintaan masyarakat terhadap anyaman purun dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat tinggi sehingga jumlah penyedia anyaman purun tidak pernah menurun dan bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Disisi lain jenis kerajinan mebel aluminium, mebel kayu dan lampit kayu juga memiliki jumlah unit produksi yang melimpah. Hasil dari kerajinan ini cukup diminati karena adanya penambahan jumlah produksi pada unit usaha pengerajin dari tahun ke tahun. Jumlah unit usaha yang lain seperti anyaman enceng gondok, anyaman bamboo dan anyaman bamban tidak sebanyak anyaman purun dengan jumlah unit usaha berkisar pada puluhan hingga ratusan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Produk unggulan kerajinan cenderung berbentuk IKM dan usaha mikro dan usaha turun menurun. Jumlah unit usaha pada beberapa jenis kerajinan seperti anyaman purun dan mebel aluminium membuat penyerapan tenaga kerja di bidang tersebut juga tinggi. Setiap tahunnya, 13.000 lebih tenaga kerja terserap sebagai pengerajin anyaman purun di hampir seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Produktivitas kerajinan anyaman purun sangatlah tinggi hingga menyerap jumlah pengerajin anyaman purun yang sangat banyak. Terlebih, status pengerajin yang masih memiliki garis saudara dengan pengerajin lainnya menunjukkan bahwa keterlibatan anggota keluarga dan kemampuan kerajinan tangan turun temurun yang diwariskan secara alami berjalan sangat baik dan tidak membutuhkan pelatihan untuk mahir menjadi pengrajin anyaman purun karena telah diasah sedari dini. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi pemerintah daerah bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor IKM dan usaha mikro khususnya pengerajin anyaman purun sangatlah tinggi dan tidak memerlukan pelatihan untuk memberikan pengajaran membuat anyaman. Hal ini tidak hanya terjadi pada tenaga kerja anyaman purun namun juga anyaman yang lain seperti anyaman enceng gondok, anyaman bamboo, anyaman rotan dan anyaman bamban. Meskipun jumlah unit usaha anyaman-anyaman tersebut tidak sebanyak anyaman purun, namun eksistensi anyaman tersebut memberikan pilihan lain di pasar kerajinan, maka dari itu keberadaan dan peminat ketiga jenis anyaman lain tersebut masih cukup banyak. Pola penyerapan tenaga kerja pada ketiga jenis anyaman tersebut juga tidak berbeda

jauh dengan penyerapan pada anyaman purun, yaitu melalui garis keturunan keluarga sehingga kemampuan sebagai pengrajin juga di dapatkan di lingkungan keluarga.

Disisi lain, sudah banyak pengerajin yang melakukan inovasi terkait dengan pengolahan kerupuk ikan/itik dan dendeng itik. Melimpahnya sumberdaya itik alabio menjadi suatu kekuatan tersendiri bahwa terdapat protein hewani selain daging dan ayam yang dapat dikonsumsi dan dapat diolah menjadi suatu industry tersendiri bagi masyarakat lokal. Inovasi kerupuk ikan, itik dan dendeng itik dapat menjadi suatu terobosan bawasannya terdapat komoditas unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui industri pengolahan. Dengan adanya inovasi ini maka akan memperkaya olahan itik dan wisata kuliner yang lain serta oleh-oleh khas Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, industry mebel juga cukup berkembang dengan baik seperti mebel kayu, mebel aluminium dan lampit kayu juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak hingga mencapai 1000 pegawai di beberapa wilayah penghasil mebel. Hal ini menunjukkan bahwa industri produk unggulan kerajinan memang sangat produktif dan dapat menyerap tenaga kerja sangat efektif.

Nilai produksi industri produk unggulan kerajina juga berkembang dengan sangat baik, terbukti tiap tahun menghasilkan nilai produktivitas yang sangat tinggi mencapai 188 Milyar rupiah lebih per tahun. Penyumbang pendapatan terbesar adalah dari mebel aluminium dengan nilai produksi mencapai 98 milyar rupiah, dan disusul dengan nilai produksi mebel kayu dengan nilai 49 milyar rupiah. Namun dengan adanya pandemi Covid penurunan jumlah nilai produksi cukup signifikan dimana pada tahun 2020 nilai produksi keseluruhan merosot hingga mencapai 160 Milyar. Di sisi lain, meskipun jumlah unit usaha anyaman menduduki nomor satu namun, nilai produksi keseluruhan per tahun hanya mencapai 8 milyar. Namun nilai produksi ini tidak banyak merosot di masa pandemi Covid yang artinya permintaan dan jumlah produksinya cukup stabil.

Secara umum, produk kerajinan tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat signifikan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Model usaha berbentuk IKM dan kegiatan usaha rumahan serta penyerapan tenaga kerja yang

turun temurun menjadikan jenis usaha ini dapat terus eksis di tengah perubahan ekonomi global. Karakteristik IKM dan kemampuan masyarakat dalam kegiatan kerajinan yang dimiliki secara turun temurun tidak memerlukan suatu skill pelatihan yang kompleks karena sudah memiliki skill alami sejak dini. Peningkatan kapasitas IKM dapat dilakukan melalui digital marketing, ekspor produk kerajinan ke luar negeri, membuat label merk, membuat lisensi merk dagang atau bahkan HKI atas suatu model atau corak anyaman ataupun mebel. Hal-hal tersebut akan dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu barang kerajinan dan dapat meningkatkan pendapatan pengrajin serta pendapatan asli daerah. Yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan branding produk kerajinan agar memiliki signatur yang jelas supaya tidak ada klaim atas suatu corak atau model kerajinan yang sudah jadi dari pesaing. Dengan adanya merk dagang yang jelas produk kerajinan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikenal dengan mudah dan tidak akan terjadi klaim atas suatu corak atau model kerajinan yang diperdagangkan di pasaran nasional ataupun internasional.

Perlindungan produk kerajinan unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat dibutuhkan terkait dengan komoditas kerajinan unggulan yang tertera dalam SK Bupati. Perlindungan produk ini diharapkan mampu melindungi produk asli wilayah ini sehingga apabila ada kompetitor yang lain produk-produk wilayah ini sudah aman dan tidak akan mengalami pembajakan. Lisensi dagang juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk dibidik pada pasar internasional.

5.5. Peningkatan Eksistensi UMKM

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro dan IKM juga harus terus dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan secara langsung melalui program kerjasama dengan mitra lain. Sesuai dengan pemaparan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa IKM dan usaha mikro pada Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh industri non formal yang bergerak dibidang kerajinan.

Sektor industri memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Di samping memiliki daya serap yang tinggi terhadap output sektor primer,

keberadaan sektor industri juga berkontribusi dalam mendorong kemajuan sektor-sektor lain. Industri merupakan salah satu pilar transformasi struktur ekonomi yang diharapkan mampu memberikan nilai lebih bagi pembangunan. Secara umum, potensi sumberdaya alam yang diolah melalui industri kerajinan dengan bahan dasar dari pertanian dan kehutanan seperti rotan, bamban dan bamboo.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, keberadaan UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara harus dimanfaatkan dengan cermat. Berbagai dukungan seperti peningkatan infrastuktur fisik, jaringan pembinaan dan langkah pengajuan legalitas formal yang perlu dibuka selebar-lebarnya. Mempermudah aturan pengajuan legalitas industri dapat menjadi langkah baru agar banyaknya industri non formal dapat meningkatkan industrinya menjadi industri formal. Dengan adanya dukungan administratif maka akan semakin mudah perlindungan produk lokal digalakkan. Produsen industri akan menyadari eksklusifitas merk industri baik industri pangan, sandang logam, kimia bahan bangunan dan terlebih kerajinan. Dewasa ini, produk kerajinan telah mengalami tranformasi yang cukup baik dari sudut pandang perlindungan karena menyangkut sektor ekonomi kreatif yang menilai pentingnya perlindungan intelektual atas karya seni yang dibuat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan produk lokal atas kerajinan bisa sangat dihargai apabila memiliki entitas legal yang memadai.

Selain itu juga, kemudahan atau fasilitas insentif kemudahan berusaha bagi UMKM dan IKM dapat dilakukan dengan pemberian insentif khusus terkait dengan pengenaan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan insentif pajak dan retribusi daerah bagi UMKM dan IKM produk lokal, dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah dengan penentuan kebijakannya dibawah koordinasi dan monitoring OPD Penanaman Modal dan monitoring penerapannya di bawah koordinasi OPD Pendapatan Daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah dari hari pertanian palawija, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu komoditi unggulan dari peternakan adaah kerbau rawa dan itik alabio juga menjadi fauna otentik dari wilayah tersebut sehingga dapat digunakan sebagai kekuatan intern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain terdapat komoditi perikanan dan perkebunan yang dapat diolah secara lebih lanjut untuk meningkatkan nilai barang sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Cara untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam adalah melalui industri pengolahan.

Melimpahnya produk unggulan kerajinan berperan aktif dalam keterserapan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Diketahui bahwa industri yang paling mendominasi adalah industri kerajinan meskipun industri pangan dan logam juga berkembang pesat pada wilayah ini. Industri kerajinan produk unggulan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat setempat adalah kerajinan anyaman purun. Kerajinan ini telah ada sejak lama dan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dari tahun ke tahun. Kerjina produk unggulan lain adalah mebel kayu dan mebel aluminium yang eksis dari tahun ke tahun serta memiliki nilai produksi yang sangat tinggi juga bertahan sebagai kerajinan produk unggulan yang mumpuni.

Sumbangsih produk kerajinan lokal unggulan terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi tiap tahunnya. Disisi lain, industri inovasi olahan itik juga menjamur seiring dengan adanya teknologi dan efisiensi produk lokal olahan. Industri produk lokal dan kerajinan terus berkembang dari tahun-ketahun. Meskipun hingga kini industri pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih didominasi oleh industry dengan status non formal, kepemilikan dokumen legalitas administrasi masih sangat minim. Berdasarkan fakta tersebut, perlindungan terhadap produk lokal sangat diperlukan. Perlindungan produk lokal dapat dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Produk Lokal untuk

meningkatkan proteksi dan eksklusifitas produk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlindungan Produk lokal dapat digunakan untuk melindungi faktor input, faktor output, perlindungan produk industri, perlindungan kekayaan intelektual pada produk kerajinan dan produk-produk IKM serta penerbitan HAKI. Dengan adanya perlindungan produk lokal maka dapat meningkatkan pendapatan lokal daerah dan melindungi sumberdaya alam asli Kabupaten Hulu Sugai Utara.

6.2. Implikasi Kebijakan

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk upaya perlindungan produk lokal dalam upaya perlindungan pada produk input, output, dan perlindungan hak cipta. Perlindungan terhadap produk lokal nantinya harus direncanakan secara terstruktur sehingga diperlukan perencanaan yang matang baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selain itu perlu adanya kerjasama dengan beberapa lembaga lainnya seperti lembaga penguat modal, lembaga keuangan bank dan non-bank, usaha mikro dan IKM.

Perlu adanya kemitraan dengan penyedia bahan baku maupun bahan antara yang diperlukan. Kebijakan ekspor produk dilakukan jika kebutuhan lokal sudah terpenuhi. Kebijakan ekspor ini perlu disertai dengan perlindungan produk dengan pendaftaran Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang berupa merek, hak paten, rahasia dagang, desain industri, dan indikasi geografis.

Kerbau rawa yang menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memerlukan perbaikan sistem yaitu dari pemeliharaan secara dilepas menjadi semiintensif atau intensif, peningkatan jumlah dan kualitas pakan, serta pelayanan kesehatan ternak akan mengoptimalkan produktivitas kerbau lokal. Dengan demikian kerbau yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diatur. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya pelestarian sumberdaya genetika kerbau, perlindungan konsumen, peningkatan mutu bibit kerbau dan pencapaian kinerja agribisnis dan agroindustri. Selain itu diperlukan upaya dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang baik.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian di atas maka dapat disajikan beberapa implikasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan untuk masuk dalam regulasi peraturan daerah perlindungan produk local, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian insentif dan kemudahan dalam berusaha dan penanaman modal;
2. Fasilitasi perijinan, pembinaan, dan peningkatan pertumbuhan usaha;
3. Fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
4. Fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
5. Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi produk;
6. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal; dan
7. Fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh U dan A Nurhayu. 2004. Integrasi ternak itik dengan sistem usahatani berbasis padi di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Pros . Seminar dan Ekspose Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak . Denpasar, 20-22 Juli 2004. Puslitbang Peternakan, BPTP Bali dan CASREN. him. 234-239.
- Abdullah L, Karti PDMH, Hardiosoewigyo S. 2005. Reposisi tanaman pakan dalam kurikulum fakultas Peternakan. Prosiding Lokakarya Nasional Tanaman pakan Ternak. Bogor 16 September. Hlm. 11-17.
- Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. 2017. Profil Investasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Pedaman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Pedaman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2016. Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2017. Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2018. Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2019. Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2020. Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2021. Hulu Sungai Utara: Badan Pusat Statistik
- Blakely, Edward J. (1994) Planning Local Economic Development (Theory and Practice). California, Sage Publications, Inc.

- Dwiputri, I.N., Kusufi, M.S., dan Allo, A.G. (2019). "Projections of Regional Macroeconomic Conditions using the Univariate Forecasting Method". *Economics Development Analysis Journal* 8(3): 329-342.
- Evans AJ dan AR Setioko. 1985. Traditional systems of layer flock management in Indonesia. In : *Duck Production Science and World Practice*. DJ Farrell and P Stapleton (Eds.). University of New England. pp. 306-322.
- Fahriani A, Eviyati. 2008. Potensi Rumput Rawa sebagai pakan ruminansia: produksi, daya tampung dan kandungan fraksi seratnya. *JITAA*. 33: 299-304
- Fitriyanti, Siska. (2018). Strategi Pengembangan IKM Berbasis Komoditas Itik Alabio & Purun di Kab. Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol 13 No.1 (67-72)
- Widjaja, HAW. 2004, "Otonomi Desa" Rajawali Pers, Jakarta.
- Humphreys LR. 2001. *Tropical pasture utilization*. Cambridge university Press. Cambridge.
- Husna, N., Noor, I., Rozikin, M., 2013. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 No.1 (1-9).
- Hye and Siddiqui, 2010. 'Economic Growth and Management of Natural', *European Journal of Economics. Finance and Administrative Sciences*, 22
- Jinghan, M.L. (1993). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kusuma. Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JEKT* Vol. 9 No. 1 (1-11).
- Ma'ruf, Ahmad dan Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.9 No.1 (44-55).
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi S., (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada.

- Munir, Risfan. (2007) Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan. Jakarta, Local Governance Support Program (LGSP).
- Noor MIL. 2007 Pengembangan lahan rawa berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional, Balai Besar Sumber daya lahan pertanian. Badan litbang pertanian.
- Prasojo DA, S Mugiyono, dan M Mufti. 2013. Penggunaan Azolla Dan Lemna Pada Level Protein Pakan Yang Berbeda Terhadap Bobot Dan Persentase Daging Dan Tulang Karkas Itik Peking. Jurnal Ilmiah Peternakan 1(3): 962-969.
- Prishardoyo, Bambang. (2008). Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati tahun 2000-2005. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, Vol 1 No.1
- Rahayu, Ani Sri, 2010, Pengantar Kebijakan Fiskal, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rante, A., Mire, M.S., Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. INOVASI, Vol.13 No.2 (78-89).
- Ridwan R, Ratnakomala S, Kartika G, Widyastuti Y. 2005. Pengaruh Penambahan dedak padi dan *Lactobacillus plantarum* 1BL-2 dalam Pembuatan Silase Rumput gajah. J. Med Pet. 28 (3) : 117-123
- Rostini T. 2014. Produktivitas Dan Pemanfaatan Tumbuhan Rawa di Kalimantan Selatan Sebagai Hijauan Pakan Berkelanjutan. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sachs, Jeffrey D. and Andrew M. Warner, 1995. 'Natural Resource Abundance and Economic Growth', Working Paper 5398, National Bureau of Economic Research.
- Said. Zainal, 2008. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Sanusi, Bachrawi (2004). Pengantar ekonomi pembangunan, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sariri AK, Ariana S, Sugiyanto. 2011. Peningkatan Nutrien Silase *Pennisetum purpureum* dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi Asam Formiat. Jurnal LPPM Univet bantara Sukoharjo: 7-12
- Simanjuntak. Pyaman J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: LPFE UI.

- Simanjuntak L. 2005. Pengefolaan dan bisnis ternak itik, sebagai sarana pengembangan agribisnis di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Tentang Unggas Lokal III. Semarang, 25 Agustus 2005. Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro, Semarang (in press)
- Stinglitz, J. (2000). Economics of the Public Sector. Third Ed New York: W.W. Norton & Company.
- Suhaimi, A., Royensyah, R. V., Heldawati. (2015). Strategi Pengembangan Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai. Vol.5 No.2 (71-77).
- Sukirno, Sadono, 2011. Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (1994). Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2000). Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2004). Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukirno, Sadono. (2010). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Sukirno, Sadono. (2012). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumihardjo, Tumar. (2008) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis potensi Daerah. Bandung, Fokus Media.
- Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Suparmoko, M, 2000. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5, BPF, Yogyakarta.
- Suparmoko, M. (2002) Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta, Andi Offset.
- Suparmoko. (2002). Ekonomi publik: untuk keuangan dan pembangunan daerah. Yogyakarta: Andi.

- Supriadi, Edy. (2007) Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 18 (2): 103-123.
- Suriapermana S, AM Fagi dan T Rustiati. 1993. Aplikasi Azolla dalam sistem usahatani minapadi di lahan irigasi. Dipresentasikan dalam Seminar Hasil Penelitian. Balai Penelitian Tanaman Pangan. Sukamandi.
- Susanti. E. A., Hanafi. I., Adiono, R. (2013). Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.4 (31-40).
- Tambunan, T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. (2007) *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Terjemahan.
- Triyuwono Iwan & Yustika Ahmad Erani. (2003) *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi & Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*. Malang, Bayumedia Publishing.
- Wahdah, R., Amalia. H.S. (2016). Pengembangan Daya Saing Produk Pda Sentra Kerajinan Purun di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, Vol. 6 No.2 (89-99).
- Weinberg JG, Muck RE, Weimer PJ. 2003. The survival of silafe inoculants lactic acid bacteria in rumen fluid. *J Appl. Mikrobiol.* 94 : 1066 – 1071.
- Widyastuti Y. 2008. Fermentasi silase dan manfaat probiotik silase bagi ruminansia. *J. Med Pet.* 31:1 225-232.
- Zulfa, Amdria. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol.5 No.1 (13-22).
- Zuraida R. 2004 . Profil pengusaha ternak itik pada sistem usahatani di lahan rawa lebak (Studi kasus di desa Setiab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan). *Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner . Bogor, 4-5 Agustus 2004 . Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 614-620.*